



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Membangun
Negeri





Membangun Negeri

Daftar Isi

- vi** Sambutan Ketua OJK
- viii** Pengantar
- 1** Permulaan Penuh Tantangan (2012-2017)
- 19** Perubahan Budaya Kerja
- 37** Dasar-dasar Perwujudan Gedung OJK
- 61** Gedung-gedung OJK di Indonesia Timur
- 87** Gedung-gedung OJK di Indonesia Tengah
- 103** Gedung-gedung OJK di Indonesia Barat
- 173** Indonesia Financial Center (IdFC) di Jakarta
- 187** Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara
- 193** Menuju Indonesia 2045
- 198** Apa dan Siapa - Tim Penulis - Tim Penasehat dan Tenaga Ahli

Sambutan Ketua OJK

Pada tahun 2022 ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) genap berusia sepuluh tahun. Selama satu dasawarsa, OJK membuktikan diri sebagai lembaga negara yang berperan sangat strategis dalam membangun negeri dengan turut menopang dan menggerakkan roda perekonomian nasional melalui sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga yang independen dan kredibel, OJK terus berbenah diri baik melalui pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai mandat undang-undang maupun pembenahan secara internal, seperti pembangunan gedung kantor dan fasilitasnya. Pembangunan ini tidak terbatas pada gedung kantor regional dan kantor OJK di seluruh Indonesia, namun juga penyelesaian perencanaan Kantor Pusat OJK-Indonesia Financial Center serta Gedung OJK di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Buku 10 Tahun Membangun Negeri ini merekam perjalanan OJK mewujudkan cita-cita untuk memiliki gedung kantor sendiri dalam upaya menghadirkan lembaga OJK melindungi masyarakat pengguna jasa keuangan. Gedung OJK dirancang spesifik sesuai lokasi gedung melalui penambahan sentuhan budaya daerah sebagai bentuk apresiasi pada nilai budaya daerah serta kepedulian pada bangunan cagar budaya. Pembangunan Gedung OJK juga mengedepankan prinsip-prinsip kepedu-

lian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini sebagai bentuk respon OJK menjawab tantangan perubahan iklim yang telah menjadi agenda nasional. Seiring dengan implementasi Taksonomi Hijau Indonesia, OJK menerapkan pendekatan green building sejak proses perencanaan, proses konstruksi, hingga operasi bangunan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan (*sustainable building*).

Penerapan budaya lokal dan pendekatan *green building* dalam pembangunan Gedung OJK merupakan bentuk nyata nilai dan karakter yang dipegang teguh OJK. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan Visioner, (INPRESIV) diterjemahkan dalam pembangunan Gedung OJK yang menjadi sarana mewujudkan transformasi struktural dan kultur organisasi OJK. Ke depannya, OJK akan menjadi institusi yang lebih lincah merespons kebutuhan konsumen sektor jasa keuangan, serta mampu mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, profesional, kredibel, dan akuntabel dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain memperkuat nilai dan karakter OJK untuk terus berkarya, Gedung OJK menjadi tempat bagi masyarakat mendapat edukasi keuangan serta wadah pengabdian kepada masyarakat yaitu melindungi konsumen.

Setiap tahap pembangunan gedung kantor OJK senantiasa dilakukan secara terencana, terukur, dan transparan. Sebagai lembaga publik, OJK harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh pembangunan Gedung OJK kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga jasa keuangan. Dalam proses pengadaan tanah, perancangan, dan pembangunan, OJK senantiasa memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menjunjung tinggi nilai integritas.

Pembangunan dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mengedepankan unsur kekuatan dan kegunaan sebagai faktor utama. Gedung OJK juga ramah bagi penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas, termasuk kepentingan kaum lansia dan anak-anak. Ini bukti nyata bahwa OJK merupakan lembaga milik seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisiner OJK mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkomitmen dan berkontribusi dalam proses pembangunan Gedung OJK dan penyusunan buku ini, yaitu seluruh anggota De-

wan Komisiner serta para staf ahli dan advisor Dewan Komisiner bidang pembangunan infrastruktur. Semoga hadirnya buku ini menjadi bentuk perwujudan independensi OJK sebagai lembaga yang berkontribusi nyata dalam mendukung kemajuan negeri kita tercinta.



Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Pengantar

....*nek atimu resik nyambut gawemu entheng...*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penerbitan dokumentasi perencanaan dan pembangunan gedung perkantoran Otoritas Jasa Keuangan ikut menandai perjalanan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penulisan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban mengemban amanah sebagai Deputi Komisioner Humas dan Logistik dalam penyediaan infrastruktur gedung kantor di tahun 2017-2022. Berawal dari penugasan di bidang logistik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, setelah lebih dari duapuluh tahun diantaranya sebagai pengawas bank saat ini dipercaya untuk mengawasi bangunan. Inipun berangkat bahwa OJK belum memiliki kantor sendiri ketika beroperasi, sehingga sering diplesetkan ora jelas kantornya.

Tugas yang tidak ringan karena harus mengoptimalkan anggaran yang hampir sebagian besar merupakan residual, khususnya ketika covid-19 melanda maka dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat membeli tanah dan membangun 6 gedung baru, mendapatkan 2 kantor hibah dan membeli serta menata 5 gedung kantor dan 1 rumah jabatan. Proses

pembelian, perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan memiliki tantangan tersendiri sehingga prosesnya melibatkan advisor dan ahli serta penunjukan pihak kontraktor, pengawas pembangunan serta pihak lainnya. Tidak hanya aspek teknis untuk memastikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya, tetapi juga menjaga *governance* agar tidak menciderai nilai strategis OJK.

Pembangunan gedung yang rata-rata berkisar 10-11 bulan relatif cepat karena Dewan Komisioner OJK telah menetapkan standar dan karakteristik desain bangunan yang mencerminkan *core value* dan filosofis OJK. Gedung tidak sekadar bangunan yang bercerita tentang arsitektur, interior, dan fasilitasnya, tetapi juga membangun persepsi sehingga gedung itu memiliki jiwa yang menggerakkan insan OJK yang bekerja dan/atau industri jasa keuangan serta masyarakat merasakan manfaat keberadaan OJK. Terlebih lagi penguatan ciri lokalitas dan kenyamanan serta ramah lingkungan menjadi tujuan gedung ini kiranya menjadi penanda kota yang baik. Untuk menjalankan fungsi utamanya, gedung OJK juga memfasilitasi masyarakat yang berkebutuhan khusus selain desain penataan ruang kerja terbuka (*flexible open space*), ruang komunal, dan

ruang yang dimanfaatkan pelaku industri keuangan berupa auditorium, ruang rapat, serta ruang pelayanan masyarakat dan pengaduan konsumen keuangan.

Buku ini menyajikan secara lengkap infrastruktur gedung baik yang saat ini sudah dioperasikan maupun masih dalam rencana, termasuk rencana pembangunan gedung kantor yang terintegrasi di Jakarta serta desain kantor OJK di Nusantara lokasi ibukota negara baru.

Terima kasih atas kepercayaan Dewan Komisioner OJK, dukungan Departemen Logistik OJK, KROJK/KOJK dan advisor/ahli serta berbagai pihak yang terlibat termasuk tim penulis buku ini. Semoga segala ikhtiar yang sudah dan akan dilakukan ke depannya mendapat rahmat dan berkah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.



Anto Prabowo
Deputi Komisioner
Humas dan Logistik OJK





Dewan Komisiner
2017-2022

Berdiri, kiri ke kanan: Doddy Budi Waluyo, Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia; Ahmad Hidayat, Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; Tirta Segara, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen; Suahasil Nazara, Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan. Duduk, kiri ke kanan: Riswinandi, Bidang Pengawasan IKNB; Heru Kristiyana, Bidang Pengawasan Perbankan; Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner; Nurhaida, Wakil Ketua Dewan Komisiner; Hoesen, Bidang Pengawasan Pasar Modal.

Permulaan Penuh Tantangan (2012-2017)

Ruang kerja sementara
Kantor Regional 2 Jawa Barat
semasa gedung kantor dalam
renovasi.

Kehadiran OJK

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lahir tahun 2011 dengan tugas yang sangat penting di tengah dinamika perekonomian Indonesia. Amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan OJK bertujuan mengatur, mengawasi, dan menumbuhkan industri jasa keuangan serta melindungi masyarakat penggunaannya. Perbankan dan pasar modal serta ribuan jasa keuangan lain di seluruh wilayah Indonesia harus diatur dan diawasi. Juga jutaan rakyat Indonesia yang membutuhkan perhatian dan perlindungan dari OJK.

OJK lahir di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah belum dapat menyediakan gedung kantor serta fasilitas sarana kerja meskipun tidak ditampik bahwa OJK adalah lembaga negara yang strategis. Hampir sepuluh tahun OJK menghadapi kenyataan harus menyediakan sendiri berbagai infrastruktur, seperti gedung, peralatan teknologi informasi, dan sistem penunjang fungsi lainnya.

Di saat-saat awal, Kantor Pusat OJK harus melaksanakan tugasnya dengan meminjam gedung milik Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan menyewa beberapa bangunan kantor milik swasta. Sementara Kantor Regional dan kantor-kantor OJK (KOJK) di dae-



**Wisma Mulia 2 di
JI Jenderal Gatot Subroto
Kav 42 yang disewa sebagai
KR 1 OJK DKI Jakarta dan
Banten.**

rah masih berada di gedung Kantor Perwakilan BI dan juga menyewa bangunan milik swasta. Hal ini menjadi tantangan yang cukup pelik karena OJK harus menarik kepercayaan masyarakat dan industri keuangan dengan segala keterbatasan itu. Tidak heran, cukup banyak masyarakat yang mempertanyakan eksistensi OJK.

Cita-cita Memiliki Gedung Kantor

Tahun 2022, hampir 10 tahun setelah OJK mulai melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Pusat OJK yang terletak di Jakarta pun belum berupa kantor milik sendiri. Gedung Menara Radius Prawiro yang berada di kompleks Bank Indonesia statusnya pinjam pakai sampai 31 Desember 2022. Beberapa

departemen OJK, seperti Departemen Literasi dan Edukasi Keuangan dan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, menggunakan gedung tersebut. Gedung Soemitro Djohadikusumo di kompleks Kemenkeu saat ini dioperasikan oleh pihak lain selama OJK menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian juga Kantor Regional 1 dengan wilayah DKI Jakarta dan Banten juga masih menyewa gedung milik swasta.

Berbagai aktivitas Kantor Pusat OJK dan Kantor Regional 1 kini banyak dilaksanakan di Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Beberapa departemen, seperti Departemen Logistik, Departemen Organisasi dan SDM, berkantor di sini. Gedung Wisma Mulia 2 disewa hingga 31 Maret 2026.



**Gubernur Bank Indonesia Agus
DW Martowardojo dan Ketua
Dewan Komisiner OJK Mulia-
man D Hadad menandatangani
berita acara serah terima (BAST)
pengalihan fungsi pengaturan
dan pengawasan bank dari Bank
Indonesia kepada OJK di Jakarta,
31 Desember 2013.**

**Aktivitas pegawai OJK
di dalam Gedung Soemitro
Djojohadikusumo, Jakarta.**

Situasi ini sebenarnya juga mencerminkan bagaimana OJK mulai membangun dari luar Ibu Kota. Implementasi desentralisasi dan upaya menjangkau sebanyak mungkin masyarakat terlihat sejak tahun 2016. Di tahun itu, untuk pertama kalinya, OJK mewujudkan cita-citanya yaitu dengan membeli sebuah gedung di Bandung, Jawa Barat.

Hingga tahun 2022, proses masih terus berjalan. Masih ada Kantor Regional dan Kantor OJK (KOJK) di daerah yang menyewa bahkan menempati gedung Kantor Perwakilan BI. Juga tercatat ada sepuluh rencana pembukaan KOJK yang sama sekali belum terwujud.

Mengapa OJK ingin memiliki gedung kantor sendiri? Bagi sebuah lembaga negara yang penting seperti OJK, bangunan kantor adalah simbol kehadiran di tengah masyarakat pengguna industri jasa keuangan. Dengan memiliki gedung sendiri juga akan timbul independensi, kebanggaan karyawan OJK dalam melakukan pengabdian melalui lembaga di mana mereka bekerja. Dengan berdirinya Gedung OJK, simbol dari hadirnya lembaga OJK yang melindungi masyarakat pengguna jasa

keuangan dapat terwujud. Tanpa adanya fasilitas gedung kantor yang representatif, rasanya lembaga ini belum dapat hadir melayani masyarakat sepenuhnya.

Dengan anggaran yang didapat dari pungutan premi kalangan industri jasa keuangan, tidak mudah bagi OJK untuk mengalokasikan anggaran pembangunan gedung kantor dan fasilitas penunjangnya. Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan membuat anggaran pembangunan gedung kantor dan fasilitas bersifat residual. Pengadaan infrastruktur gedung harus diupayakan sendiri dengan pengelolaan efisien dari anggaran yang ada dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai wujud eksistensi, selain tempat bekerja, secara fisik Gedung OJK juga harus mempunyai karakter yang mencerminkan tugas dan fungsinya. Hal ini tentunya harus bahu-membahu dengan komitmen, integritas, dan sistem yang dibangun OJK.



**Keterbatasan ruang di KR 4
Jawa Timur yang masih menumpang
di gedung Bank Indonesia membuat banyak
dokumen pemeriksaan menumpuk
di kardus-kardus. Tidak saja di dalam
ruangan, bahkan *filing cabinet* berjejer
di teras. Masalah ini akhirnya bisa teratasi
sejak Mei 2022, saat para pegawai di
KR 4 Jawa Timur mulai menempati gedung
barunya.**



**TANPA ADANYA FASILITAS GEDUNG KANTOR YANG
REPRESENTATIF, RASANYA LEMBAGA INI BELUM
DAPAT HADIR MELAYANI MASYARAKAT
SEPENUHNYA....**

**Gedung OJK sebagai Wadah
Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat**

Sebuah lembaga membutuhkan tempat untuk menjalankan kegiatan operasional dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan fungsi OJK, maka Gedung OJK harus dapat mencitrakan sebuah tempat di mana OJK sebagai lembaga yang melakukan pengabdian untuk masyarakat.

Sebagai bangunan tempat bekerja, di Gedung OJK harus tercipta ruang-ruang kerja yang baik, modern, dan terkini. Ruang tersebut didukung oleh sistem yang menciptakan lingkungan buatan agar memberi kenyamanan dan semangat produktivitas dalam tugas mengabdikan kepada masyarakat.

Oleh karena itulah, Dewan Komisiner OJK selalu berusaha untuk dapat melengkapi sarana kerja. Dewan Komisiner OJK juga berupaya agar segera dapat memiliki gedung sendiri baik di Kantor Pusat, Kantor Regional, maupun KOJK di daerah sesuai kemampuan keuangan yang ada.



**Aktivitas pelayanan pegawai OJK
kepada masyarakat di KOJK Lampung.**

Kunjungan kerja Rahmat Waluyanto (Wakil Ketua DK OJK periode 2012-2017) ke KR 2 Jawa Barat, di ruangan besar yang dipakai sebagai ruang kerja sementara staf dan pimpinan pada saat renovasi gedung masih berlangsung.



Bekerja dengan Tata Kelola yang Baik

Sebagai lembaga publik, OJK harus dapat memenuhi kebutuhan dan mampu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Anggaran OJK berasal dari premi industri jasa keuangan yang disetujui DPR. Sehingga, dalam proses pengadaan tanah, perancangan, dan pembangunan Gedung OJK senantiasa memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Terbatasnya anggaran dan waktu pelaksanaan menuntut OJK memilih langkah strategis dan taktis. Salah satunya, pada tahap pembangunan diterapkan cara pelaksanaan yang mengombinasikan sistem konvensional serta sistem perancangan dan pembangunan (*design and build*). Berbeda dengan sistem konvensional yang memisahkan perancang dan pembangun, dalam sistem *design and build*, keduanya dikerjakan pihak yang sama sehingga diharapkan lebih efisien dari sisi biaya dan waktu. Kedua sistem tersebut dilaksanakan sebagai strategi menyikapi masalah waktu pelaksanaan yang ketat terkait dengan penyerapan anggaran. Ketentuan

pengadaan disiapkan dan dibuat selalu *update* seiring dinamika proses pengadaan yang diterapkan dengan prinsip transparan, akuntabel, terbuka, dan *equal treatment*.

Untuk dapat melaksanakan pengadaan dengan baik, sejak awal disiapkan organisasi pengadaan yang andal. Juga direkrut sumber daya manusia (SDM) baru yang memenuhi kualifikasi. Mereka kemudian dilatih melalui proses *learning by doing*. Pengetahuan mereka tentang pengadaan juga terus diperkaya lewat berbagai *focus group discussion* (FGD) yang mengundang pakar di bidang masing-masing.

Sejak awal proses pengadaan dan pelaksanaan pembangunan, OJK selalu melakukan tata kelola yang baik. Proses pelaksanaan juga mengedepankan integritas yang merupakan salah satu budaya kerja OJK. Keterbatasan jumlah anggaran dan waktu pelaksanaan menuntut OJK untuk cepat serta kreatif. Namun, tata kelola yang baik tetap harus dijunjung tinggi sejak pengadaan tanah, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan estimasi proyek.



KOJK Tegal adalah kantor OJK pertama yang tidak lagi menggunakan gedung Bank Indonesia. Tanggal 5 Mei 2014 adalah tanggal gedung ini mulai digunakan setelah disewa sekaligus pertama kali papan nama dengan logo OJK dipasang. Perpaduan warna merah putih memberikan makna bahwa insan OJK memiliki sikap dinamis. Sementara bentuknya menyerupai obor dimaksudkan untuk menerangi pelaku usaha jasa keuangan dan masyarakat. Hingga Mei 2022, KOJK Tegal masih menyewa gedung ini.



Mengawali berdirinya Kantor Regional 9 Kalimantan pada Januari 2014, KR 9 yang saat itu berstatus KOJK Kalsel menggunakan gedung dan peralatan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama dua setengah tahun.



Acara buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar di KOJK Malang yang masih menggunakan rumah dinas Bank Indonesia tahun 2018.



Dalam rangka membantu UMKM di Aceh, Kantor OJK Provinsi Aceh memfasilitasi adanya pojok UMKM untuk memperkenalkan produk UMKM Aceh, khususnya kepada *stakeholders* OJK.



Suasana kegiatan *focus group discussion* yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kepala KR 3 OJK Jawa Tengah dan DIY, Kepala KOJK Yogyakarta, dan para ekonom dari Yogyakarta dan Solo yang diselenggarakan di KOJK Yogyakarta, Januari 2022. Diskusi membahas topik-topik perekonomian yang sedang hangat.

Gagasan yang Dilaksanakan dengan Penuh Dinamika

Gagasan untuk berkarya dalam waktu yang terbatas dengan anggaran yang terbatas kiranya mengharuskan Dewan Komisioner OJK untuk mengarahkan target pembangunan dengan cepat, tepat, dan strategis. Ketersediaan lokasi yang mempunyai nilai representasi sebuah lembaga negara mutlak disandingkan dengan harga yang wajar dan aspek legal tanah yang *clear and clean*. Dengan waktu penyerapan anggaran yang sangat ketat, tentu saja dibutuhkan kiat tersendiri pada eksekusi pengadaan tanah di seluruh Indonesia, mulai dari ibu kota provinsi hingga kota-kota lain.

Langkah awal pengadaan Gedung OJK yang mandiri ini dimulai dari pembelian aset berupa

**...GEDUNG OJK DIRANCANG
SECARA SPESIFIK DENGAN
MENDAPAT SENTUHAN BUDAYA
DAERAH SEBAGAI
PENGHORMATAN PADA
NILAI BUDAYA DAERAH DI MANA
GEDUNG OJK DIBANGUN.**

tanah dan bangunan di Jalan Ir H Juanda, Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016. Bangunan ini kemudian direnovasi menjadi gedung yang merupakan aset gedung pertama milik OJK. Selanjutnya, pada kurun waktu lima tahun kedua, yaitu 2017-2022, dilakukan upaya pemenuhan sarana kerja secara bertahap, baik berupa pembangunan gedung baru maupun renovasi.

Dari kajian OJK dalam pengadaan sarana kerja Gedung OJK, disimpulkan bahwa membeli lebih baik daripada menyewa. Biaya sewa dalam jangka panjang akan berkonsekuensi pada anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan jika OJK memiliki gedung kantor sendiri.

Konsep perancangan Gedung OJK dirumuskan saat merencanakan tiga kantor OJK yang pertama, yaitu di Solo (Jawa Tengah), Yogyakarta (DIY), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). Konsep ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan substantif dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat industri jasa keuangan.

Secara fisik bangunan kantor tersebut harus terbuka dengan akses yang mudah bagi masyarakat (*open to public, close to the people*). Selain itu juga tersedia fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan ma-



Budaya kerja OJK mendorong kerja tim yang solid di antara pimpinan dan karyawannya. Diskusi di KOJK Ambon berlatar Teluk Ambon yang indah.

syarakat dalam rangka pelaksanaan misi OJK. Dari pendekatan kultural, Gedung OJK dirancang secara spesifik dengan mendapat sentuhan budaya daerah sebagai penghormatan pada nilai budaya daerah di mana Gedung OJK dibangun.

Pengadaan Gedung OJK juga kental dengan nuansa kepedulian OJK pada bangunan cagar budaya. Hal ini paling terlihat dengan dipilihnya Istana Gergaji di Jalan Kyai Saleh, Semarang, sebagai Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY.

Sampai dengan pertengahan tahun 2022 telah diselesaikan pembangunan sebelas Gedung OJK yaitu lima Kantor Regional (KR) dan enam KOJK baik melalui pembangunan gedung baru maupun renovasi gedung lama milik OJK yang berasal dari pembelian dan hibah.

Tantangan yang Harus Dijawab

Sepuluh tahun sejak kelahiran OJK, lembaga ini telah berhasil membangun institusi dan budaya kerja. Kehadirannya di masyarakat telah dirasakan secara nyata dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan.

Untuk dapat mendukung terlaksananya tugas OJK secara maksimal pada kurun waktu lima tahun kedua, telah dilaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan. Pembangunan gedung dilaksanakan lengkap dengan sarana kerja dan fasilitas yang dibutuhkan.

Dalam kurun waktu yang relatif pendek, telah diselesaikan sejumlah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung KR dan KOJK. Di samping itu, telah diselesaikan perencanaan Kantor Pusat OJK-Indonesia Financial Center serta Gedung OJK di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua perencanaan itu akan berhadapan dengan kontinuitas program pembangunan dan beberapa aspek budaya kerja.

Pembangunan Gedung OJK selalu mengedepankan kepeloporan dalam pelestarian lingkungan dalam merespons isu perubahan iklim (*climate change*) dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Seiring dengan pelaksanaan Taksonomi Hijau Indonesia, dengan OJK sebagai salah satu pemrakarsanya, Gedung OJK yang baru telah dirancang menggunakan pendekatan *green building*. Pendekatan ini membuat proses pembangunan sejak perencanaan, proses konstruksi, hingga operasi bangunan tersebut dilakukan dengan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan mereduksi biaya operasional.

Menyikapi fenomena bahwa orang dapat bekerja di mana saja, seperti pelaksanaan WFH (*work from home*) di era pandemi, maka Gedung OJK yang baru telah dirancang dengan konsep *flexible space*. Selain itu, disiapkan jaringan teknologi informasi dengan pengadaan rencana *data centre tier 3* agar kebutuhan untuk pelayanan masyarakat dan kegiatan operasional terpenuhi dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, tujuan perencanaan secara holistik dapat dicapai.

Ruang komunal di
KR 9 Kalimantan, Banjarmasin.

Perubahan
Budaya Kerja



Transformasi struktural dan kultural juga dipengaruhi berbagai faktor seperti pandemi Covid-19 yang mempengaruhi mekanisme kerja di KR 3 Jawa Tengah dan DIY.

Perkembangan industri keuangan di dunia dan juga di Indonesia akhir-akhir ini mengarah pada struktur dan karakteristik baru yang bersifat digital, *deepening* (pendalaman), *desegregation* (desegregasi), dan *disruptive* (mengganggu). Untuk merespons karakteristik 4D tersebut perlu dilakukan kebijakan penting, yaitu sistem pengawasan OJK yang berbasis *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), *big data analytics*, dan *natural language processing*.

Semua sistem pengawasan OJK tadi untuk mendukung penguatan koordinasi, pelayanan pengaturan, dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini sesuai *international best practices*, *financial deepening* (pendalaman keuangan) dan pertumbuhan industri jasa keuangan yang perlu diiringi penguatan edukasi masyarakat dan perilaku pasar yang baik. Jika tidak dilakukan, akan terjadi kesenjangan antara inklusi dan literasi, yang berdampak pada akumulasi pengaduan masyarakat.

Integrasi struktur organisasi pengawasan harus ditingkatkan agar pengawasan berjalan secara efektif dan optimal dalam merespons *deepening*

dan *desegregation* sektor jasa keuangan. Tata kelola lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang semula bersifat kaku, mekanistik, berorientasi pada pekerjaan rutin perlu bertransformasi menjadi lebih lincah.

Tantangan utamanya adalah transformasi struktural dan kultural organisasi otoritas pengawasan. Dari otoritas yang semula bersifat sektoral, terpisah antara sektor perbankan dan industri keuangan nonbank, menjadi organisasi yang integratif.

Semua tantangan di atas menuntut OJK menjadi institusi yang lebih lincah sehingga mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, efisiensi, dan efektivitas, serta kapasitas pengawasan. Hal ini untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, profesional, kredibel, dan akuntabel dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen.

DIHARAPKAN BANGUNAN
GEDUNG OJK TIDAK HANYA
MERUPAKAN TEMPAT BEKERJA, TETAPI
JUGA MENJADI LEGACY ATAS
EKSISTENSI LEMBAGA....

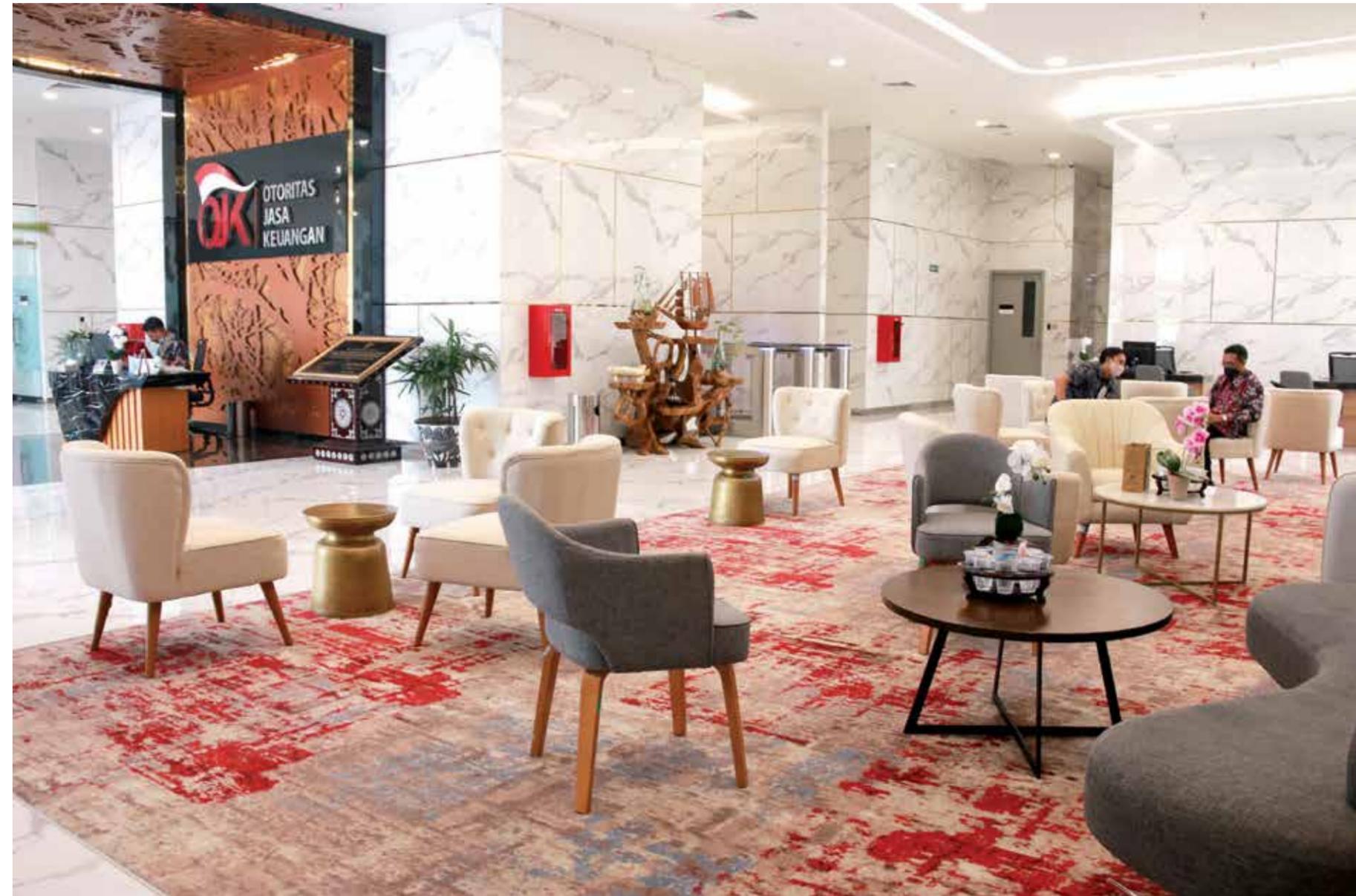
Gedung sebagai Manifestasi Nilai

Bagaimana nilai-nilai OJK diwujudkan dalam rancangan dan pembangunan gedung-gedungnya? Ekspresi nilai, respons dari semua perubahan yang terjadi, diterjemahkan sesuai konteks waktu untuk kemudian diwujudkan dalam konsep bangunan. Diharapkan bangunan Gedung OJK tidak hanya merupakan tempat bekerja, tetapi juga menjadi *legacy* atas eksistensi lembaga di masyarakat. Sebagai sebuah entitas lembaga negara, semestinya Gedung OJK dapat menjadi salah satu penentu arah ataupun *benchmark*. Dapat juga menjadi pendorong terciptanya nilai dari sesuatu yang sedang digalakkan di negeri ini, semisal masalah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, keterbukaan informasi serta peningkatan pelayanan publik.

Karakter Gedung

Disadari bahwa *corporate culture* (budaya perusahaan) tidak akan terbentuk tanpa rasa bangga dan percaya diri untuk sepenuhnya mengabdikan kepada negara melalui lembaga OJK. Oleh karena itu, Gedung OJK di Kantor Pusat, Kantor Regional, ataupun Kantor OJK di daerah adalah simbol kehadiran OJK di mata masyarakat yang dapat mendorong rasa bangga dan percaya diri tadi.

Selain mencerminkan otoritas sebuah lembaga, karakter Gedung OJK perlu juga memwadahi karyawan yang bekerja dan masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Gedung OJK juga perlu membuat orang yang bekerja di dalamnya memiliki semangat dan kenyamanan dalam bekerja sehingga dapat lebih produktif. Selain itu, Gedung OJK juga diharapkan bisa menampilkan semangat pengabdian yang bisa dirasakan oleh masyarakat.



Lobi KOJK NTB

Sustainability

Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan delapan kementerian di Indonesia sudah menyusun Taksonomi Hijau Indonesia. Taksonomi Hijau Indonesia adalah prinsip tentang sistem keuangan Indonesia yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang baik merupakan aset modal perekonomian utama Indonesia. Taksonomi Hijau menegaskan perlunya pengelolaan yang baik atas manajemen aset, sumber daya alam, dan kondisi lingkungan agar dapat terus menyokong perekonomian secara berkelanjutan.



Di lingkungan OJK, prinsip keberlanjutan juga dilakukan secara konsisten pada penyelenggaraan bangunan Gedung OJK. Usaha yang dilakukan tidak hanya ikut melindungi sumber daya alam, tetapi juga dalam rangka efisiensi penggunaan energi.

Perancangan bangunan Gedung OJK dengan tegas menuju bangunan yang ramah lingkungan. Prosesnya mengukur dampak pada lingkungan luar bangunan dan perbaikan lingkungan dalam bangunan. Aspek yang dilakukan antara lain rancangan pasif arsitektur bangunan, metodologi membangun, material bangunan, efisiensi penggunaan energi, dan efisiensi pemanfaatan air.

Ada pemahaman bahwa tujuan menyelenggarakan bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi (*sustainable building*) adalah sebuah proses. Bukan membuat bangunan yang sempurna, melainkan proses penyempurnaan untuk selalu lebih baik.

OJK menginginkan bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Kesadaran ini menjadi faktor penting karena akan fokus pada perancangan yang realistis: penghematan air dan energi. Oleh karena itu, ditetapkan pula bahwa bangunan-bangunan gedung kantor OJK harus disertifikasi sebagai bangunan hijau (*green building*).

Di sisi lain, pengadaan bangunan gedung kantor mendatang tidak hanya berkutat pada masalah teknis, tetapi juga pada persoalan rancangan yang manusiawi (*humane design*), yaitu perhatian khusus terhadap interaksi antara manusia dan lingkungan. Prinsip ini berkaitan dengan adaptasi rancangan terhadap kondisi alam, *urban design* dan perencanaan tapak, serta tingkat kenyamanan dan kesehatan bangunan yang akan dicapai. Prinsip ini juga erat berkaitan dengan hal efisiensi dan konservasi serta keharmonisan hidup semua konstituen ekosistem: elemen non-organik, organisme hidup, dan manusia. Prinsip ini tumbuh dari filosofi untuk mencapai keseimbangan hidup (*work hard-play hard*) bagi seluruh karyawan OJK.

Perancangan ruang dengan memaksimalkan pencahayaan alami dan desain interior ruang santai yang berdampingan dengan ruang kerja di KOJK Solo.

Penerapan **GREEN BUILDING** Gedung Kantor Regional OJK



Konservasi air dengan *water fixture* yang hemat air dan pemanfaatan air bekas dan air hujan untuk siram taman dan *flushing*.



Manajemen air hujan untuk menanggulangi banjir (*zero run off*) dengan kolam tamping dan *rain water tank* untuk digunakan kembali sebagai wujud konservasi air tanah.



Berlokasi di area pusat kegiatan dengan minimal 7 fasilitas umum dalam jarak 1.500 meter yang ditunjang fasilitas untuk pedestrian.



Pemasangan metering listrik pada masing-masing beban (AC, pencahayaan dan peralatan lain) untuk memantau penggunaan energi listrik.



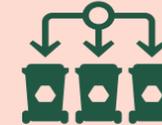
Diharapkan pengguna gedung menggunakan transportasi umum (fasilitas halte) atau sepeda (fasilitas parkir sepeda).



Penggunaan lampu hemat energi yang memenuhi standar penerangan untuk kantor (minimal 15% dari SNI).



View ke luar gedung pada area aktif untuk kesehatan mental pengguna gedung.



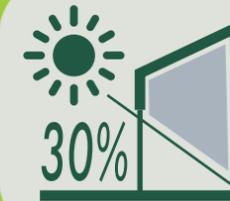
Pengelolaan sampah gedung dengan pemilahan dari sumbernya (sampah organik, anorganik dan B3).

>10% 

dari luas lahan adalah lahan hijau (taman dan *vertical garden*) dan menggunakan tanaman lokal.



Merencanakan selubung bangunan (*passive design*) yang adaptif terhadap kondisi termal (standar nasional OTTV -*over all thermal transfer value*- < 35 watt/meter persegi) sehingga dapat menghemat penggunaan AC.



Pemilihan material kaca yang dapat mengoptimalkan pencahayaan alami, 30% dari luas lantai mendapatkan cahaya alami.



Penggunaan material ramah lingkungan (tidak merusak ozon, produksi pabrik dengan standar manajemen lingkungan ISO 14001).



Memasukkan *fresh air* (udara luar) ke dalam gedung untuk meningkatkan kesehatan dalam ruang.



Gedung Antropark di Jalan Juanda 152, Kota Bandung, dipilih sebagai KR 2 Jawa Barat. Setelah dilakukan pembelian tanah dan gedung, dilanjutkan penataan ulang oleh OJK.



Resepsionis di dalam Istana Gergaji di Semarang yang digunakan OJK sebagai KR 3 Jawa Tengah dan DIY.

Penyediaan Gedung dengan Membeli Lahan dan Bangunan

Proses pengadaan tanah untuk Gedung OJK di daerah sering kali dihadapkan pada masalah nilai strategis lokasi, seperti luasan yang diperlukan, peruntukan harga yang wajar dan aspek legalitas tanah yang tersedia, serta kondisi lahan. Untuk beberapa lokasi, masalah pembelian ini diputuskan dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh ataupun potensi pemanfaatan bangunan di lahan tersebut. Misalnya, apakah membeli lahan untuk membangun gedung baru atau membeli tanah dan bangunan untuk selanjutnya direnovasi menjadi kantor. Contohnya, Kantor Regional 3 Semarang berupa bangunan cagar budaya seluas 6.355 meter persegi di tanah seluas 7.621 meter persegi. Bangunan milik saudagar Oei Tiong Ham ini kemudian direnovasi dengan proses yang baik sesuai kaidah konservasi untuk digunakan sekaligus melestarikan bangunan cagar budaya tersebut.

Membangun dengan Tata Kelola yang Baik

Budaya kerja OJK dan nilai-nilai strategisnya diimplementasikan sepenuhnya dalam proses pembangunan Gedung OJK. Seluruh proses pengadaan dilaksanakan dengan penuh integritas dalam kompetisi yang transparan. Juga dilaksanakan dengan *equal treatment* (perla-

kuan setara) serta akuntabilitas yang jelas dan menggunakan tata cara yang inovatif.

Pemilihan lokasi tanah yang akan dibeli sebagai lokasi gedung kantor dilakukan dengan kriteria yang jelas, yaitu luasan kebutuhan, lokasi di pusat kota yang representatif, serta harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga tanah ditaksir dengan menggunakan *appraisal* yang tersertifikasi dan pembelian dilakukan langsung tanpa calo properti. Pembelian dilakukan dengan transparan dan penuh kehati-hatian agar tercipta pembelian yang *clear and clean* untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Pengadaan *e-procurement* dilakukan tenaga ahli yang punya kompetensi dan pengalaman serta dibekali pengetahuan lewat acara FGD yang dihadiri para praktisi dan akademisi. Pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan internal OJK dengan SIPROJEK yang mengacu pada ketentuan *best practice* yang terkini. Sebelum waktu pelaksanaan, mulai dilakukan pengurusan izin ke pemerintah kota, dalam hal ini dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dalam tahap ini, kantor OJK di daerah sangat berperan dalam terciptanya komunikasi yang intensif sehingga proses pengurusan izin berjalan lancar.



Optimalisasi penggunaan ruang rapat terbuka lantai 1 (*minicafe*) untuk kegiatan *media update* di KR 2 Jawa Barat, Bandung, Januari 2022.

Penerapan Konsep *Flexible Office Space*

Arsitektur tidak pernah berdiri sendiri. Ia hidup bersama dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, sebagaimana halnya interaksi manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, dapat dipahami bagaimana pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada arsitektur bangunan. Salah satu hal utama yang membawa perubahan akibat pandemi adalah kesadaran yang jauh lebih tinggi akan kebersihan dan kesehatan. Persoalan ini memberi pengaruh pada *spatial setting* manusia pada skala kota,

bangunan, bahkan sampai pada ruang kerja. Ada jarak fisik minimum dengan orang lain yang perlu dipenuhi karena dinilai dapat membantu mencegah penularan virus.

Perubahan karena pandemi ini juga memberi kesadaran terhadap hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, yaitu kenyataan bahwa kita dapat bekerja dari rumah (*work from home*). Bahkan pada masa yang dianggap sebagai mulai berakhirnya pandemi, masih dilakukan kombinasi kerja antara bekerja penuh di kantor dan bekerja dari rumah.

KONDISI PANDEMI COVID-19 SANGAT BERPENGARUH PADA ARSITEKTUR BANGUNAN. SALAH SATU HAL UTAMA YANG MEMBAWA PERUBAHAN AKIBAT PANDEMI ADALAH KESADARAN YANG JAUH LEBIH TINGGI AKAN KEBERSIHAN DAN KESEHATAN.

Gabungan antara pengaturan ruang dan cara bekerja tersebut memperkuat kecenderungan rancangan ruang yang terjadi satu dekade belakangan ini, yaitu *flexible office space*. Ruang kantor fleksibel ini adalah sebuah tipe ruang kerja yang dirancang untuk dapat menyediakan beberapa pilihan tempat dan cara bekerja bagi karyawan. Tipe ini tidak seperti ruang kerja kantor konvensional dengan posisi duduk dan meja kerja tetap. Karyawan dalam ruang kantor fleksibel dapat memilih area kerja di kantor yang dianggap paling memenuhi kebutuhannya pada saat tertentu.

Ruang seperti ini juga dirancang demikian rupa sehingga relatif mudah diatur ulang untuk mengakomodasi perubahan tujuan dan cara bekerja. Ruang juga dapat diperbesar dan diperkecil sesuai kebu-

tuhan. Perancangan bangunan-bangunan gedung kantor OJK dilakukan dengan berpedoman pada kebutuhan ruang, tetapi sudah mengawali penyediaan ruang kantor fleksibel dengan pengadaan ruang kerja komunal dan *open plan layout*.

Pada masa dekat mendatang, manakala bekerja dapat dilakukan dari mana saja dalam gedung kantor OJK, faktor budaya kerja (*corporate culture*) akan berperan penting sebagai wadah yang memberi karakter. Faktor efisiensi, perubahan cara bekerja, dan protokol kesehatan memberi kisi-kisi budaya kerja baru yang mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan fungsionalitas. Ini bukan hal yang mudah dan akan menjadi salah satu tantangan ke depan bagi OJK.

**Aktivitas pegawai
di ruang kerja KOJK
Solo.**



Pencapaian di Tahun 2022

Sepuluh tahun sejak kelahirannya, OJK kini telah memiliki enam gedung baru, yaitu di Solo, Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Palembang, dan Ambon, serta lima gedung hasil renovasi, yaitu di Bandung, Semarang, Malang, Purwokerto, dan Makassar.

Di samping itu, telah selesai perencanaan gedung Kantor Pusat di Jakarta dan gedung kantor OJK di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Telah selesai pula rancangan empat gedung yang akan dibangun, yaitu Kantor Regional (KR) Sumatera Utara serta KOJK di Bandar Lampung, Jambi, dan Tasikmalaya. Program pembangunan ini melanjutkan pembangunan beberapa KR dan KOJK yang telah dimulai pada awal tahun 2019.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan Gedung OJK pada satu dasawarsa usia institusi ini kiranya belum selesai. Masih dibutuhkan energi dan semangat serta sumber daya yang cukup untuk membangun fasilitas kerja yang dapat menghadirkan sosok lembaga independen yang mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat pengguna industri jasa keuangan Indonesia.

Pekerja konstruksi proyek gedung KOJK Ambon sedang melakukan pengecoran lantai di malam hari, Maret 2022.



Gedung KR 7 Sumbagsel
di Palembang ketika sedang dibangun.

Dasar-dasar
Perwujudan
Gedung OJK



KONSEP DESAIN GEDUNG OJK

5

Pilar melambangkan Pancasila, sekaligus juga lima nilai strategis OJK yaitu: **integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner.**

9

Pilar di ujung menara melambangkan anggota Dewan Komisioner OJK.

CITRA INTEGRITAS

Tampilan bangunan merepresentasikan citra integritas dan berwibawa. Tampilan ini menunjukkan OJK adalah lembaga regulator yang disegani karena memegang teguh integritasnya. OJK berpedoman kepada 5 sila dalam Pancasila dan dipimpin oleh 9 anggota Dewan Komisioner yang mewakili masing-masing bidang.

KONSEP BANGUNAN

Menggunakan pendekatan komposisi massa simetris dengan hierarki klasik:

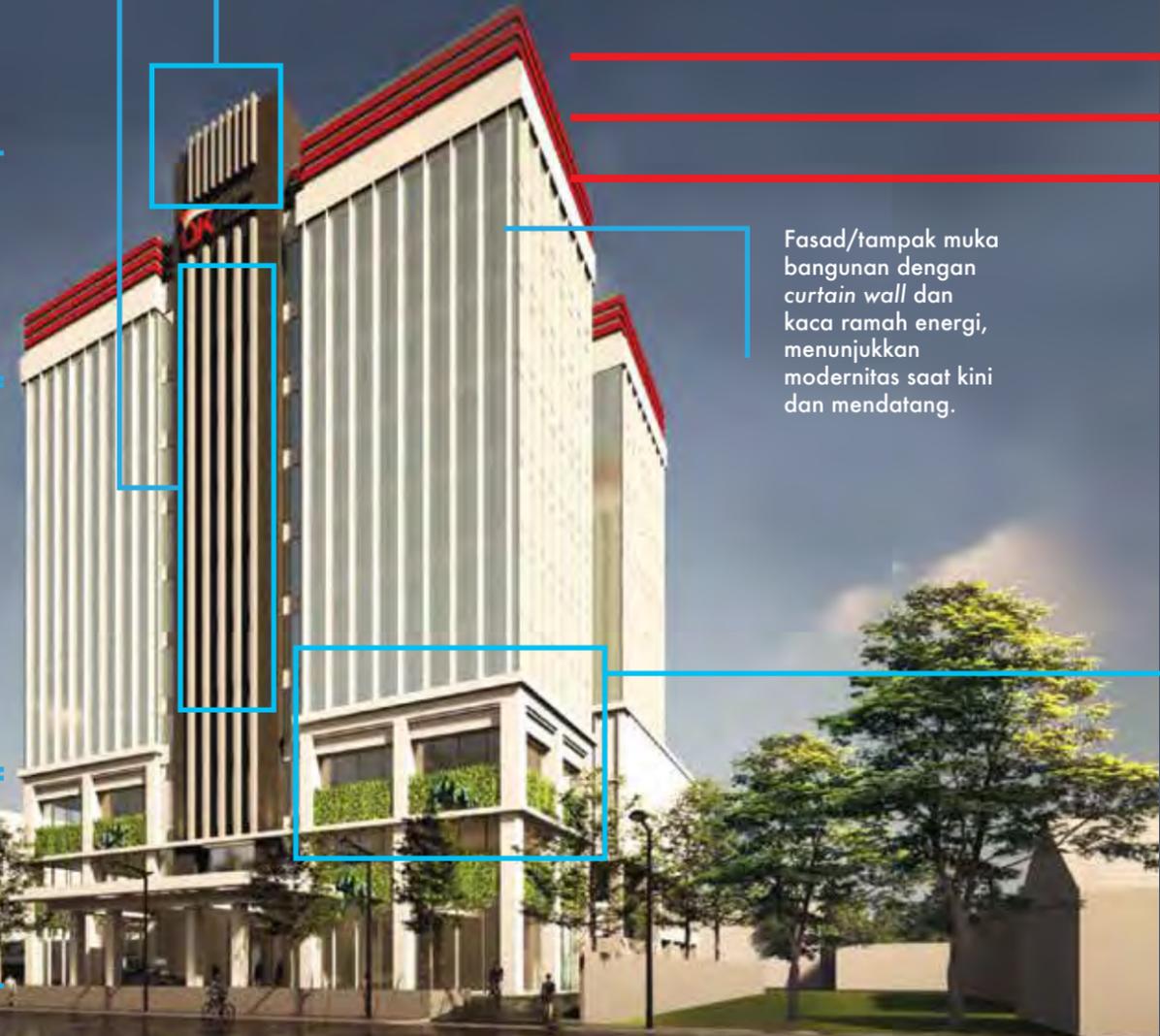
KEPALA – BADAN – KAKI

sebagai komposisi yang universal dan dinilai memberikan kesan stabil dan mantap sesuai dengan peran OJK.

KEPALA

BADAN

KAKI



Fasad/tampak muka bangunan dengan *curtain wall* dan kaca ramah energi, menunjukkan modernitas saat ini dan mendatang.

3

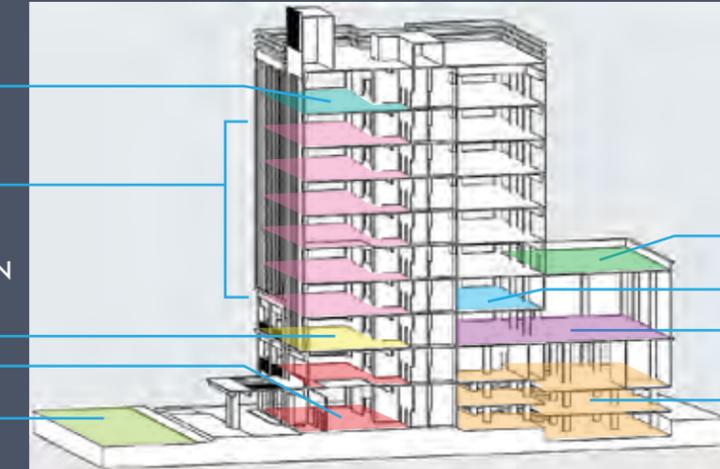
Garis merah (*three red lines*) sebagai identitas Gedung OJK (*corporate building identity*) yaitu: **mengatur, mengawasi, dan melindungi** industri keuangan yang sehat.

Struktur portal dengan detail tertentu dirancang untuk menghormati keberadaan bangunan-bangunan tua bersejarah di sekitarnya.

Contoh pada gambar ini adalah bangunan kantor OJK di Surabaya dengan mengambil langgam yang sama.

POTONGAN PRINSIP

LANTAI ROOFTOP
RUANG KANTOR
AREA LAYANAN PUBLIK & LOBI UTAMA
LOBI & LOBI UTAMA
LAPANGAN UPACARA



OUTDOOR GARDEN
AUDITORIUM
BALLROOM
PARKIR

AKSESIBILITAS



Desain yang melayani penyandang disabilitas dengan penerapan fasilitas *ramp*, toilet untuk pengguna kursi roda, *warning block* untuk tunanetra dan area parkir khusus.

Contoh pada gambar ini adalah detail *ramp* pada kantor OJK di Yogyakarta.

DINDING IDENTITAS



Elemen dinding dengan detail yang disesuaikan dengan kebudayaan lokal di mana bangunan berada.

Contoh pada gambar ini adalah detail Dinding Identitas kantor OJK di Solo.



**KARYA ARSITEKTUR HARUS MEMENUHI
KEANDALAN BANGUNAN, YAITU
KESELAMATAN, KESEHATAN,
KENYAMANAN, DAN KEMUDAHAN.**

Sebuah karya arsitektur yang baik harus indah, kuat, dan berguna (*venustas, firmitas, utilitas*). Ketiga pilar itu kita terima dari era Romawi Kuno, dan ternyata masih berlaku hingga sekarang. Namun sesuai perkembangan zaman, karya arsitektur dewasa ini harus pula memenuhi keandalan bangunan, yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Di samping mengakomodasi kebutuhan dirinya sendiri, sebuah karya arsitektur selayaknya ramah terhadap lingkungan sekitarnya, dari segi *urban design* (rancang kota) maupun dari segi *green building* (bangunan hijau).

Tak lupa, keunikan dan kekhasan unsur budaya setempat dapat dihadirkan secara kreatif untuk menguatkan identitas lokasinya. Di atas semua itu, Gedung OJK yang baru harus tampil berwibawa dengan mengusung makna filosofis dan nilai-nilai yang menjiwai fungsi, tugas, dan wewenangnya di sektor jasa keuangan.

**Gedung KR 4
Jawa Timur di
Surabaya yang
baru digunakan
Mei 2022.**





KOJK Solo.



Tampak depan KOJK
Ambon.

KOJK DIY
di Jalan Jenderal Sudirman
No 32, Yogyakarta.



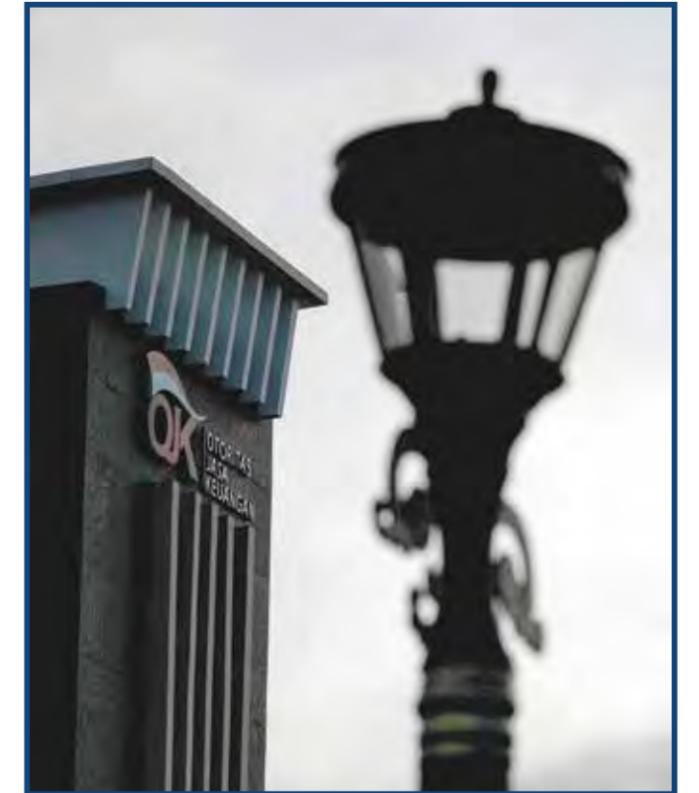
Filosofi dan *Corporate Image*

Moto OJK: mengatur, mengawasi, dan melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Tiga aspek itu kemudian diwujudkan ke dalam tiga garis merah (*three red lines*) yang ditampilkan mengelilingi bagian atas Gedung OJK.

Dalam upaya mencapai visi itu, maka disusunlah misi OJK, yaitu:

- a. mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Visi dan misi di atas dijabarkan lebih lanjut menjadi lima nilai strategis OJK: integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Pada gilirannya, penyempurna *corporate image* Gedung OJK adalah keberadaan sembilan orang anggota Dewan Komisisioner.



Secara arsitektural, lima nilai tersebut ditransformasikan menjadi lima bilah tegak pada Menara Integritas di bagian fasad (tampak muka) Gedung OJK. Lima bilah itu pun sekaligus melambangkan lima sila dari Pancasila, filosofi kita dalam berbangsa dan bernegara. Di puncak Menara Integritas ditempatkan sembilan bilah vertikal yang mewakili kepemimpinan Dewan Komisisioner.



Proses penyusunan rancangan awal bangunan gedung NTB, Solo, Papua, dan Yogyakarta bersama tim logistik dan perancang PT Artefak di Hotel Borobudur. Tim logistik juga dibantu oleh Arya Abieta, Prof Yandi Andri Yatmo, Prof Paramita Atmodiwirjo, dan Pramudyarto. Pada proses inilah untuk pertama kalinya konsep identitas Gedung OJK terbentuk seperti Menara Integritas, *three red lines*, Dinding Identitas Lokal, dan lain-lain.



Tim logistik bersama perancang PT Artefak mengambil keputusan untuk memindahkan kantor perancang Artefak ke ruang rapat DLOG lantai lima di Gedung Sumitro. Mereka bekerja lembur dan dibantu oleh para tenaga ahli, *advisor*, serta konsultan MK PT Mitra Plan.



Kantor OJK Malang.

Keindahan, Kekuatan, Kegunaan, dan Keandalan Bangunan

Keindahan Gedung OJK yang baru dibangun dengan menggunakan langgam arsitektur kontemporer sesuai karakter zamannya dengan menampilkan modernitas melalui penggunaan *glass curtain wall*. Langgam itu dipadukan dengan simbol filosofis Gedung OJK—*three red lines* horizontal, Menara Integritas dengan lima bilah tegak, dan sembilan bilah tegak di bagian puncaknya. Gedung OJK diharapkan akan mengekspresikan keindahan yang sedap dipandang mata, dapat menjadi tengaran (*landmark*) serta memberikan sumbangan positif bagi *townscape* (citra kota) di setiap kota.

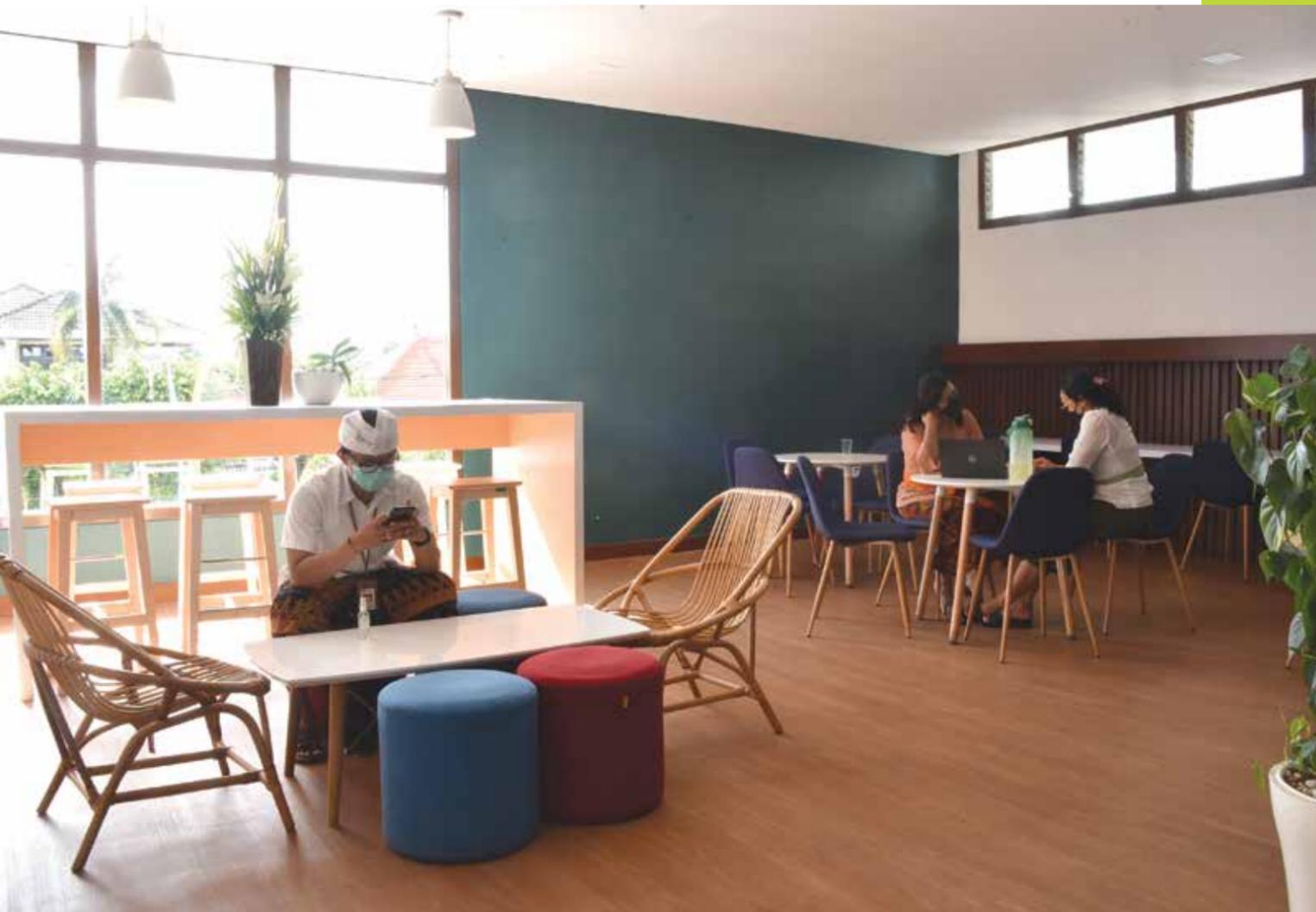
Kekuatan dan kegunaan, keduanya merupakan faktor yang tak kalah pentingnya. Kekuatan struktur—memperhatikan faktor gempa, kondisi tanah, dan lain-lain—untuk menjamin kekokohan bangunan mendapat perhatian yang saksama tanpa toleransi. Keindahan Gedung OJK akan sia-sia jika mudah roboh akibat goyangan gempa yang tak seberapa. Di sisi lain, Gedung OJK diupayakan dapat menampung fungsi layanan publik dan ruang kerja yang memadai bagi penggunaannya.

Aspek keselamatan menuntut jaminan keselamatan jiwa manakala terjadi bencana kebakaran, gempa,

atau banjir. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, Gedung OJK menyediakan sistem proteksinya (pasif dan aktif) sesuai ketentuan.

Belajar dari pandemi Covid-19, aspek kesehatan pada Gedung OJK mendapatkan perhatian khusus, misalnya dengan penyediaan sirkulasi udara yang baik, kemudahan akses dari ruang kerja ke ruang luar, dan pengelolaan kebersihan di setiap pojok bangunan. Segi kenyamanan diwujudkan melalui pengondisian udara yang tepat (di kisaran 22-24 derajat celsius). Penetrasi cahaya matahari ke dalam Gedung OJK secara langsung akan memberikan kenyamanan fisik dan psikologis pada penggunaannya.

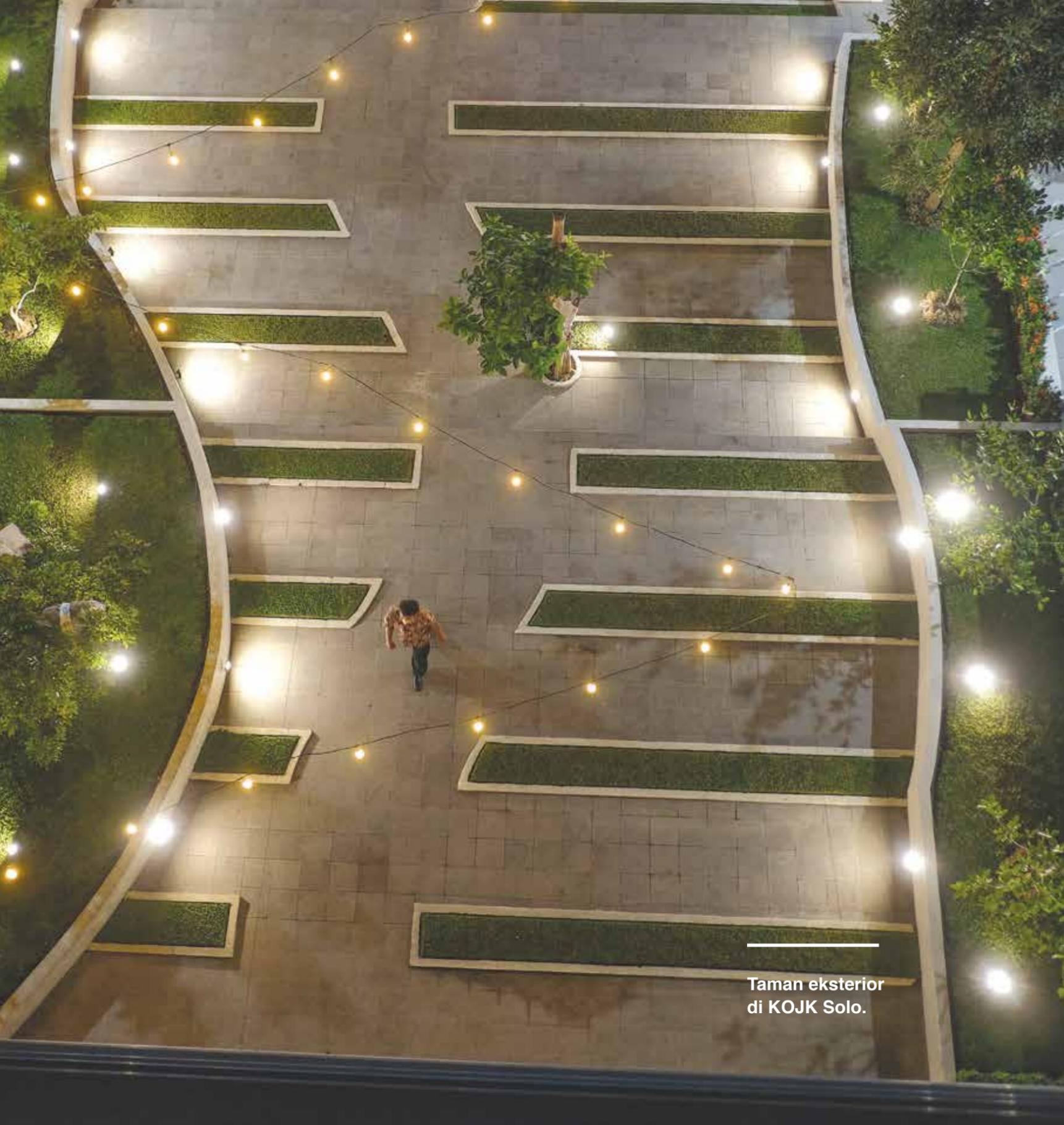
Aspek kemudahan berkenaan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas—termasuk kepentingan ibu hamil, ibu yang menyusui, kaum lansia, dan anak-anak. Fasilitas *ramp* akses, toilet akses bagi pengguna kursi roda, parkir kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas, untuk menyebutkan beberapa contoh, merupakan fasilitas yang disediakan di Gedung OJK.



Interior ruang komunal
di KR 5 Bali dan Nusa
Tenggara.

Ruang duduk di area
terbuka di KOJK DIY
dan area *rooftop* KR 2
Jawa Barat, Bandung.





Taman eksterior
di KOJK Solo.



Green Building dan Ramah Lingkungan

Gedung OJK berpartisipasi aktif mendukung upaya penyelamatan bumi dari krisis perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) dengan menunjukkan komitmennya pada konservasi energi dan air. Salah satu caranya adalah memenuhi ketentuan *green building* untuk *new building* (NB) yang ditetapkan Green Building Council Indonesia (GBCI).

Berdasarkan peringkat-peringkat yang tersedia, maka bangunan baru gedung kantor OJK dirancang untuk

mendapatkan sertifikat Greenship Silver NB bagi Kantor OJK (KOJK), Gold NB bagi Kantor Regional (KR), dan Platinum NB bagi Kantor Pusat (KP).

Di samping menunjukkan komitmen pada aspek *green building*, Gedung OJK juga bersikap ramah pada lingkungan sekitarnya. Penataan lanskap dirancang terbuka (pagar tidak terlalu tinggi) dengan menghadirkan elemen *softscape* (rumput, tanaman semak, pohon) yang memberikan kesejukan. Pengunjung yang datang dengan berjalan kaki mendapat akses masuk khusus. Pengunjung bersepeda pun mendapat fasilitas parkir yang memadai di halaman Gedung OJK.



Program pemilahan dan daur ulang sampah menjadi bernilai ekonomi di KR 5, Denpasar. Hasil daur ulang sampah bisa ditukar menjadi perlindungan asuransi jiwa mikro bagi para tenaga honorer *outsourcing*.



Area terbuka hijau di dalam KOJK Purwokerto.



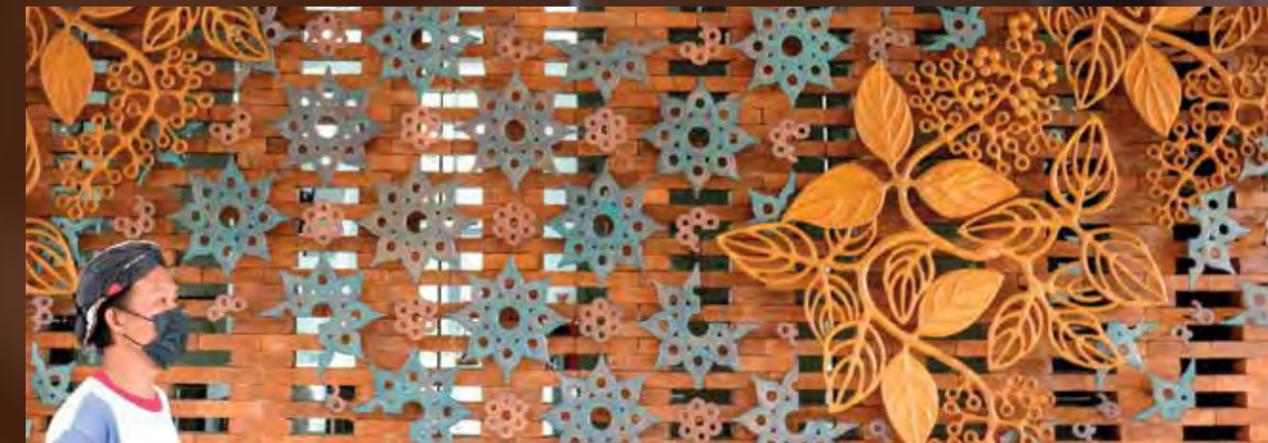
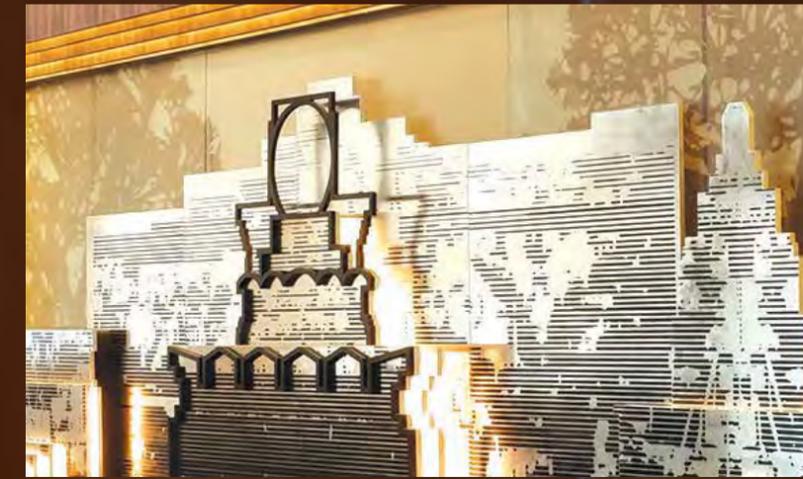
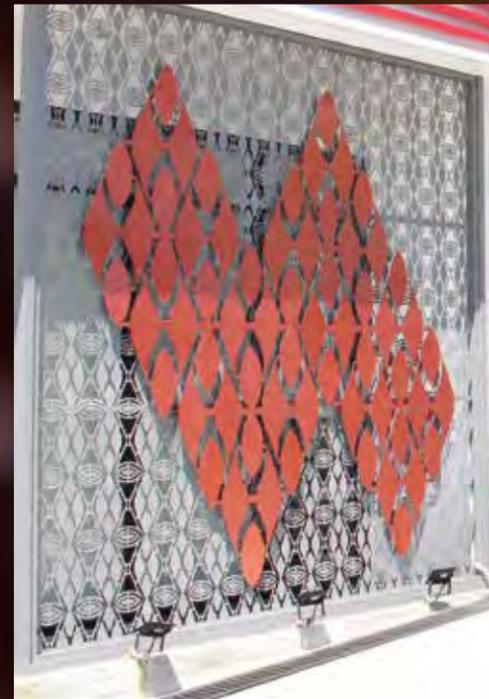
Penataan taman pada eksterior bangunan Istana Gergaji yang digunakan sebagai Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY di Semarang.

Muatan Lokal

Gedung OJK di seantero Indonesia berupaya memanfaatkan kekayaan tradisi dan panorama yang indah. Dalam perwujudan visualnya, kekayaan setempat dapat berbentuk pakaian dan kain tradisional, ukiran seni kriya, candi dan reliefnya, alat transportasi tradisional, flora-fauna setempat yang unik dan langka, atau panorama alam yang tersohor keindahannya. Gedung OJK berupaya mengintegrasikan potensi setempat ke dalam karya arsitektur dan penataan ruang dalam (*interior design*) dengan memperkenalkan Dinding Identitas pada bagian-bagian penting, seperti *porte cochere* (pintu gerbang), lobi utama, lift lobi, dan ruang serbaguna.

Karakter Gedung OJK tidak saja diungkapkan melalui penggunaan simbol-simbol formal, namun juga digali dari kekayaan tradisi setempat. Kombinasi keduanya menciptakan wujud Gedung OJK yang membanggakan, dan pada gilirannya akan mengukuhkan tekad dan semangat insan OJK untuk senantiasa bekerja keras memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang industri keuangan.

Beberapa contoh detail elemen tradisi sebagai bagian dari desain gedung yang disesuaikan dengan lokasinya.



GEDUNG-GEDUNG OJK

di Seluruh Indonesia

1. KOJK Banda Aceh
2. KR 5 Sumbagut, Medan
3. KOJK Riau
4. KOJK Kep Riau, Batam
5. KOJK Sumatera Barat, Padang
6. KOJK Jambi
7. KR 7 Sumbagsel, Palembang
8. KOJK Bengkulu
9. KOJK Lampung

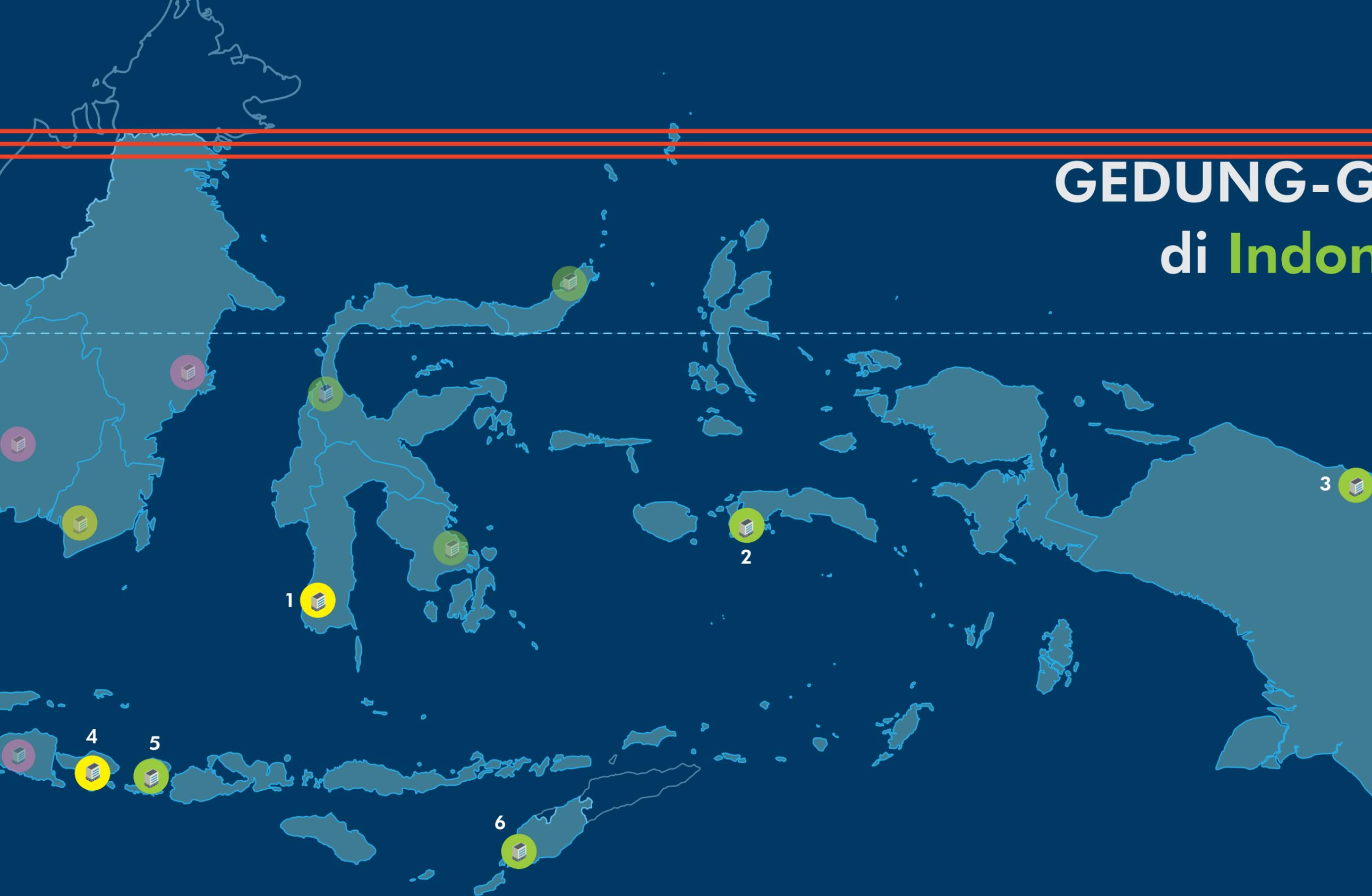
10. KR 1 DKI Jakarta dan Banten
11. KR 2 Jawa Barat, Bandung
12. KOJK Cirebon
13. KOJK Tasikmalaya
14. KOJK Tegal
15. KOJK Purwokerto
16. KR 3 Jawa Tengah dan DIY, Semarang
17. KOJK Solo
18. KOJK DIY
19. KOJK Kediri
20. KR 4 Jawa Timur, Surabaya
21. KOJK Malang
22. KOJK Jember

26. KOJK Kalbar, Pontianak
27. KOJK Kalteng, Palangka Raya
28. KOJK Kaltim, Samarinda
29. KR 9 Kalimantan, Banjarmasin

30. KOJK Sulut, Manado
31. KOJK Sulteng, Palu
32. KR 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua
33. KOJK Sultra, Kendari
34. KOJK Maluku, Ambon
35. KOJK Papua dan Papua Barat, Jayapura

23. KR 5 Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar
24. KOJK NTB, Mataram
25. KOJK NTT, Kupang

GEDUNG-GEDUNG OJK di Indonesia Timur



1. KR 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Makassar
2. KOJK Maluku, Ambon
3. KOJK Papua dan Papua Barat, Jayapura
4. KR 8 Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar
5. KOJK NTB, Mataram
6. KOJK NTT, Kupang

KR 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua

Gedung KR 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3-5, Makassar. Bangunan lima lantai dengan luas total 8.391 meter persegi ini berdiri di atas lahan seluas 4.986 meter persegi. Bangunan ini dahulu adalah Marannu City Hotel yang kemudian menjadi Gedung OJK sejak tahun 2016 melalui sewa dan telah dilakukan pembelian oleh OJK pada Desember 2020.

Pada masa awal setelah pembentukannya, tahun 2013, OJK berkantor di lantai empat gedung Bank Indonesia. Dengan hanya menempati satu lantai yang digunakan untuk seluruh kegiatan kantor OJK, bisa dibayangkan kepadatan ruang kerja yang ada. Hanya tersedia satu ruang rapat yang dipakai bergantian, kubikel ruang kerja berimpitan, dan akses masuk bangunan masih sama dengan akses karyawan Bank Indonesia.

Akan tetapi, dalam keterbatasan ini, fungsi utama OJK tetap harus terselenggara, termasuk fungsi pelayanan masyarakat. Pada saat itu belum tersedia ruang khusus untuk pengaduan nasabah sehingga kegiatan pelayanan pengaduan ini bergabung dengan ruang kerja internal OJK.

Saat ini KR 6 yang terdiri atas lima lantai, baru memanfaatkan dua lantai terbawah saja. Desain untuk tiga lantai di atasnya telah selesai dan menunggu tahap pembangunan. Adapun pekerjaan renovasi telah dilakukan pada November sampai Desember



" Sekarang sudah betul-betul ada kantornya OJK, jadi masyarakat gampang kenal. Sudah ada ruangan khusus untuk pelayanan masyarakat dan kami sediakan sofa untuk yang menunggu. "

Nurdin Subandi, Kepala KR 6 Sulampua

2021, namun masih terbatas antara lain meliputi penataan lahan parkir sisi belakang, perbaikan pagar, perbaikan atap dak lantai 5, pekerjaan gen-set, dan *grounding*.

Walaupun baru menggunakan dua lantai kerja, luas ruangan cukup memadai sehingga tidak terjadi lagi kepadatan. Area pelayanan nasabah juga sudah tidak menyatu lagi dengan ruang kerja internal OJK. Apabila pekerjaan renovasi nanti selesai keseluruhan, tentu ruang pelayanan nasabah akan menjadi lebih baik, ruang kerja lebih nyaman, dan ruang-ruang pendukung berikut fasilitasnya menjadi lengkap mendukung produktivitas bekerja.

Suatu nilai lebih yang dinilai cukup berharga oleh para karyawan adalah lokasi Kantor Regional 6 kini sudah lebih dikenal masyarakat. Ini merupakan eksistensi OJK dan sangat mendukung tugas-tugas OJK, khususnya dalam berhubungan dengan industri jasa keuangan dan masyarakat luas di Makassar, Sulawesi Selatan.



1



2

Desain lobi utama (1), ruang komunal di lantai 3 (2), SLIK gerai pelaku (3), dan redesain tampilan eksterior gedung (4).



3



4

Kepulauan Maluku memiliki riwayat panjang dalam sejarah perdagangan dan pelayaran dunia, terutama karena kekayaan rempah-rempahnya. Dewasa ini terdapat dua provinsi yang membentuk kepulauan itu: Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Kota Ambon yang dikenal dengan keindahan panorama Teluk Ambon dan jajaran bukit-bukitnya menjadi lokasi pusat kegiatan operasional di Maluku.

Sejak tahun 2014, kegiatan operasional menempati bangunan sewa di Jalan Said Perintah Nomor 21-22, Kota Ambon. Sejak itu pula pembangunan industri jasa keuangan serta pengawasannya di Provinsi Maluku, khususnya di Pulau Ambon dan sekitarnya, terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Masyarakat pun mulai merasakan manfaat kehadiran OJK, mulai dari yang berhubungan dengan perizinan, pengaduan konsumen, termasuk pula penyampaian informasi dan layanan edukasi kepada masyarakat.

Untuk memantapkan posisi OJK, sekaligus memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada masyarakat, muncul upaya untuk dapat menempati gedung kantor milik sendiri. Sementara itu, masa sewa gedung akan segera berakhir dan ternyata tidak dapat diperpanjang. Ketidakpastian ini mendapatkan jalan keluarnya karena saat pandemi Covid-19 awal Maret 2020, banyak pemilik properti yang berniat

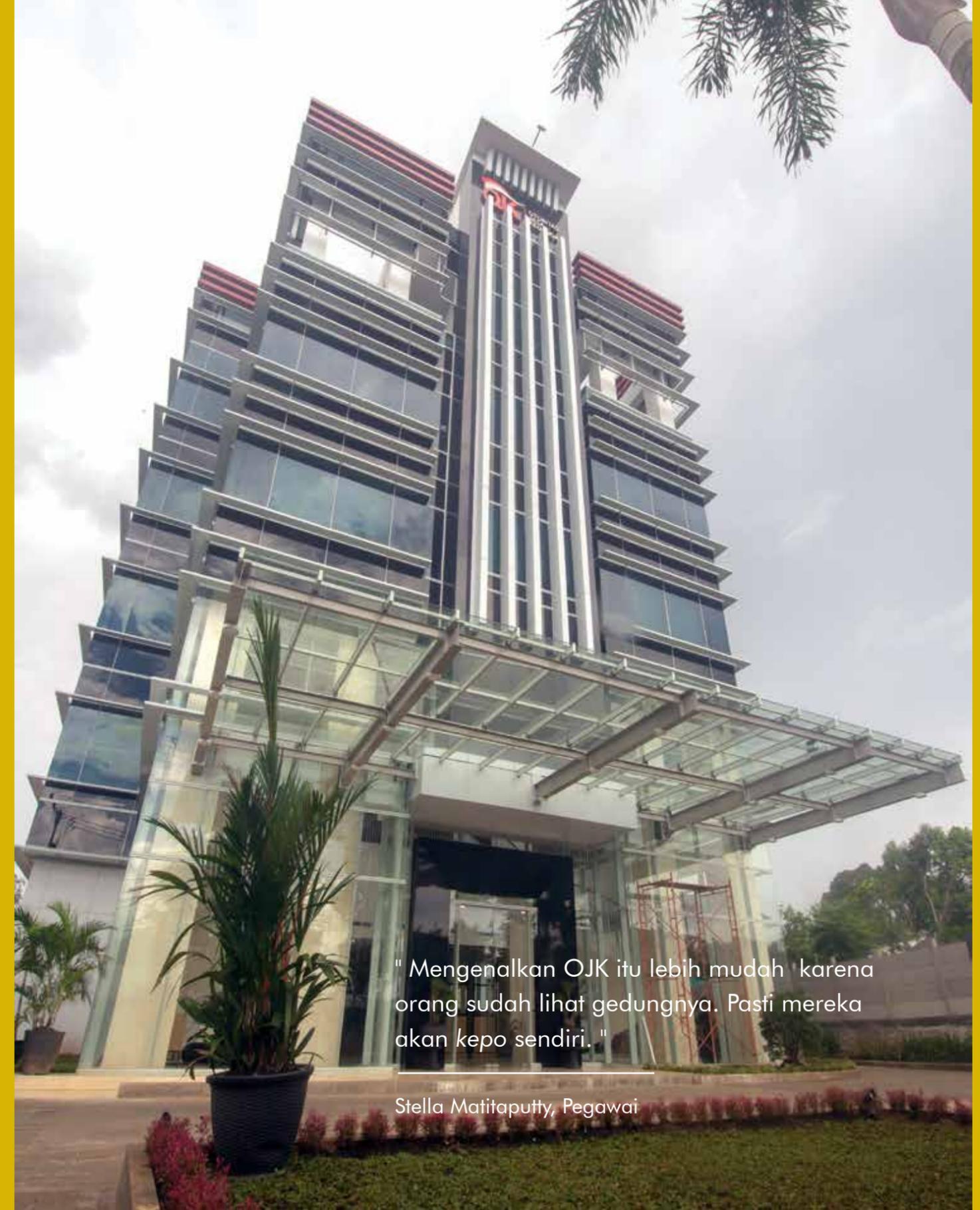
Gedung OJK Maluku sangat strategis sehingga masyarakat mudah dapat pelayanan. Selama ini, OJK berperan penting dalam menyinergikan program pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencapaian kinerja perekonomian dan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Salah satunya, OJK membantu masyarakat lewat program CSR berupa modal usaha.

Irjen (Purn) Murad Ismail
Gubernur Maluku



menjual asetnya. Proses pengadaan beberapa kali gagal karena perbedaan yang terpaut jauh antara harga prakiraan OJK dan harga yang ditawarkan. Namun, akhirnya pilihan jatuh pada sebuah lokasi di Karang Panjang, sebidang tanah milik seorang pengusaha lokal dengan luas 2.200 meter persegi.

Di samping harga tanah yang masuk dalam prakiraan OJK, lokasi tersebut berada di lingkungan perkantoran untuk sejumlah instansi pemerintah. Tambahan lagi, lokasi tanah di Jalan RA Kartini itu cukup tenang suasananya, agak terisolasi dari keramaian kota, sehingga relatif aman dari potensi kerusuhan yang dapat timbul sewaktu-waktu. Walau demikian, ternyata lokasi itu tidak terlalu jauh dari pusat kota—Lapangan Merdeka dan kantor gubernur dapat di-



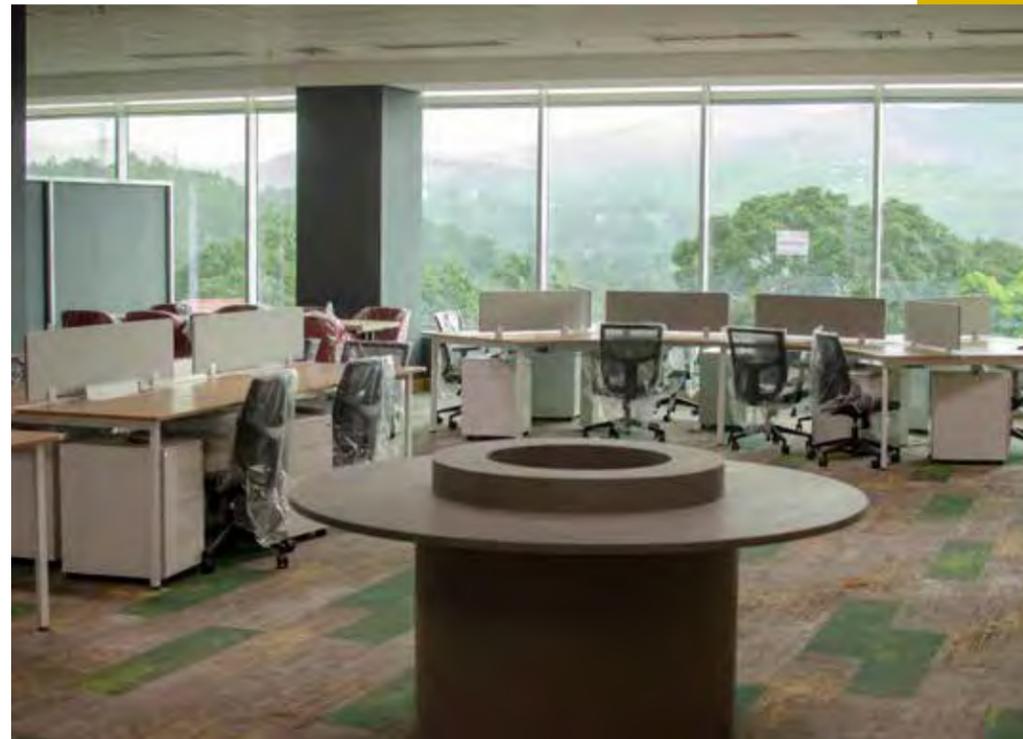
" Mengenalkan OJK itu lebih mudah karena orang sudah lihat gedungnya. Pasti mereka akan kepo sendiri. "

Stella Matitaputty, Pegawai

capai dalam tempo 5-10 menit saja. Yang tak kalah penting, posisi tanah memiliki *panoramic view* 180 derajat ke arah barat, ke arah Teluk Ambon yang sangat indah dan menawan.

Perancangan *basic design* oleh tim ahli bersama tim advisor OJK dimulai sejak pertengahan Desember 2020 dengan memanfaatkan konsep massa bangunan yang telah dikembangkan sebelumnya untuk KOJK Jambi (yang ditunda). Pada April 2021, dokumen rancangan skematik telah diselesaikan dan siap dilelang untuk pengadaan manajemen konstruksi (MK), *quantity surveyor* (QS), dan kontraktor rancang-bangun. Pada saat *kickoff meeting* pada tanggal 1 Oktober 2021, posisi MK dipegang oleh PT Prosys Bangun Persada, posisi QS dipegang oleh PT Fajar Nusa Consultants, sementara kontraktor terintegrasi rancang dan bangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pekerjaan dikontrakkan dengan nilai sekitar Rp 66 miliar, dikerjakan selama 207 hari kalender, dan selesai pada bulan April 2022.

Perizinan Kantor OJK Maluku mendapatkan keuntungan administratif karena proses izin mendirikan bangunan (IMB) berjalan sangat lancar melalui dukungan Pemerintah Kota Ambon yang sangat kooperatif. Bagian yang dikunci oleh IMB terutama berkenaan dengan luasan lantai dasar (*building footprint*). Rancangan gedung KOJK Maluku be-



berapa kali mengalami perbaikan dan penyesuaian untuk mengakomodasi besaran dan bentuk tapak yang berubah-ubah akibat pengukuran yang kurang akurat di tahap awal.

Secara singkat dapat diuraikan bahwa gedung KOJK Maluku terdiri atas lima lantai. Luas lantai keseluruhan mencapai 3.700 meter persegi. Pada lantai satu dan dua disediakan ruang penerima tamu dan ruang layanan publik berupa Gerai Pelaku, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), ruang mediasi, auditorium, perpustakaan digital, klinik, ruang mediasi, ruang *fit & proper test*, dan mushala.

Ruang kerja menempati lantai tiga dan empat, termasuk ruang rapat besar dan kecil serta ruang olah-



raga dan rekreasi. Kantor kepala dan wakil kepala terletak di lantai empat. Pada lantai teratas terdapat ruang serbaguna, lengkap dengan teras semi-terbuka yang menghadap ke arah Teluk Ambon.

Massa bangunan berbentuk empat persegi panjang, dengan pengecilan di bagian muka. Bagian *core* (berisi ruang lift, toilet akses, tangga kebakaran, lift kebakaran/servis) ditempatkan di sisi kiri

(dilihat dari jalan utama) agar ruang kerja secara efektif dapat memanfaatkan pandangan terbaik ke arah Teluk Ambon di sisi barat, barat daya, dan barat laut.

Tampak bangunan yang didominasi oleh *glass curtain wall* menggunakan langgam arsitektur modern kontemporer. Sosok bangunan diperkuat dengan *corporate image* khas OJK berupa *three red lines* di bagian atas sekeliling bangunan dan Menara Integritas di fasad (tampak muka) yang memuat lima bilah tegak di bagian badan dan kaki serta sembilan bilah tegak di bagian kepalanya. Kanopi kaca di *porte cochere* (pintu gerbang) menaungi pengunjung sebelum masuk ke dalam bangunan. Untuk aksesibilitas, tersedia *ramp* bagi pengguna kursi roda.

Di dalam lobi terdapat Tangga Mulia yang melengkung naik ke lantai dua untuk membawa pengunjung ke bagian auditorium. Di lantai satu ditempatkan Dinding Identitas berupa ornamen khas Maluku, yaitu pola dari rempah-rempah. Di bagian lain, dinding lift lobi dihiasi dengan *artwork* berbentuk miniatur kapal kora-kora.

Halaman muka antara *porte cochere* dan pagar depan disiapkan untuk lapangan upacara, dilengkapi tiang bendera setinggi 8 meter. Penataan lanskap diupayakan dapat memberikan kenyamanan dan keteduhan. Di samping area parkir mobil, tersedia pula tempat parkir sepeda dan sepeda motor.



Setelah melalui proses pembangunan yang tidak mudah di masa pandemi Covid-19, gedung Kantor OJK Maluku akhirnya diresmikan Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK pada 13 Mei 2022. Peresmian dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Wakil Gubernur Maluku Barnabas N Orno, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, dan Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo. Secara virtual hadir pula sejumlah anggota Komisi XI DPR dan anggota Dewan Komisioner OJK lainnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Wimboh Santoso menekankan peran kantor OJK di daerah yang sangat strategis dalam mendukung tiga hal prioritas di masa pandemi Covid-19. Ketiga hal itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendu-

kung pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan. Wimboh mengharapkan pula agar kehadiran gedung Kantor OJK Maluku dapat menjadi "rumah bersama" bagi semua komponen industri jasa keuangan, sekaligus menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

Peresmian gedung Kantor OJK Maluku pada tanggal 13 Mei 2022 menandai pula babak baru riwayat OJK di Pulau Ambon dan kawasan sekitarnya. Kehadiran gedung tersebut akan menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat akan kehadiran nyata OJK. Di sisi lain, insan OJK mendapatkan kebanggaan dan dorongan semangat untuk memberikan kinerja lebih baik lagi di masa kini dan yang akan datang.

KOJK Papua dan Papua Barat

Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat secara masif terus dilakukan sejak otonomi khusus tahun 2002. Pemerintah juga menyalurkan dana tambahan infrastruktur (DTI) untuk Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Semua dana yang didistribusikan untuk Papua dan Papua Barat bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Papua.

OJK mulai beroperasi di Papua pada 1 Januari 2014. Untuk sementara, OJK berkantor di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jayapura yang berlokasi di Jalan Sam Ratulangi Nomor 9, Kota Jayapura. Berikutnya, KOJK Papua dan Papua Barat pindah ke Ruko Pasifik Permai, Jayapura.

Papua mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Pertumbuhan kredit dapat digenjut pada empat sektor potensial, seperti pariwisata, pertanian, serta usaha mikro, kecil, menengah, dan ultramikro.

Pemerintah Kota Jayapura juga menyatakan komitmennya membantu kelancaran aktivitas OJK di Papua agar sektor jasa keuangan bisa berkembang. Keberadaan OJK juga diharapkan bisa jadi langkah awal untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan optimal demi mengatasi kemiskinan dan juga kesenjangan. Pemerintah Papua berharap OJK memberikan pelatihan dan edukasi mengenai manfaat, risiko, dan pelayanan di sektor jasa keuangan sambil tetap melindungi konsumen sektor jasa keuangan.



KOJK Papua dan Papua Barat di kompleks Ruko Pasifik Permai, Jayapura.



Rancangan gedung baru.

Pada tahun 2018 telah dilakukan pembelian sebidang tanah seluas 2.500 meter persegi yang berlokasi di Jalan Balaikota, Entrop, Jayapura. Selanjutnya dibuat perencanaan gedung KOJK Papua dan Papua Barat. Perencanaan diselesaikan pada akhir tahun 2019 dan kemudian akan segera dilaksanakan pembangunan gedung kantor OJK.

Namun, dalam proses perencanaan pembangunan, ketika dilakukan penelitian kondisi tanah, diketahui bahwa ternyata lokasi tanah tersebut berada di daerah patahan. Alhasil, proses perencanaan

untuk KOJK Papua dan Papua Barat di lokasi tersebut dihentikan. Langkah ini untuk menghindari risiko yang mungkin timbul saat dilakukan pembangunan ataupun setelah gedung selesai dibangun.

Selanjutnya, pada tahun 2020, OJK mendapat hibah tanah seluas 1.039 meter persegi dan bangunan seluas 698 meter persegi dari Pemerintah Provinsi Papua. Bangunan hibah yang berlokasi di Jalan Prof M Yamin Angkasa No 1A, Distrik Jayapura Utara, tersebut kemudian direnovasi seperlunya sesuai kebutuhan KOJK dalam jangka pendek dengan rancangan yang sederhana.



Hibah tanah dan bangunan untuk Gedung OJK dari Pemprov Papua.

Di Balik Pembelian Gedung KOJK Maluku

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi situasi yang pelik. Pemilik gedung kantor dua lantai yang disewa OJK Maluku tidak ingin memperpanjang masa sewa Kantor OJK Maluku. KOJK Maluku menempati gedung di Jalan Said Perintah Nomor 21-22, Kota Ambon sejak 22 Juli 2018. Luas tanahnya, 1.665 meter persegi dan luas bangunan 1.050 meter persegi. Namun, masa sewa berakhir 21 Juni 2020.

Kesepakatan harga dan jangka waktu sewa yang tidak mudah tercapai. Setekah diskusi panjang, pemilik hanya bersedia memperpanjang sewa hingga Juli 2022, alias dua tahun.

Waktu sewa yang sangat pendek. OJK harus mencari alternatif tanah dan/atau bangunan gedung yang dapat dibangun dan/atau ditata dalam waktu singkat. Alternatif demi alternatif lokasi baik tanah maupun bangunan gedung kantor yang memadai dijajaki mulai dari tahun 2017 sampai dengan November 2020. Nilai penawaran dari para pemilik tanah/bangunan selalu lebih tinggi daripada hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP).

Pilihan akhirnya jatuh pada tanah kosong di Jalan RA Kartini, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tanah dengan luas 2.200 meter persegi

ini punya lokasi yang cukup strategis di dalam kota, berdekatan dengan para pemangku kepentingan. Keuntungan ini diharapkan akan memudahkan Kantor OJK Maluku berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat atau *stakeholders* untuk memaksimalkan fungsi dan pelayanannya.

Proses pengadaan persil (tanah) ini membutuhkan waktu yang ketat, dimulai dari peninjauan dan usulan lokasi, kemudian melibatkan konsultan KJPP untuk melakukan *appraisal* mulai dari 21 Oktober sampai dengan 3 November 2020. Selanjutnya secara simultan juga dilakukan proses *legal audit* guna memastikan legalitas tanah tersebut mulai dari pertengahan Oktober sampai dengan akhir November 2020. Gayung bersambut. Setelah dilakukan negosiasi pada Desember 2020, pemilik tanah sepakat dengan harga yang ditawarkan OJK. Surat perjanjian jual beli ditandatangani pada 11 Desember 2020 dan telah dilakukan pelepasan hak melalui akta notaris.

Proses berikutnya dilalui dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Pembangunan gedung Kantor OJK Maluku pun dimulai dan selesai pada akhir April 2022.

Deg-degan antara Jayapura dan Solo

Di balik upaya menghadirkan eksistensi OJK, kerap ada cerita di balik layar yang menggambarkan betapa giatnya upaya itu dilakukan. Usai mengikuti *groundbreaking* sebidang tanah di Jayapura, tiga insan OJK harus segera terbang. Sarwono, Sukro Tratmono dan Anto Prabowo sore harinya harus mengikuti acara *groundbreaking* lagi di Solo.

Rombongan Ketua Dewan Komisiner OJK beruntung karena pesawat yang akan mereka tumpangi baru saja *boarding*. Tapi nasib lain menimpa Sarwono, Sukro dan Anto. Ngos-ngosan berlari di lorong bandara, di *gate boarding*, mereka melihat pintu pesawat telah ditutup dan pesawat lambat-lambat berjalan mundur. Dalam hitungan menit, pesawat *take off*. "Ternyata tiket kita bertiga belum di *check-in* protokol," kata Anto Prabowo.

Tertinggal pesawat, asa dikerahkan. Pasalnya, Anto yang menjadi Pejabat Pembuat Komit-

men (PPK) harus hadir dalam *groundbreaking* di Solo. Sukro berhasil mendapatkan alternatif penerbangan dari Jayapura ke Yogyakarta via Timika di kelas ekonomi.

Setibanya di Timika, Sukro diizinkan mengurus pindah ke kelas bisnis. Tapi drama belum selesai. Konsumsi di kelas bisnis tidak cukup. Salah satu harus rela tidak dapat jatah konsumsi. Dengan perut kosong, deg-degan masih ada. Takutnya, pesawat *delay*.

Kekhawatiran itu tidak terjadi. Pesawat mendarat di Yogyakarta sekitar pukul 14.30 WIB. Patwal sudah siaga untuk perjalanan darat ke Solo. Tiba di Solo, Anto Prabowo sebagai PPK tampil dipanggung dengan rapi, cerah, dan meyakinkan. Tidak ada sisa-sisa drama perjalanan di wajahnya. Dua yang lain menghapus peluh dan menyunggingkan senyum. *Mission accomplished!*

KR 8 Bali dan Nusa Tenggara

Gedung KR 8 Bali dan Nusa Tenggara adalah gedung eks Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali yang telah direnovasi oleh OJK. Gedung KR 8 mulai beroperasi per 1 Desember 2020, serta diresmikan per tanggal 21 Desember 2020 oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Bali Wayan Koster. Gedung KR 8 OJK ini beralamat di Jalan WR Supratman No 1, Denpasar, yang merupakan lokasi strategis di pusat Kota Denpasar berdekatan dengan gedung Polda Bali, dan berseberangan dengan GOR I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.

Gedung KR 8 terdiri atas tiga lantai dengan luas gedung 4.047 meter persegi dan luas halaman 1.801 meter persegi. Gedung direnovasi dengan tetap mempertahankan arsitektur dari gedung lama sebagai gedung *heritage* di Kota Denpasar. Selain itu gedung ditata dengan mengedepankan konsep *go green*, yaitu memberi ruang pertumbuhan untuk tanaman hijau sebagai penghasil oksigen dengan menanam tanaman-tanaman langka di halaman gedung kantor, memanfaatkan area *rooftop* untuk hidroponik dan tanaman buah dalam pot.

Selanjutnya pengembangan program "Sampahmu Melindungimu". Program ini merupakan program budaya kerja KR 8 Bali dan Nusa Tenggara untuk mengurangi polusi sampah plastik. Sampah dipilah untuk didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi, yaitu dengan ditukar menjadi perlindungan asuransi jiwa mikro bagi para tenaga honorer *outsourcing*.



"Hasil penataan interior gedung eks BI yang saat ini dipakai KR 8 sangat bagus dengan gaya minimalis, dilengkapi dengan tanaman hias *indoor* menambah konsep *go green*."

I Gusti Bagus Edi Saputra, Pegawai



KOJK Nusa Tenggara Barat

Gedung KOJK NTB berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Mataram, dengan luas lahan 1.865 meter persegi. Dengan lahan menghadap ke arah barat daya, gedung Kantor OJK NTB ini cukup menarik bagi masyarakat Mataram karena di depan gedung terbentang ruang terbuka yang dikenal dengan Taman Malomba.

Dengan penampilan fisik empat lantai dilengkapi dua lantai *basement*, gedung KOJK NTB cukup menyita perhatian. Akses bagi pedestrian berada tepat di tengah bangunan, sementara akses kendaraan dirancang di sisi kanan bangunan sehingga tidak berpotongan dengan jalur pedestrian.

Pada pintu masuk halaman terdapat portal sebagai pintu gerbang dengan atap pelat beton sebagai peneduh. Bangunannya sendiri adalah sebuah massa tunggal dengan fasad berciri horizontal, dilengkapi dengan Menara Integritas berwarna gelap dan *three red lines* mengelilingi atap bangunan. Rancangan tapak dan bangunannya bersifat terbuka dan menghadap taman publik Malomba.

Karena bentuk rancangan bangunan bersifat terbuka seperti ini, bangunan KOJK NTB dapat dinikmati oleh masyarakat secara visual dari luar lahan. Terdapat jarak bebas dan ruang terbuka yang memungkinkan hal ini terjadi. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh Gedung OJK di kota lain di Indonesia.



Tata ruang Kota Mataram di sekitar gedung Kantor OJK masih terbuka tanpa bangunan tinggi dan masif, memberi jalan lebar memanfaatkan ventilasi alamiah dan cahaya matahari semaksimal mungkin. Lantai paling atas, bahkan lantai atap, akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk menikmati sepenggal penampilan Kota Mataram secara visual.

Pada sisi depan bangunan terdapat ruang terbuka publik yang dikenal sebagai Taman Malomba. Taman ini disiapkan oleh OJK sebagai kontribusi untuk penyediaan ruang terbuka hijau Kota Mataram. Taman kecil yang indah ini selanjutnya dikelola oleh Pemkot Mataram.

Horizontalism pada fasad bangunan disela oleh Menara Integritas yang kuat kesan vertikalnya. Penanda utama Gedung OJK ini tetap konsisten dengan elemen bangunan berupa lima sirip vertikal di bagian tubuh menara dan sembilan sirip vertikal di bagian kepala menara.

"Kantor OJK NTB merupakan salah satu kantor terbaik di Kota Mataram Provinsi NTB, ramah lingkungan, dilengkapi *smart system building*, terintegrasi dan pelayanan yang baik."

Dadi Irawan, Pegawai TU



Dinding Identitas di gedung ini terdiri atas dua bidang besar di kedua sisi pintu masuk utama. Identitas lokal yang ditampilkan adalah *serat penguinang*. Berasal dari bahasa Sasak, salah satu suku utama di Pulau Lombok, *serat penguinang* berarti tempat menginang (makan sirih). Bentuk motif corak ini menggambarkan kotak-kotak segi empat dan diberikan hiasan motif bintang, tepak dara, dan garis silang-menyilang.

Serat penguinang dapat digunakan oleh pria dan wanita dalam upacara adat. Motif ini memiliki makna manusia harus memiliki sikap kebersamaan dan rukun terhadap sesama. Ornamen *serat penguinang* juga dilengkapi dengan motif anak panah yang melambangkan sifat jujur, seperti anak panah yang jalannya meluncur lurus.



1



3



2



4

Lobi dan ruang tunggu (1), ruang rapat (2), ruang rekreasi/ruang kerja alternatif di lantai 4 (3), dan ruang kerja kepala kantor (4).

KOJK Nusa Tenggara Timur

Gedung KOJK Nusa Tenggara Timur berlokasi di Jalan Tom Pello Nomor 2, Kupang, cukup strategis karena terletak di antara tiga jalan utama, yaitu Jalan Tom Pello, Jalan Moch Hatta, dan Jalan Beringin. Untuk mencapai kantor pemerintahan, institusi jasa keuangan, dan pusat perbelanjaan, hanya dibutuhkan waktu tempuh sekitar 15 menit.

KOJK Nusa Tenggara Timur hadir sejak Desember 2013 dan menempati sebagian ruang di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT. Pada Agustus 2014, OJK NTT berpindah untuk menempati gedung baru yang terletak di Jalan Frans Seda. Gedung berstatus sewa dan ditempati sampai dengan April 2019.

Setelah berakhir masa sewa tersebut, KOJK NTT kembali ke gedung kantor perwakilan Bank Indonesia dengan status gedung pinjam pakai dari Bank Indonesia. Gedung ini dibangun tahun 1975 sehingga dapat dikategorikan sebagai gedung tua. Dan, seperti gedung tua pada umumnya, kantor ini sering mengalami kebocoran di beberapa titik pada saat hujan. Hal ini menjadi salah satu pekerjaan pemeliharaan yang harus dilakukan secara berkala agar fungsi kantor tidak terganggu.



Gedung tiga lantai serta *basement* ini memberikan luas ruangan sekitar 2.000 meter persegi. Ruangan ini cukup memadai untuk mengakomodasi dan menunjang berbagai tugas dan pekerjaan OJK NTT.

Penggunaan lantai satu gedung untuk bagian kantor yang terdiri dari lobi, ruang kerja bagian manajemen internal, ruang pimpinan, dan beberapa ruang rapat internal. Lantai dua untuk bagian kantor yang terdiri dari ruang kerja bagian pengawasan perbankan, IKNB dan PM, dan ruang kerja kepala bagian. Sementara lantai tiga merupakan bagian kantor yang terdiri atas aula pertemuan untuk berbagai kegiatan internal ataupun eksternal dengan kapasitas maksimal 100 orang. Adapun *basement* merupakan bagian kantor yang diperuntukkan sebagai area servis dan parkir kendaraan operasional.

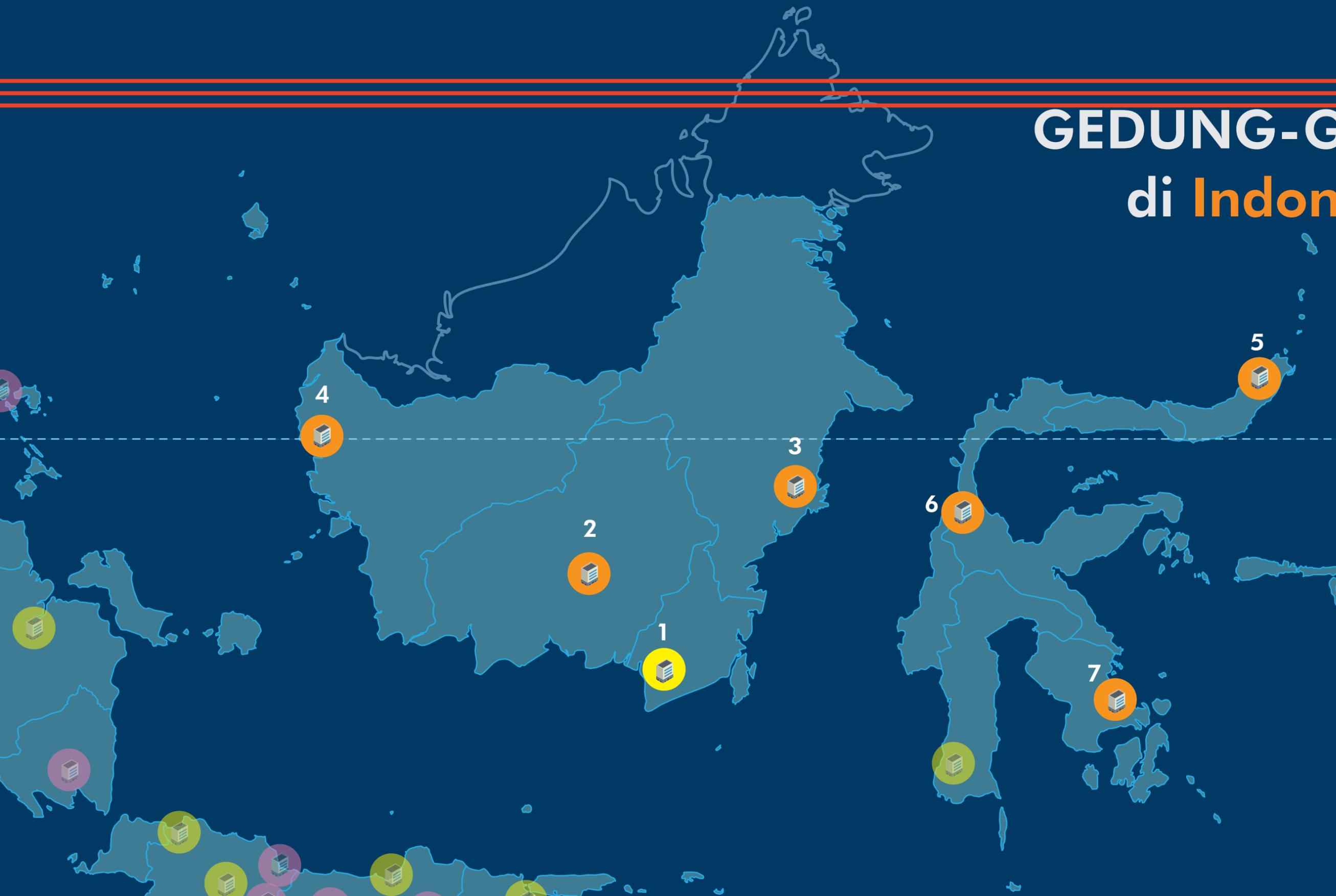


" Karena gedung masih pinjam pakai, kita tidak bisa secara leluasa melakukan perbaikan-perbaikan. "

Dedi Safari Yapudin, Pegawai

Secara umum luas KOJK NTT saat ini cukup memadai. Di sisi depan bangunan terdapat area taman yang cukup luas dan dimanfaatkan untuk beberapa tanaman buah, seperti mangga, dan kelapa. Di sisi belakang kantor, sebagian ruang digunakan untuk kolam budidaya ikan lele. Pemanfaatan ini membantu OJK NTT dalam usaha mencapai keseimbangan karyawan dalam kegiatan bekerja dan bersosialisasi.

GEDUNG-GEDUNG OJK di Indonesia Tengah



1. **KR 9 Kalimantan, Banjarmasin**
2. KOJK Kalteng, Palangka Raya
3. KOJK Kaltim, Samarinda
4. KOJK Kalbar, Pontianak
5. KOJK Sulut, Manado
6. KOJK Sulteng, Palu
7. KOJK Sultra, Kendari

KR 9 Kalimantan

Kalimantan secara utuh dikenal sebagai pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua (Papua Barat, Papua, dan Papua New Guinea). Kalimantan pun memiliki kekayaan alam berupa hutan tropis dan minyak bumi. Patut disayangkan, di masa lalu Kalimantan telah dieksploitasi secara besar-besaran tanpa henti.

Kini, gerak pembangunan yang lebih arif bijaksana menjadi suatu keharusan agar manfaat didapat, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Nilai strategis Kalimantan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menempatkan kantor di Banjarmasin, Palangka Raya, Samarinda, dan Pontianak pada kesempatan pertama awal Januari 2014. Kantor OJK Kalimantan Selatan di Banjarmasin menggunakan fasilitas dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di bawah Kantor Regional 1 (DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan).

Untuk lebih mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK di Kalimantan, pada 17 Februari 2016 dibentuklah Kantor Regional 9 Kalimantan di Banjarmasin yang membawahkan Kantor OJK Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Agar lebih optimal, pada Agustus 2016, Kantor Regional 9 menempati gedung yang disewa sejak



2015 di Jalan Ahmad Yani Km 5,5, Banjarmasin. Fasilitas yang tersedia jauh lebih memadai. Sayangnya, perpanjangan sewa tidak terjadi karena ada temuan kegagalan bangunan pada struktur fondasi akibat *differential settlement* yang berimbas pada kekuatan balok-balok. Beberapa bagian lantai agak miring dan beberapa pintu tidak dapat dibuka lagi.

Per 18 Januari 2021, Kantor Regional 9 Kalimantan pindah dan menyewa bangunan ruko empat lantai dengan enam pintu di Jalan Ahmad Yani Km 8,9, Kabupaten Banjar. Perpindahan hanya berlangsung satu hari karena ancaman banjir di lokasi lama. Setelah pindah, pekerjaan penataan berjalan paralel dengan kegiatan operasional OJK di tengah pandemi Covid-19. Setelah delapan bulan, renovasi dinyatakan selesai.



Kantor Regional 9 Kalimantan hasil renovasi telah memiliki atribut-atribut Gedung OJK, seperti Menara Integritas dengan lima bilah tegak, sembilan bilah tegak di puncaknya serta *three red lines*. Tampak muka diolah asimetris, Menara Integritas diletakkan pada pintu ketiga dari kiri. Fasad yang dihiasi ornamen motif khas Kalimantan menjadi bagian yang terintegrasi dengan jendela kaca dan bidang *aluminium composite panel*. Kanopi di bagian *drop-off* ada di deret pintu kedua sampai pintu keempat.

Secara keseluruhan, identitas sebagai Gedung OJK sangat terasa, tidak terlalu formal tetapi cukup berwibawa, kekinian, cukup representatif dan membanggakan. Kehadiran KR 9 Kalimantan ini memberikan sumbangan yang baik bagi *streetscape* di koridor jalan lintas antarprovinsi yang cukup sibuk dan padat.

Ruang dalam pada bagian bawah diutamakan untuk layanan publik. Ruang kerja pun dirancang dengan memperhatikan kenyamanan pengguna dan dapat menunjang kinerja yang lebih baik dari semua insan OJK. Di samping ruang duduk yang berkelass, terdapat perpustakaan, serta ruang-ruang rapat modern baik yang formal maupun agak santai. KR 9 pun dilengkapi dengan ruang serbaguna untuk pertemuan yang mengundang banyak orang. Sebagai bonus, tersedia pula *rooftop cafe* untuk berdiskusi, serta menikmati panorama di sekitar kantor.

Sementara saat ini masih menempati gedung sewa, Kantor Regional 9 Kalimantan sesungguhnya telah menerima hibah tanah seluas 10.037 meter persegi di Banjarbaru dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada waktunya nanti akan disiapkan perencanaan Gedung OJK yang lebih ideal sesuai kebutuhan. Sebelum hal itu terwujud, semua insan OJK saat ini tetap bekerja menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya memakai moto khas "sasirangan": salam, sapa, riang, dan sopan.

KOJK Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah lahir dari hasrat masyarakat ingin memiliki pemerintahan yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian masyarakat memperjuangkannya lewat organisasi Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah dengan ketua Moris Ismail. Puncaknya, digelar Kongres Rakyat Seluruh Kalimantan Tengah (ketua M Mahar) pada 2-5 Desember 1956 di Banjarmasin. Pemerintah pusat membentuk Kantor Gubernur Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin (9 Januari 1957) yang dipimpin oleh Milono.

Pada 23 Mei 1957 terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah dengan gubernur pertama Tijilik Riwut. Desa Pahandut dipilih sebagai lokasi ibu kota. Milono memberi nama ibu kota itu Palangka Raya. Artinya, tempat yang suci, mulia, dan besar. Pada 17 Juli 1957, Presiden Soekarno meletakkan batu pertama, tanda awal pembangunan Palangka Raya.

Pada 17 Februari 2016 dibentuk Kantor Regional 9 Kalimantan di Banjarmasin yang membawahkan Kantor OJK Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Kegiatan KOJK Kalimantan Tengah bermula dari sebuah ruang kerja yang tidak terlalu besar di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah di Jalan Diponegoro Nomor 11. Ketika volume pekerjaan meningkat dan jumlah pegawai bertambah, pada tahun 2015 kegiatan dipindah ke gedung sewa di

Jalan G Obos Nomor 35. Gedung ini disewa hingga Juli 2020.

Animo pelaku, masyarakat, dan konsumen jasa keuangan di Kalimantan Tengah makin tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih baik sehingga luasan dan fasilitas harus ditingkatkan. Faktor keterbatasan ruang dan fasilitas serta waktu sewa yang hampir habis mendorong KOJK Kalimantan Tengah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah. Mereka minta diberi kesempatan pinjam pakai gedung Kantor UPTD Balai Metrologi Palangka Raya di Jalan RTA Milono Nomor 7. Gedung itu sudah tidak lagi digunakan sejak 2018.

Usaha itu tak sia-sia. KOJK Kalimantan Tengah dipandang sebagai lembaga yang memiliki peran krusial dalam memajukan kehidupan ekonomi di Kalimantan Tengah. KOJK Kalimantan Tengah diperbolehkan pinjam pakai gedung selama lima tahun sejak Desember 2018. Lokasi baru diresmikan pada 6 Juli 2020.

Lokasi kantor tepat berhadapan dengan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan hanya 1 kilometer dari Bundaran Besar Palangka Raya. Bangunan lama satu lantai yang direnovasi beratap pelana dua susun, diperkirakan merupakan bangunan lama generasi pertama dari akhir 1950-an atau awal 1960-an. Bangunan mundur cukup jauh ke belakang sesuai ketentuan penataan kota pada masa lalu. Dengan demikian, halaman yang cukup luas berfungsi sebagai lapangan upacara. Bangunan induk membentuk huruf "L" dengan bagian tambahan



di sisi belakang dan samping. Lanskap ruang luar diolah secara terbatas, terutama dengan *paving block* dan aspal. Beberapa pohon ditanam di halaman muka, diharapkan memberikan suasana teduh saat tumbuh besar.

Fasad baru diolah dengan sikap menjaga keutuhan bangunan lama. Pada bidang dinding ditempatkan dekorasi motif tradisional Kalimantan Tengah. Penataan ruang dalam berisi lobi yang representatif, ruang komunal yang dilengkapi buku-buku bacaan, ruang rapat, dan ruang kerja. Semuanya memiliki nuansa modern relatif terbuka, dan diperindah oleh kombinasi warna-warna alami yang cerah.

Penerangan dirancang agar cahaya buatan dengan lampu LED dapat diseimbangkan dengan penerangan alami. Ruang pertemuan siap dengan fasilitas yang mendukung pekerjaan di era

digital. Pada bangunan tambahan di sisi samping terdapat sebuah kafe, dinamai Kafe Timbangan. Di tempat ini sering berlangsung pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam suasana santai, mengurangi kepenatan, tetapi tetap produktif menghasilkan kinerja yang baik.

Besar harapan saat menjelang masa pinjam pakai habis, KOJK Kalimantan Tengah mendapat kepercayaan untuk menerima hibah sebagai bentuk kepercayaan atas tugas dan fungsi OJK. Hal ini akan menunjang keberlanjutan layanan OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi bagi industri jasa keuangan yang sehat di Kalimantan Tengah. Sementara itu, dengan bangunan pinjam pakai, KOJK Kalimantan Tengah terus berperan tiada henti memajukan kesejahteraan rakyat.

Ketika Tenggarong dibakar tentara Hindia Belanda tahun 1864, berakhirilah kedaulatan Kesultanan Kutai Kartanegara. Asisten Residen Belanda untuk Kalimantan Timur berdiam di Kampung Malantai yang kemudian disebut Palarau. Namun, pada tahun 1875, ia pindah ke seberang Sungai Mahakam, kini menjadi Kota Samarinda. Daerah itu lambat laun dihuni pula oleh pendatang dari suku Bugis, suku Banjar, dan orang-orang Tionghoa. Penemuan sumur minyak pertama di Balikpapan pada 10 Februari 1897 disusul dengan penemuan serupa di Sanga-Sanga, Samboja, dan Muara Badak. Selanjutnya, para investor berbondong-bondong masuk.

Di era kemerdekaan, eksploitasi hutan dan batubara berlangsung tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, yang akhirnya menciptakan kerusakan lingkungan. Dalam konteks agenda *net zero emissions*, pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur memiliki posisi penting bagi keikutsertaan Indonesia dalam Kyoto Protocol dan Glasgow Climate Pact.

Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan salah satu kantornya di Samarinda, Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi di kawasan itu menunjukkan kecenderungan yang sangat positif. Kehadiran KOJK Kalimantan Timur kian penting.

Kantor pertama menggunakan ruang kerja dan satu ruang rapat di lantai tiga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur. Setelah tiga tahun le-

"Sejak akhir 2018, kami senang akhirnya punya kantor sendiri, papan nama OJK bisa terlihat, walau pinjam pakai gedung Pemprov Kaltim."

Erwan Suryono, Kepala Subbag Pengawasan IKNB

bih, pada 8 Agustus 2017, KOJK Kalimantan Timur berhasil mendapatkan tanah dan bangunan pinjam pakai selama lima tahun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jalan HAM Rifaddin, Samarinda. Penataan agar sesuai dengan kebutuhan memerlukan waktu sehingga baru pada September 2018 selesai dan mulai bisa digunakan. Pada hari Kamis, 31 Januari 2019, Kantor OJK Kalimantan Timur diresmikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso disaksikan di antaranya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Muhammad Nur.

Lokasi kantor relatif agak jauh dari pusat kota, sekitar 12 kilometer untuk mencapai Kantor Gubernur Kalimantan Timur, tetapi cukup dekat dengan akses pintu masuk Jalan Tol Samarinda-Balikpapan.

Bangunan terdiri atas dua lantai, dengan lobi di lantai satu, ruang Kepala KOJK Kalimantan Timur, ruang rapat besar, dan ruang-ruang kerja untuk



pegawai. Layanan untuk publik termasuk pengaduan konsumen dan layanan permintaan data SLIK juga ada di lantai satu. Pada saat pandemi Covid-19, diselenggarakan layanan di ruang semiterbuka dan secara *online*. Di lantai dua tersedia fasilitas ruang serbaguna untuk pertemuan dengan para pemangku kepentingan berupa kegiatan sosialisasi, evaluasi kerja, dan lain-lain. Ada pula dua ruang rapat kecil, ruang arsip, ruang laktasi, dan mushala.

Tampak muka dilengkapi dengan logo OJK. Identitas lokal berupa bidang dengan ornamen khas Dayak Kalimantan Timur terdapat di pintu masuk utama dan meja penerima tamu. Ruang rapat sudah dilengkapi dengan fasilitas *video conference*. Dengan halaman yang cukup luas, ruang terbuka

di bagian depan digunakan untuk lapangan upacara. Halaman juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga bersama.

Kehadiran KOJK Kalimantan Timur telah ikut mendorong literasi dan edukasi kepada konsumen jasa keuangan. Dengan semangat *palloh anak mata**, insan OJK Kalimantan Timur bersama masyarakat menatap masa depan pembangunan dengan optimisme tinggi selepas pandemi Covid-19.

**Peribahasa Melayu Kutai, berarti: bekerja berat sampai keringat bercucuran masuk ke mata. Pesan moralnya: ajakan untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, pantang menyerah.*

Potret Kalimantan Barat diwarnai oleh percampuran budaya yang unik dari masyarakat Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Jalur pelayaran dan perdagangan yang lalu lalang di Selat Malaka dan Selat Karimata ikut memengaruhi perkembangan sosial budaya dan ekonomi daerah pesisir di barat Kalimantan ini. Belakangan lahir beberapa kesultanan Melayu, antara lain Kesultanan Kadriah Pontianak, Kesultanan Sambas, Kesultanan Sintang, Kesultanan Matan Tanjung Pura, Kesultanan Mempawah, Kesultanan Ismahayana Landak, Kesultanan Sanggau, Kesultanan Kubu, dan Kesultanan Sekadau. Salah satu yang terkemuka dan termuda adalah Kesultanan Kadriah Pontianak—terbentuk pada tahun 1771.

Provinsi Kalimantan Barat diresmikan pada 1 Januari 1957. Kota Pontianak sebagai ibu kota memiliki karakter kota yang istimewa karena berada di garis khatulistiwa. Pontianak dilalui Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak yang kemudian menyatu menjadi Sungai Kapuas. Salah satu kebanggaan masyarakat Pontianak dalam narasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah rancangan awal Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sultan Hamid II pada tahun 1950.

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah hadir di Pontianak sejak 2014 di bawah pengawasan Kantor Regional 1 DKI Jakarta. Pada tahun 2018, KOJK

Kalimantan Barat berhasil menyewa bangunan tiga lantai di lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan Ahmad Yani Nomor 62. Kantor ini hanya berjarak 300 meter dari kantor gubernur. Kantor itu diresmikan pada hari Selasa, 13 November 2018, oleh Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat. Pemotongan pita dilakukan oleh Inspektur Jenderal Didi Haryono sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan disaksikan oleh Kepala KOJK Kalimantan Barat Moch Riezky F Purmono. Riezky menggantikan Asep Ruswandi.

Turut hadir pada kesempatan itu anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara; Plt Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono; Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Prijono; dan anggota Komisi XI DPR, G Michael Jeno.

Walau bekerja di gedung kantor yang bersifat sementara, sesuai tugas dan wewenangnya, insan KOJK Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat untuk mendorong industri jasa keuangan yang sehat. Dengan mengatur, mengawasi, dan melindungi, OJK dapat memberikan jaminan kenyamanan dan kepastian bagi semua nasabah di sektor jasa keuangan di Kalimantan Barat.



KOJK Sulawesi Utara

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota di Kota Manado. Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2021 berjumlah 2.655.970 jiwa, dengan luas wilayah mencapai 13.892,47 kilometer persegi. Sulawesi Utara memiliki 287 pulau, 59 pulau di antaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi empat kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa/kelurahan.

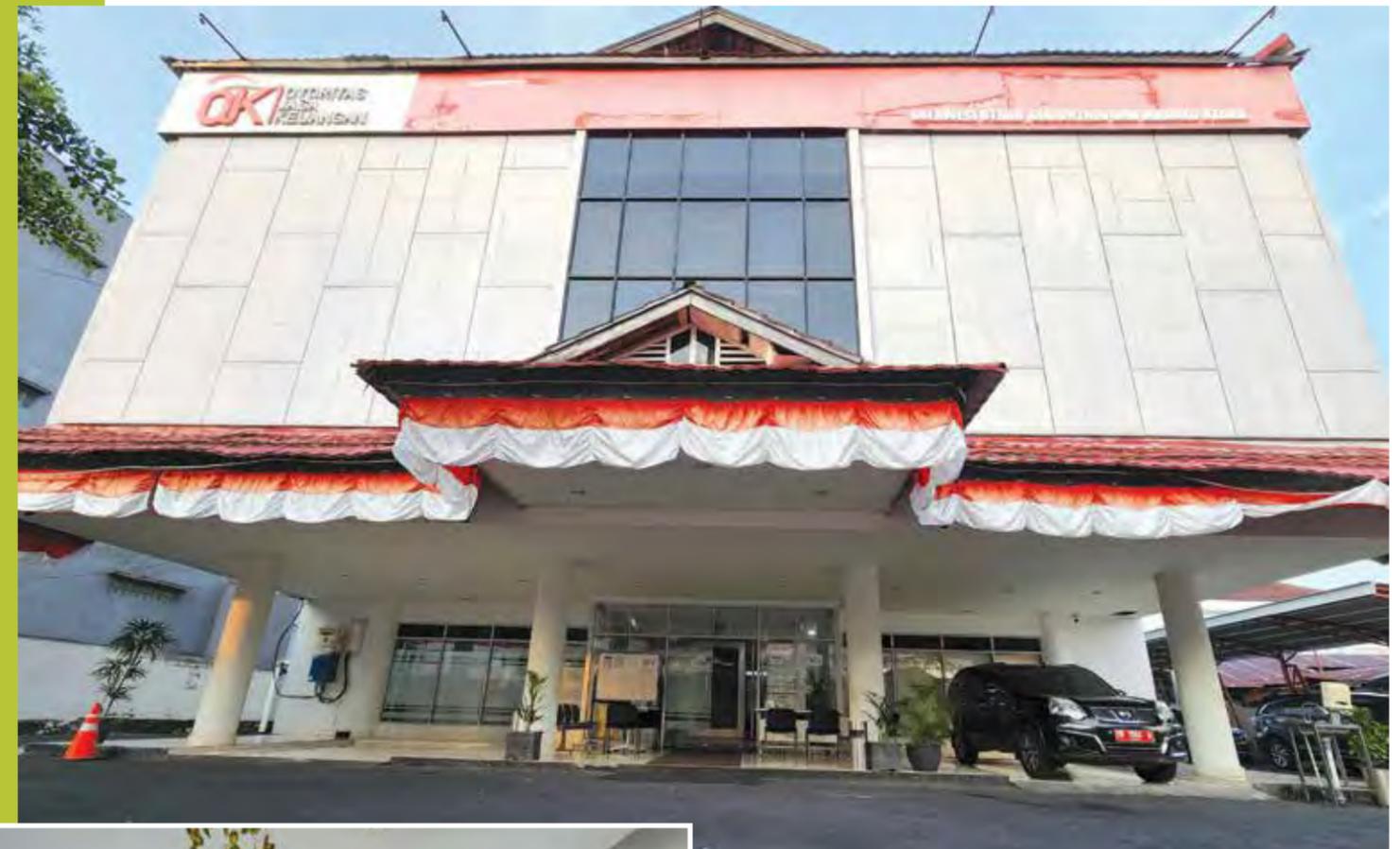
Perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) tumbuh sebesar 4,16 persen pada tahun 2021. Besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 142,60 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 91,79 triliun. Struktur ekonomi Sulut tahun 2021 didominasi oleh lima lapangan usaha, di antaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,08 persen. Kemudian perdagangan besar dan eceran serta perbengkelan sebesar 13,09 persen.

Dari sisi produksi, 16 lapangan usaha tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan ma-

kan-minum sebesar 12,72 persen. Dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 9,23 persen.

Gedung Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Sulawesi Utara di Manado diresmikan oleh Gubernur Sulut dan Ketua Dewan Komisiner OJK pada Kamis, 22 Februari 2018, dengan penandatanganan prasasti peresmian KOJK Sulut. Gedung ini adalah gedung milik Pemerintah Provinsi Sulut yang digunakan sebagai kantor KOJK Sulut. Untuk itulah, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengapresiasi peranan Gubernur Sulut yang telah menyediakan gedung kantor untuk OJK. Fasilitas itu semakin memperkuat komitmen OJK dalam mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

"Kami berterima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey atas dukungannya. Fasilitas ini sangat mendukung upaya kami untuk melindungi kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi," kata Wimboh Santoso.



Karena gedung KOJK Sulut tersebut adalah pinjaman aset Pemprov Sulut, kiranya ke depan perlu dirancang bangunan KOJK Sulut milik sendiri. KOJK tersebut memiliki rancangan yang optimal di lokasi yang utama sesuai dengan rencana tata kota Manado.

Kehadiran KOJK yang representatif diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kerja seluruh jajaran OJK serta akan memberikan rasa bangga karyawan OJK dalam mengabdikan kepada lembaga. Pada gilirannya, tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan serta perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan akan terlaksana semakin baik.

KOJK Sulawesi Tengah



Otoritas Jasa Keuangan secara resmi hadir di Sulawesi Tengah sejak Desember 2013 dengan menempati gedung kantor perwakilan Bank Indonesia. Dengan jumlah pegawai tujuh orang, OJK Sulawesi Tengah berkantor di gedung Bank Indonesia selama 2 tahun 3 bulan, dan kemudian pindah menyewa gedung lain sejak April 2016. Lokasi KOJK Sulteng terletak di Jl Basuki Rahmat No 164, Palu, dan sempat pindah untuk pemeriksaan bangunan saat gempa besar melanda Palu tahun 2018.

Peresmian gedung KOJK Sulawesi Tengah pada 2016 dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner Muliaman D Hadad bersama Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Muliaman menyata-

kan bahwa OJK saat itu baru berusia empat tahun. OJK, sesuai undang-undang, menerima wewenang pengawasan bank yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia dan pengawasan industri keuangan non-bank serta pasar modal yang sebelumnya dipegang oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, kehadiran KOJK Sulawesi Tengah merupakan ekspansi dan mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat.

Selain itu, peresmian KOJK Sulawesi Tengah diharapkan bisa menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas industri keuangan. OJK akan terus membangun kantor-kantornya di daerah untuk mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat dan menaikkan indeks literasi keuangan secara nasional.

KOJK Sulawesi Tenggara

KOJK Sulawesi Tenggara menempati dua bangunan gedung di lokasi yang terpisah. Bangunan pertama yang merupakan gedung utama berada di Jl Abdullah Silondae No 95A, Kendari. Gedung ini diresmikan pada Februari 2016 dan digunakan untuk kegiatan operasional OJK sehari-hari. Fasilitas pelayanan masyarakat seperti SLIK dan pengaduan juga berada di gedung dua lantai ini.

Gedung kedua KOJK berlokasi di Jl Wayong dan juga sudah digunakan oleh OJK sejak 2014 dengan status pinjam pakai. Pada tahun 2021 gedung ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada OJK. Karena sudah ada gedung pertama yang digunakan sebagai kantor, maka gedung kedua ini dimanfaatkan sebagai gedung serbaguna dan diberi nama Gedung Learning Centre KOJK Sultra.



Kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara ke kantor OJK, Agustus 2016.

OJK dan BPHTB

Sebagai lembaga yang masih relatif muda, OJK diberi kewenangan dalam Undang-undang untuk mengatur pencatatan aset yang diperoleh baik lewat pendanaan APBN dan/atau sumber pungutan industri jasa keuangan. Apabila pungutan yang diterima melebihi kebutuhan OJK, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Selain itu, sesuai dengan penetapan BPN (Badan Pertanahan Nasional), sertifikat tanah yang dimiliki OJK statusnya adalah SHP (sertifikat hak pakai). Apabila OJK tidak lagi menggunakan tanah itu, hak kepemilikannya dikembalikan kepada negara. Merujuk dua faktor tersebut, tidak tepat apabila negara memungut pajak BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan) dari OJK.

Yang menarik, berbagai kementerian dan pemerintah daerah berbeda-beda menyikapi kehadiran OJK yang nota bene adalah lembaga independen amanat undang-undang. Perbedaan sikap ini diantaranya terkait pembebasan BPHTB untuk OJK. Dalam berbagai pengurusan tanah yang sudah dibeli, ternyata OJK masih diminta untuk membayar BPHTB. Pasalnya, ada beberapa instansi/lembaga yang meragukan status kelembagaan OJK dalam ketatanegaraan.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengkomunikasikan kelembagaan OJK pada sebanyak mungkin pihak terkait. Beberapa kali Anto Prabowo, Didik

Supriyadi bersama Departemen Hukum dan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Logistik menginisiasi *focus group discussion* (FGD). Berbagai kunjungan dan komunikasi dilakukan ke beberapa lembaga/instansi yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), BPN, Badan Pemeriksa Keuangan dan masing-masing Pemerintah Daerah untuk meyakinkan hal tersebut.

Dari Kemenkumham, OJK mendapat penegasan posisi kelembagaannya yang dibebaskan dari BPHTB. Posisi OJK ini diperoleh melalui berbagai upaya komunikasi serta beberapa diskusi yang melibatkan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum tata negara dan ahli hukum lain dengan supervisi Kemen-

kumham. Kemenkumham lalu mengeluarkan surat yang ditandatangani Dirjen terkait ini.

Namun, pemerintah kota/kabupaten memiliki pandangan berbeda terkait penerapan BPHTB terhadap OJK. Surat dari Kemenkumham tidak cukup. Pemda, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memang dapat menetapkan pengenaan atau pengecualian BPHTB yang kemudian diturunkan ke peraturan pelaksanaannya. Auditor BPK juga kerap menjadikan BPHTB ini pertanyaan ketika OJK memiliki aset baru.

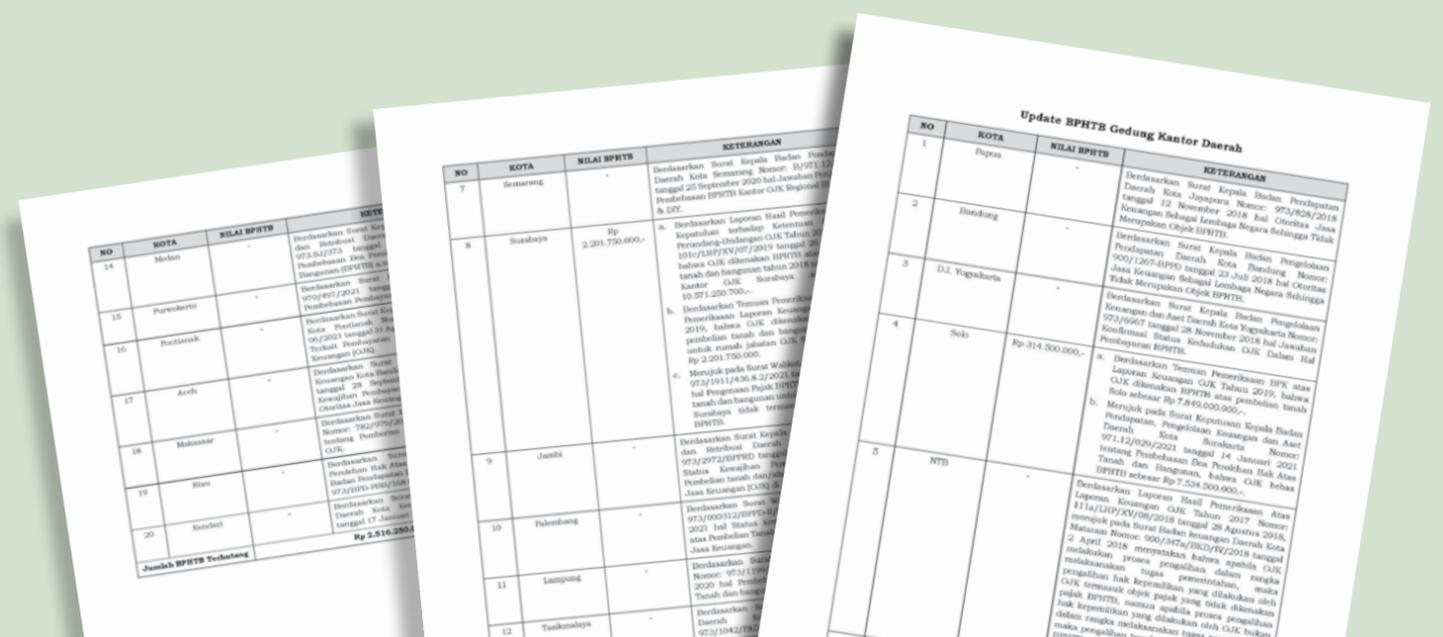
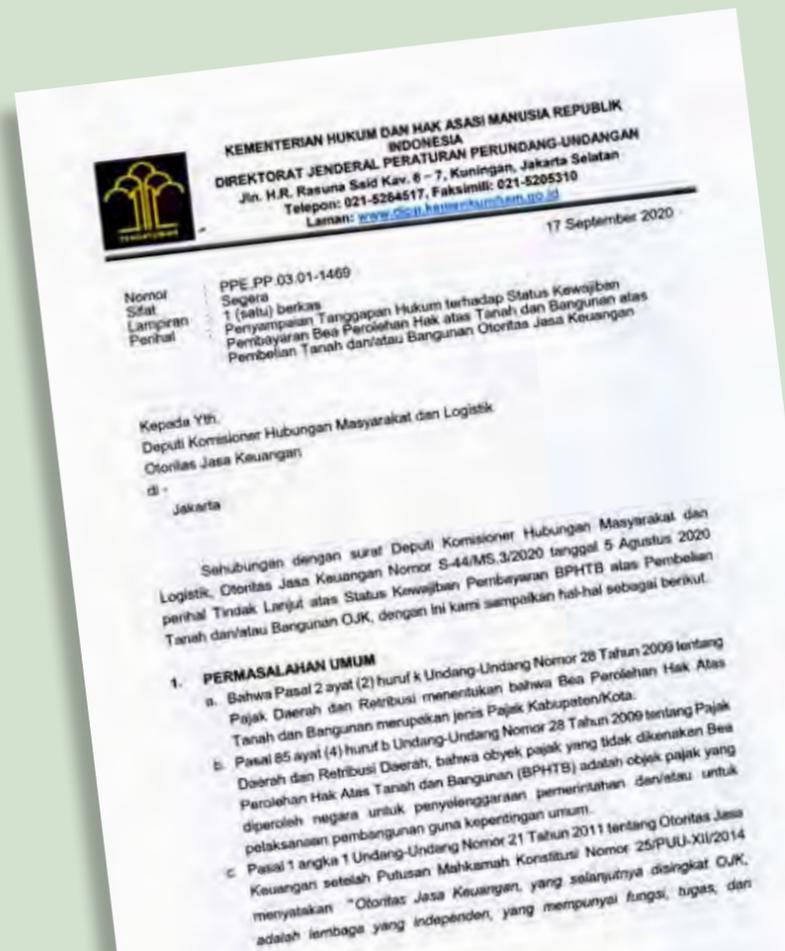
Dalam konteks ini, sangat penting peran Kepala KROJK/KOJK untuk meyakinkan wali kota/bupati/gubernur agar keputusan penerapan BPHTB untuk OJK ini tetap dalam koridor tata kelola yang baik. Beberapa usaha telah dan terus dilakukan OJK untuk meyakinkan pemerintah daerah bahwa OJK adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengaturan dan pengawasan in-

dustri keuangan, anggarannya berasal dari APBN dan atau pungutan.

Tentunya proses ini terus berjalan. BPHTB adalah salah satu dari sekian tantangan yang dihadapi OJK untuk tidak lelah meyakinkan mengenai kelembagaan OJK.

"Harapannya, dengan semakin masyarakat dan pemangku kepentingan merasakan manfaat OJK, semakin OJK dirasakan pentingya."

Anto Prabowo, Deputy Komisioner Humas dan Logistik OJK



GEDUNG-GEDUNG OJK di Indonesia Barat



1. **KR 1 DKI Jakarta dan Banten**
2. **KR 2 Jawa Barat, Bandung**
3. KOJK Cirebon
4. KOJK Tasikmalaya
5. **KR 3 Jawa Tengah dan DIY, Semarang**
6. KOJK Tegal
7. KOJK Purwokerto
8. KOJK DIY
9. KOJK Solo
10. **KR 4 Jawa Timur, Surabaya**
11. KOJK Kediri
12. KOJK Malang
13. KOJK Jember
14. **KR 5 Sumbagut, Medan**
15. KOJK Banda Aceh
16. KOJK Riau
17. KOJK Kep Riau, Batam
18. KOJK Sumatera Barat, Padang
19. **KR 7 Sumbagsel, Palembang**
20. KOJK Jambi
21. KOJK Bengkulu
22. KOJK Lampung



Kota Bandung menempati posisi penting dalam riwayat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih sangat muda. Pada suatu pagi yang cerah di hari Jumat, 10 Maret 2017, gedung Kantor Regional 2 (KR 2) Jawa Barat di Jalan Ir H Juanda 152 diresmikan dengan penuh khidmat oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad. Acara yang istimewa itu dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, serta pimpinan lembaga dan institusi dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk Sarwono sebagai Kepala KR 2 Jawa Barat.

Dalam pidatonya, Muliaman D Hadad menegaskan bahwa KR 2 memiliki peran yang sangat strategis bukan saja dalam tugas stabilitas sektor keuangan, melainkan juga pengembangan perekonomian

daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini mengingat jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah yang terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat saat itu, menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, sekitar 48 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia saat itu 264,7 juta jiwa.

Gedung KR 2 Jawa Barat memiliki keistimewaan tersendiri karena merupakan properti pertama berupa tanah dan bangunan yang dimiliki OJK sejak berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum disewa dan kemudian dibeli oleh OJK, gedung itu dikenal masyarakat "Kota Kembang" dengan nama Cafe Antropark.



Segera setelah penandatanganan berita acara serah terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank-bank dari Bank Indonesia (BI) ke OJK pada 31 Desember 2013, KR 2 Jawa Barat mulai beroperasi. Dengan fasilitas yang belum optimal, pimpinan dan staf KR 2 mulai bekerja keras menjalankan fungsi dan tugasnya, dibantu BI. Mereka berkantor di lantai tiga dan empat gedung Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat di Jalan Braga Nomor 108.

Ketika beban pekerjaan mulai meningkat, keberadaan OJK mulai mengemuka, harapan masyarakat pada kualitas kinerja terus bertambah. Maka, tiba saatnya untuk OJK agar lebih mandiri: salah satu implementasinya adalah bekerja di kantornya sendiri. Setelah dua setengah tahun beralamat di gedung BI, 3 Juni 2016, KR 2 Jawa Barat bersama 80 pegawai bertekad baja, mengambil langkah maju, dengan berkantor di tempat lain. Mereka berpisah dari gedung BI.

Perpisahan itu menandai satu babak baru bagi riwayat OJK. Sebuah gedung di Jalan Ir H Juanda 152 dipilih dari beberapa alternatif lokasi lain. Lokasi itu berada di jalan utama dan memiliki luasan yang memadai untuk kegiatan operasional KR 2. Gedung itu bukanlah bangunan lama dari era kolonial, melainkan bangunan yang relatif baru, didirikan tahun 2007.

Dengan luas tanah 2.930 meter persegi, sementara luas bangunan kira-kira 4.000 meter persegi,

gedung ini terdiri atas bangunan utama tiga lantai dan satu lantai *basement*. Di sisi belakang terdapat dua bangunan penunjang satu lantai, di sisi utara (dibangun 2016) dan selatan (2007). Satu lantai *basement* berada di bawah bangunan utama, digunakan untuk parkir kendaraan dan ruang utilitas. Bangunan disewa dari pemiliknya, Henry Husada, sejak 23 November 2015. Namun, penataan ruang kantor baru dapat dilakukan pada 4 Mei 2016. Penataan dirancang oleh PT Inti Kharisma Wasantara, sementara pengawasan oleh PT Tethagra Adyatama dan konstruksi dilaksanakan oleh PT Andalan Teknologi Mandiri.

Ketika masuk ke kantor yang baru, sebagian besar gedung masih dalam proses renovasi. Di hari pertama bulan puasa, Senin, 6 Juni 2016, seluruh staf OJK KR 2—termasuk pimpinan—mulai bekerja. Tak terkecuali, semua bekerja di dalam satu ruang besar di sisi belakang bangunan induk, yang sudah disiapkan sebagai ruang kerja bersama untuk sementara.

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kondisi darurat yang serba terbatas ternyata tidak menyurutkan semangat insan KR 2 untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, dengan harapan sangat tinggi akan datangnya kondisi yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan publik digelar bersambungan tanpa henti di tahun 2016. Untuk menyebut beberapa contoh saja, kegiatan Financial Executive Gathering 2016, Investival 2016, Simpanan Pelajar, pembentukan Tim Percepatan

Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Internalisasi Budaya Kerja OJK Way 2016, dan OJK Mengajar.

Jerih payah yang telah dicurahkan ternyata tidak sia-sia. KR 2 Jawa Barat merebut gelar juara Budaya Kerja OJK 2016 tingkat nasional. Pencapaian itu menunjukkan beban kerja KR 2 yang terus bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada gilirannya, dorongan untuk menguatkan kehadiran KR 2 semakin besar. Akselerasi perubahan yang terus meningkat memicu pemikiran untuk mengubah status gedung KR 2 dari sewa menjadi milik.

Rupanya gayung bersambut. Keinginan OJK mendapat tanggapan positif dari pemilik Antropark yang tidak berkeberatan menjual propertinya. Tanggal 23 Desember 2016 menjadi hari Jumat yang bersejarah dalam riwayat OJK. Properti berupa tanah dan



bangunan di Jalan Ir H Juanda 152 resmi menjadi aset—tanah dan bangunan—pertama milik OJK.

Berangkat dari perubahan yang terjadi dalam waktu singkat, penataan ulang gedung KR 2 Jawa Barat segera dilanjutkan hingga tuntas agar kebutuhan operasional terpenuhi sesuai standar minimum. Sosisok bangunan *existing* tetap dipertahankan. Tampak muka yang menghadap ke Jalan Ir H Juanda diolah sedemikian rupa agar mencerminkan fungsi sebuah gedung kantor, dan diperkuat dengan identitas berupa lambang OJK.

Melalui perombakan di sana-sini, gedung yang semula restoran dan galeri itu telah berhasil ditransformasikan menjadi Gedung OJK yang cukup representatif. Bagian ruang dalam dirombak seoptimal mungkin tanpa mengganggu struktur ut-

ma bangunan. Suasana ruang dalam diupayakan memenuhi atmosfer keterbukaan tanpa kehilangan kewibawaannya. Ruang layanan publik berada di bagian muka dan samping selatan pada bangunan utama. Ruang kerja yang tersedia tidak terlalu besar, tetapi diupayakan tetap mampu menampung kebutuhan hingga 5-10 tahun yang akan datang.

Setelah renovasi dapat diselesaikan, pada 10 Maret 2017, gedung KR 2 Jawa Barat secara resmi dibuka penggunaannya. Dan, sejak itu OJK dapat lebih maksimal mengatur, mengawasi, dan melindungi untuk industri keuangan yang sehat, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

" Kami fokus mengembangkan gedung KR 2 Jawa Barat sebagai 'kantor hijau' sebagai dukungan kami terhadap pelestarian lingkungan. *Rooftop* lantai 1 disulap jadi *minicafe outdoor* dan taman hidroponik untuk kerja, santai, dan tidak lupa, menikmati panen tanaman hidroponik yang segar dan sehat. "

Indarto Budiwitono, Kepala KR 2 Jawa Barat

Kota Cirebon dikenal sebagai "Kota Udang", tersohor karena merupakan kota pelabuhan dan pusat perdagangan yang sangat penting di pantai utara Jawa. Riwayat Cirebon tidak luput dari sejarah Kerajaan Sunda pada akhir abad XIV hingga akhirnya berdiri sendiri di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati pada awal abad XVI. Belakangan, Cirebon berada di bawah kekuasaan Mataram. Tak lama setelah perlawanan Trunojoyo, Cirebon terpisah menjadi tiga pemerintahan. Pada masa penjajahan Inggris (1811-1816), Raffles membubarkan kekuasaan para sultan di Cirebon. Sejak sebelum kemerdekaan, Karesidenan Cirebon masuk di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Saat ini wilayah pelayanan Kantor OJK Cirebon mencakup Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka (seluas Karesidenan Cirebon di masa lalu, minus Kabupaten Ciamis yang kini dikelola oleh Kantor OJK Tasikmalaya).

Kantor OJK mulai hadir di Cirebon pada akhir tahun 2014 dan pertama kali ber Kantor di gedung Bank Indonesia lantai tiga di Jalan Yos Sudar-



so Nomor 5-7. Selanjutnya, OJK memutuskan untuk pindah dan menyewa bangunan di Jalan dr Cipto Mangunkusumo Nomor 133. Peresmian pemakaiannya oleh anggota Dewan Komisiner OJK, Heru Kristiyana, pada 26 Januari 2018. Dalam peresmian itu, Heru menekankan posisi penting OJK dalam menyelenggarakan edukasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat. Di sisi lain, pengawasan industri jasa keuangan akan semakin baik, pertumbuhan ekonomi dapat melaju cepat sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya di Cirebon dan sekitarnya.

KOJK Cirebon terletak sekitar 3 kilometer dari pusat kota, berseberangan dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, dan menempati bangunan empat lantai. Setelah dilakukan penataan, di samping ruang kerja dan lobi yang me-

madai, tersedia pula ruang rapat dan aula yang sering dimanfaatkan untuk berbagai pertemuan. Para pengampu kepentingan di bidang industri jasa keuangan, termasuk masyarakat dan kalangan pers, kerap hadir untuk berdiskusi di sini.

Keterbatasan fasilitas tidak menghalangi gerak operasional OJK yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan. Namun, sesuai dengan peran KOJK di Cirebon yang terus meningkat, di masa yang akan datang pada waktu yang tepat, KOJK Cirebon akan mengembangkan fasilitas yang lebih mandiri dan lebih lengkap sesuai tuntutan perkembangan ekonomi di Cirebon dan sekitarnya.



Gedung Kantor OJK Tasikmalaya saat ini merupakan gedung sewa yang berdiri di lahan seluas 1.400 meter persegi. Gedung tersebut telah disewa sejak tahun 2015 dan digunakan sejak Februari 2016 dan diresmikan Maret 2016 oleh Ketua Dewan Komisioner Muliaman D Hadad. Sewa gedung ini akan berakhir pada tahun 2024.

Lokasi gedung KOJK Tasikmalaya beralamat di Jalan HZ Mustofa No 339 A, Tasikmalaya. Posisinya berada di tengah kota berdekatan dengan beberapa instansi pemerintah, kantor industri jasa

keuangan, universitas, hotel, maupun rumah sakit. Adapun beberapa instansi yang berdekatan lokasinya tersebut adalah Universitas Siliwangi, Universitas Perjuangan, RS Tasikmalaya Medika Citratama, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapenda Kota Tasikmalaya, serta beberapa bank dan hotel.

Menjelang berakhirnya masa sewa gedung yang sekarang digunakan, saat ini sedang direncanakan pembangunan kantor baru pada lahan yang telah dibeli oleh OJK. Lokasi lahan tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gedung kantor saat ini dengan



Rancangan gedung KOJK Tasikmalaya.



luas 3.348 meter persegi. Gedung kantor baru ini dirancang dengan luas dan fasilitas sesuai konsep Gedung OJK. Susunan *layout* ruangnya merepresentasikan marwah OJK, di mana ruang pelayanan publik diletakkan di lantai bawah, sedangkan ruang kerja internal di lantai-lantai atas. Penerimaan publik dalam jumlah cukup besar dapat dilakukan di ruang auditorium atau aula serbaguna, sementara untuk keseimbangan kerja pegawai disiapkan ruang rekreasi dan olahraga.

" Gedung masih sewa jadi serba terbatas, dari pantry sampai ruang arsip. Di samping ada *showroom* motor yang warna logonya sama dengan OJK. Jadi masyarakat tahunya kantor motor itu. "

Darwati, Pramubakti

KR 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Sebagai kota perdagangan, Semarang marak dengan orang-orang yang sukses sebagai pedagang, di antaranya Ho Yam Lo. Ia mempunyai rumah besar yang terdiri dari beberapa bangunan dengan halaman sangat luas. Arsitektur bangunannya bergaya Indies, mengambil langgam klasik Eropa dengan komposisi massa simetris dan kolom-kolom Corinthian. Berdasarkan catatan, rumah besar yang berada di Jalan Gergaji (sekarang Jalan Kyai Saleh No 12-14) ini dibangun pada tahun 1876.



Tampak depan rumah Oei Tiong Ham di tahun 1900. Order Corinthian di kolom teras depan tergolong pilihan unik, karena tidak lazim dipakai di rumah-rumah Hindia Belanda. Pilihan itu diambil kemungkinan untuk menaikkan status Oei Tiong Ham di antara orang-orang Eropa.

Pada akhir abad XIX Ho Yam Lo bangkrut sehingga seluruh harta dan bangunannya dilelang. Pedagang lain bernama Oei Tjie Sin, ayah Oei Tiong Ham, memenangi lelang itu tahun 1883. Kompleks rumah besar ini dulu sering disebut Istana Gergaji atau juga Istana Balekambang karena semula banyak kolam air dan di atasnya dibangun balai/gazebo. Pernah pula disebut Kebon Rojo karena banyak binatang dipelihara sehingga seperti kebun binatang.

Oei Tiong Ham sendiri mulai menempati Istana Gergaji pada 1888. Bermula dari perusahaan dagang Kian Gwan di Semarang yang didirikan sang ayah, Oei Tiong Ham mengembangkannya menjadi Oei Tiong Ham Concern dengan bisnis utama ekspor

gula pasir dan pemegang hak monopoli perdagangan candu dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 1964 bangunan ini dinasionalisasi dan pada 2003 dibeli oleh seorang pengusaha dan dilakukan pemugaran bangunan. Rumah yang menjadi salah satu *landmark* Kota Semarang ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dalam SK Wali Kota Semarang No 646/50/1992.



Buat saya pribadi, yang paling berkesan itu OJK KR Jateng. Awalnya, gedung milik pengusaha gula tingkat dunia itu hanya dipakai kalau ada acara. Makanya ketika OJK berharap bisa jadi kantornya, saya ikut membantu dalam proses negosiasi. Alhamdulillah harga masih dalam plafon OJK. Saya senang karena akhirnya sejarahnya tidak hilang. Dan gedung itu jadi milik negara.

Saat ini banyak sekali investasi yang harus ditelaah lebih lanjut. Masyarakat di satu sisi bingung, akan tetapi di sisi lain mudah tergour. Padahal, ada banyak pertanyaan misalnya terkait investasi kripto atau ketakutan akan investasi bodong. Tawaran investasi selalu

terlihat seakan sangat mudah. Padahal bisa saja investasi itu bodong. Saya berharap, kantor-kantor OJK jadi pusat pelayanan untuk memberi informasi atau tempat bertanya masyarakat tentang berbagai investasi yang baru.

Kami senang sekali, beberapa kali hadir di peresmian OJK di Semarang dan Purwokerto. Heritage-heritage jadi tetap terpelihara. Oleh karena itu, saya kasih stempel baru: "OJK Peduli Heritage".

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah





OJK KR 3 Jawa Tengah mulai menempati bangunan ini pada tahun 2016, kemudian memiliki sebagai aset pada tahun 2018. Pada tahun 2020 OJK melakukan pemugaran pada bagian teras depan bangunan karena usia bangunan tua yang mengakibatkan penurunan kekuatan struktur bangunan. Tidak dapat dimungkiri karena sejarah yang panjang, ada ingatan kolektif (*collective memory*) atas bangunan eks rumah Oei Tiong Ham pada masyarakat tentang Kota Semarang dan seorang penduduknya yang pernah sangat terkemuka di dunia internasional. Oleh karena itu tindakan apa pun yang diambil terhadap bangunan tua ini akan menjadi

perhatian masyarakat. Saat ini pekerjaan pemugaran sudah selesai dengan baik dan bangunan berfungsi kembali seutuhnya sebagai kantor OJK.

" Saya bangga menempati gedung ini, orang selalu minta difoto di berbagai sudut. "

Aman Santosa, Kepala KR 3 Jawa Tengah dan DIY



Ketua DK OJK dan para pejabat pemda menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Semarang, 16 November 2018.

Kantor OJK Tegal secara resmi hadir pada 31 Desember 2013 sesuai dengan tugas OJK melakukan pengawasan sektor perbankan. Demikian pula, seperti halnya beberapa kantor OJK di kota-kota lain, pada awalnya operasional OJK dilakukan dari lantai dua gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tegal. Wilayah kerjanya meliputi tujuh dati II, yaitu Kab Brebes, Kota Tegal, Kab Tegal, Kab Pemalang, Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, dan Kab Batang.

Terhitung sejak 5 Mei 2014 KOJK Tegal secara resmi pindah dan menempati kantor baru beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Tegal, dengan status sewa selama 2 tahun. Berdasarkan catatan yang ada, KOJK Tegal merupakan KOJK di daerah yang pertama berhasil melakukan pemisahan operasional dari gedung Bank Indonesia. Status sewa ini secara berkala diperpanjang sampai tahun 2024.

Kendala yang dirasakan selama operasional KOJK Tegal ini antara lain adalah kebutuhan ruang kerja yang lebih memadai dan susunan *layout* ruang yang memisahkan ruang publik dengan ruang kerja internal. Warna merah pada fasad bangunan dan *signage* besar di halaman depan menjadi penanda yang baik sehingga kehadiran OJK di Kota Tegal mudah dikenali masyarakat.



" Lokasi kantor berada di lingkungan strategis jantung kota di mana dikelilingi oleh lembaga jasa keuangan di Kota Tegal. "

Rakhmawati Saetami, Pegawai TU





Wilayah pelayanan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Purwokerto mencakup Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara, wilayah yang sama dengan Karesidenan Banyumas di masa lalu. Riwayat Banyumas bertalian erat dengan sejarah Kerajaan Pakuan Pajajaran, Majapahit Akhir, Pajang, dan Mataram Islam. Di masa Perang Diponegoro (1825-1830), daerah Banyumas menjadi medan pertempuran yang hebat dengan korban jiwa yang tak sedikit jumlahnya.

Setelah perang berakhir, Karesidenan Banyumas dilepaskan dari pengaruh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta sehingga langsung di bawah Hindia Belanda di Batavia. Di tahun 1936, Kabupaten Purwokerto dihapus dan disatukan dengan Kabupaten Banyumas, tetapi ibu kota kabupaten ditempatkan di Purwokerto.

Didukung oleh tanah yang subur, hasil bumi yang berlimpah, dan digarap oleh masyarakat yang tangguh dan ulet, daerah Banyumas menjadi titik sentral pembangunan di pelintasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tanah Banyumas pun telah melahirkan tokoh bangsa, seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Sutoyo, dr R Angka (salah seorang pendiri Budi Utomo), RA Wiriaatmaja (pendiri cikal bakal Bank Rakyat Indonesia), dan RM Margono Djojohadikoesoemo (pemimpin pertama Bank Nasional Indonesia).

Tak lama setelah berdiri, OJK pun hadir di Purwokerto. Mula-mula menempati bangunan milik kantor perwakilan Bank Indonesia sejak akhir 2013. Dengan fasilitas yang terbatas, Kantor OJK di Purwokerto mulai bekerja dan melayani masyarakat di bidang industri jasa keuangan dan literasi keuangan lewat edukasi. Agar lebih mandiri, pada 7 April 2015, KOJK Purwokerto secara resmi pindah ke sebuah bangunan sewa eks *showroom* mobil di Jalan Gerilya Nomor 365.

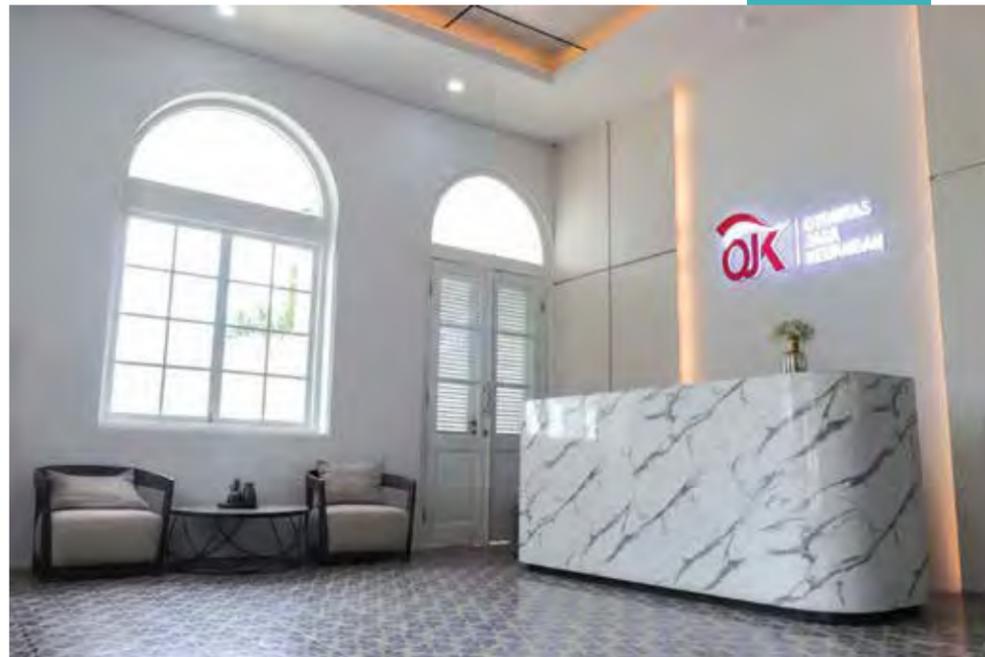
Bangunan sewa ini sekitar 3 kilometer dari pusat kota, berada di jalan yang padat lalu lintasnya oleh kendaraan berat dan bus antarkota. Kantor ini bersebelahan dengan toko mebel dan bengkel dan tidak jauh dari bundaran terminal lama Purwokerto. Bukanlah lokasi yang ideal, tetapi kegiatan operasional terus berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah itu, keinginan memiliki tanah dan bangunan sendiri mulai dirintis. Beberapa calon lokasi datang silih berganti, tetapi harga belum sesuai ketentuan OJK. Di akhir Desember 2020, ada satu lokasi milik seorang pengusaha Purwokerto di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 46 yang memberikan harapan. Lokasinya sangat representatif, hanya 800 meter dari pusat kota dan sekitar 1,2 kilometer menuju stasiun kereta api. Menilik gayanya, rumah dengan luas tanah 3.365 meter persegi itu diperkirakan berdiri pada dekade pertama abad XX. Negosiasi awal tidak membuahkan hasil karena masalah harga. Pihak OJK bertahan dengan taksirannya seraya me-

yakinkan pemilik, Ali Basalamah, bahwa tanah dan bangunan diperuntukkan bagi kepentingan negara, bukan untuk dijualbelikan demi keuntungan komersial. Di saat-saat terakhir, pemilik dapat memahami niat baik dan peran strategis kehadiran OJK di Purwokerto sehingga bersedia menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan dengan harga di bawah yang ditawarkannya.

Kantor OJK Purwokerto yang baru diresmikan pada 8 Maret 2022 oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso. Acara peresmian dihadiri pula oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Dewan Komisiner Nurhaida, Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto Rony Hartawan, Wakil Bupati Banyuwangi Sadewo Tri Lastiono, Kepala KOJK Purwokerto Riwin Mihardi, Ali Basalamah, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Bangunan seluas 1.100 meter persegi, termasuk bangunan tambahan, disiapkan penataannya dalam 100 hari kalender, yaitu September-Desember 2021. Bangunan tua dipertahankan seoptimal mungkin dengan beberapa tambahan nonstruktural di ruang dalam untuk mengakomodasi kebutuhan fungsional ruang KOJK Purwokerto. Beberapa jendela lama masih dipertahankan, menguatkan atmosfer lama dalam konteks kekinian yang memberikan suasana tersendiri baik bagi yang bekerja maupun yang datang.



Lantai ubin lama dengan corak yang indah berhasil dirawat dan menjadi ikon istimewa di ruang dalam. Percampuran antara elemen lama dan baru diupayakan serasi dan selaras, menunjukkan kepedulian OJK pada pelestarian cagar budaya. Tak mengherankan, pada saat peresmian, Ganjar Pranowo memberi predikat tambahan kepada OJK: "OJK Peduli Heritage".

Kantor OJK Purwokerto yang baru tampil anggun, berwibawa, terbuka, dan siap melayani; didukung oleh ruang kerja, ruang rapat, ruang komunal, aula, mushala, termasuk ruang untuk edukasi dan literasi masyarakat di bidang industri jasa keuangan. Untuk kenyamanan pengunjung, halaman kantor ditata dengan lanskap yang baik dan menyejukkan serta dilengkapi dengan ruang parkir yang memadai.



Melalui kantor baru, OJK di Purwokerto akan memberikan layanan yang lebih baik, kualitas kerja lebih prima, dan mampu menjadi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang lalu.





Kantor OJK Yogyakarta berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, sekitar 150 meter arah timur dari Tugu Pal Putih, yang merupakan bangunan cagar budaya, simbol sekaligus *landmark* Kota Yogyakarta. Tugu yang terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo ini bernilai simbolis sebagai salah satu titik yang terhubung dengan garis imajiner yang menghubungkan Pantai Parangtritis di selatan, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi.

Upaya Departemen Logistik (DLOG) OJK untuk membangun gedung kantor dengan lokasi strategis membuahkan hasil. Pada tahun 2018, DLOG membeli tanah yang semula adalah gedung kantor milik Indosat. Sebelumnya, KOJK Yogyakarta mengontrak sebuah bangunan kantor dua lantai milik swasta di kawasan Timoho, Yogyakarta.

Akhir tahun 2018 perencanaan dimulai. Rancangan kantor selesai pada tahun 2019. Proses dilanjutkan dengan pengadaan jasa kontraktor yang kemudian menyelesaikan pembangunan pada medio tahun 2020. KOJK Yogyakarta diresmikan pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Konsep Massa dan Tampak Bangunan

Kantor OJK Yogyakarta dengan lahan seluas 2.199 meter persegi dan luas bangunan 7.649 meter persegi ini merupakan massa tunggal terdiri atas bangunan lima lantai dengan dua *basement*. Karena areal pembangunan gedung berada di kawasan Tugu Pal Putih, dalam proses perizinan, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Pemda DIY meminta OJK memberi perhatian pada konteks lokal. Aspek cagar budaya dalam proses perancangan arsitektur, terutama pada massa bangunan, juga perlu menjadi pertimbangan.

KOJK Yogyakarta merupakan salah satu gedung pertama yang dibangun bersamaan dengan KOJK Solo, Jawa Tengah, dan KOJK Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rumusan konsep arsitektur Gedung OJK diterapkan dengan bangunan *open for public, close to the people* dengan penanda (*te-tenger*) Menara Integritas dan olahan fasad yang menjadi simbol identitas lembaga OJK.

Sedikit berbeda dengan Gedung OJK yang dibangun baru, khusus bangunan KOJK Yogyakarta tidak memakai prinsip atap datar. Namun, desainnya memakai atap limasan agar dapat beradaptasi de-

ngan ekspresi bangunan tradisional. Hal ini perlu dilakukan mengingat bangunan KOJK ini terletak berdekatan dengan Tugu Pal Putih sehingga perlu tanggap terhadap lokalitas dan keistimewaan Yogyakarta.

Memasuki halaman kantor akan terasa penerimaan yang penuh kedekatan antara masyarakat pengguna OJK dan fungsi layanan publik di lantai dasar yang bersifat terbuka. Di lantai dasar terletak SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), Gerai Pelaku, ruang mediasi, dan akses ke lift lobi untuk menuju area ruang kerja.



Dinding Identitas

Sebagaimana konsep yang dikembangkan pada perancangan Gedung OJK, terdapat Dinding Identitas. Dinding ini menjadi media untuk menampilkan ragam rias yang merupakan unsur budaya yang ditempatkan di area strategis. Untuk KOJK Yogyakarta ditampilkan ornamen motif batik truntum. Motif ini memiliki pola yang halus dan sederhana menyerupai bunga melati.

Motif truntum dipilih dengan pemahaman bahwa OJK selalu menjunjung persatuan rakyat, hati yang bersih, kearifan, dan kemampuan mengendalikan diri. Motif batik truntum yang selalu dipakai pada upacara adat juga mempunyai makna kebaikan dan keindahan. Motif ini juga menjadi simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, semakin lama semakin subur dan berkembang (*tumaruntum*).

Pilihan motif batik truntum sebagai motif dasar elemen estetika pada Dinding Identitas mencerminkan amanah yang diemban OJK dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pengabdian yang didasari niat suci untuk kebaikan rakyat akan dijalankan dengan sepenuh hati, ikhlas, tanpa pamrih.



Interior

KOJK Yogyakarta adalah satu dari tiga gedung baru OJK yang rancangan ruang kerjanya telah menerapkan konsep *flexible space*. Konsep ini menggabungkan pengaturan ruang dan cara bekerja. Tipe ruang kerja dirancang untuk dapat menyediakan beberapa pilihan tempat dan cara bekerja bagi karyawan. Konsep ini tidak seperti ruang kerja kantor konvensional dengan posisi duduk dan meja kerja tetap (statis). Karyawan di ruang kantor fleksibel dapat memilih lokasi kerja di kantor yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu.

Dengan konsep *flexible space*, akan tercipta ruang kerja yang bersuasana dinamis dan modern sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas untuk setiap anggota organisasi. Pada era digital ini, ada kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan yang sangat cepat dalam cara kerja. Oleh karena itu, konsep *agility* akan sangat berpengaruh pada pengembangan cara penyediaan kebutuhan ruang yang berbeda untuk setiap jenis/kelompok kerja. Ruang seperti ini juga dirancang sedemikian rupa sehingga relatif mudah diatur ulang untuk mengakomodasi perubahan tujuan dan cara bekerja atau diperbesar dan diperkecil sesuai kebutuhan.





Sebuah gedung baru yang mempunyai sosok modern dan dinamis telah berdiri pada tahun 2020 di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Gedung ini adalah KOJK Solo, yang berdiri pada sebidang tanah di pojok pertigaan Jalan Slamet Riyadi yang merupakan bulevar Kota Solo. Tepatnya lokasi gedung KOJK Solo ini adalah di depan Loji Gandrung yang telah lama dikenal oleh masyarakat Solo. Sebuah pemilihan lokasi yang tepat untuk kantor lembaga negara yang ingin hadir di masyarakat. Sebagai catatan, perlu disampaikan bahwa sebelumnya OJK berkantor di Jalan Veteran, Tipes, Solo.

Gedung Kantor OJK Solo merupakan gedung empat lantai yang terlihat eksis di kawasan sekitar Loji Gandrung, Stadion Maladi, dan Taman Sriwedari. Penataan bangunan dirancang sesuai ketentuan

tata kota Solo pada kawasan ini. Perletakan massa bangunan yang disesuaikan dengan bentuk lahan di sudut pertigaan memungkinkan bangunan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Konsep Massa dan Tampak Bangunan

Gedung KOJK Solo adalah salah satu gedung yang dibangun baru. Dalam proses perencanaannya, dirumuskan karakter dan simbol pelaksanaan tugas OJK yang dapat diekspresikan pada bangunan kantor baru ini. Tujuannya adalah menampilkan sebuah komposisi massa bangunan dengan karakter visual yang bersifat nasional. Selain itu, konsepsi rancangan juga ingin menampilkan citra integritas dan berwibawa dengan simbol misi, visi, dan struktur lembaga.

Sejak ada OJK, industri jasa keuangan di Surakarta seperti perbankan berlomba-lomba untuk menunjukkan kesehatannya. Kinerjanya jadi meningkat. Contohnya, Bank Solo perputaran uangnya lebih baik daripada sebelum ada OJK. Ke depan, harapan kita semua, OJK bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan bank. Selain itu OJK juga ikut andil dalam menyejahterakan masyarakat. Pimpinan bank jadi lebih berhati-hati tentunya.

Saya punya pengalaman pribadi dengan OJK. Waktu itu saya minta bantuan OJK Solo membantu masyarakat yang merasa dipersu-

lit proses peminjaman uangnya. OJK Solo sangat membantu masyarakat yang nggak ngerti perbankan. Ini kan sangat penting.

Gedung OJK di Solo sesuai dengan pencaangan Solo sebagai kota cagar budaya. Walau bangunannya modern, ciri-ciri Kota Solo masih banyak. Ruang terbukanya juga luas, jadi turut menurunkan polusi.

FX Hadi Rudyatmo
Wali Kota Solo (2016-2021)





Hasilnya, sebuah bangunan yang merupakan komposisi massa vertikal berupa Menara Integritas dan blok horizontal yang merupakan auditorium. *Three red lines* dalam komposisi horizontal yang mengelilingi bagian atas (atap) bangunan adalah simbol tugas OJK, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan yang dilaksanakan dengan totalitas dan sepenuh hati. Pengolahan rancangan fasad menampilkan ekspresi dinamis OJK. Kesan terbuka dan transparan di lantai dasar adalah cerminan sikap lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya, yaitu *open to public, close to the people*.

Memasuki halaman, kita disambut oleh taman yang asri menuju lantai dasar yang merupakan fasilitas pelayanan bersifat umum. Di area ini terasa bahwa kantor ini ramah dan terbuka untuk masyarakat. Kegiatan pelayanan, seperti SLIK, ruang mediasi, pemberian informasi, serta auditorium, terletak di

lantai bawah ini. Di atasnya adalah lantai untuk operasional kantor.

Dinding Identitas

Di lantai ini terletak Dinding Identitas yang menampilkan ragam rias tradisional Solo berupa motif batik kawung dan daun kluwih. Nama kawung berasal dari bahasa Jawa, yaitu *suwung*, yang berarti kekosongan. Artinya bukan tidak berpikir, melainkan kekosongan nafsu dan hasrat duniawi. Kata *suwung* ini menjadikan seseorang netral, tidak berpihak, tidak berusaha untuk menonjol, mengikuti aturan yang ada di sekitar, dan berjalan sesuai kehendak alam. Motif yang berpola geometris mempunyai makna filosofis dalam budaya Jawa, yaitu adanya satu titik pusat kekuatan di alam semesta dan manusia.



Motif kawung juga melambangkan *papat madhep limo pancer*, yaitu empat titik membentuk garis yang melambangkan persaudaraan menghadap satu titik di tengah yang merupakan pusat kekuatan alam semesta. Dengan demikian, motif kawung juga merupakan lambang persatuan.

Motif batik kawung yang dilhami oleh buah kolang-kaling dari pohon aren ini sudah dikenal sejak abad ke-13. Pohon aren itu mulai ujung daun sampai akarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini menyiratkan agar manusia berguna bagi sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa makna tersebut adalah: 1. persatuan rakyat dan lambang persaudaraan seluruh bangsa; 2. hati yang bersih seperti bentuk motif buah kolang-kaling, sebuah pohon yang bisa menghasilkan buah putih bersih dari kulit yang keras; 3. lambang kearifan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri.

Adapun ornamen daun kluwih dalam rangkaian elemen estetika ini memberi makna berkecukupan. Nama pohon kluwih dan kata *luwih* (lebih) mempunyai kesamaan bunyi di akhir kata sehingga diartikan berkecukupan (*keluwih/kluwih*). Artinya, segala sesuatu tak hanya dinikmati sendiri, tetapi diharapkan dapat mengalir ke lingkungan sekitarnya.

Selain Dinding Identitas pada dinding lobi gedung, ditampilkan elemen estetika dengan motif dekoratif akar. Bagian terpenting dari tanaman adalah akar karena dapat membuat hidup dan berdiri tegak. Akar berada di dalam tanah, tak pernah terlihat oleh manusia. Pada elemen estetika ini, lembaga OJK digambarkan sebagai akar yang bekerja memperkuat perekonomian Indonesia, bekerja tekun tanpa banyak bicara dalam melaksanakan tugasnya dengan amanah.



Interior

Penataan interior gedung ini memberi imaji bahwa karyawan yang menghuni gedung ini bekerja dengan mandiri, terbuka, independen, dan profesional. Gedung KOJK Solo sejak awal menerapkan konsep interior *flexible office*, yaitu ruang kerja yang dirancang untuk dapat menyediakan beberapa pilihan tempat dan cara bekerja bagi karyawan. Karyawan di ruang kantor fleksibel dapat memilih tempat kerja di area kantor yang diinginkan, serta cocok dengan kebutuhannya pada saat itu.





Surabaya dikenal sebagai kota yang hijau dan asri dengan pepohonan yang merata di hampir seluruh bagian kota. Di tengah terik panasnya iklim kota pesisir ini, selalu bisa ditemui tawaran ruang kota yang memberikan keteduhan bagi para pelintasnya. Hal lain yang penting adalah tentang tata kota dan arsitektur bangunan. Banyak sekali bangunan tua dan bersejarah masih berdiri dengan baik di Surabaya. Keberadaan bangunan-bangunan ini membuat Surabaya menjadi kota yang berkarakter dan peduli dengan sejarah. Di sisi lain, Surabaya sebagai kota modern juga memiliki gedung-gedung dengan arsitektur masa kini. Ini memperlihatkan perhatian kota pada bangunan tua, tetapi tidak tertinggal dari perkembangan zaman dan teknologi. Beberapa bangunan modern ini mendapatkan penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dua hal kontras ini, arsitektur bangunan tua dan bangunan modern, memberikan dinamika arsitektur yang menarik dan patut dimanfaatkan untuk konsep bangunan gedung OJK KR 4 Jawa Timur.

Konsep arsitektur bangunan gedung KR 4 Jawa Timur ini mengambil sedikit langgam bangunan tua, sebagai usaha menghargai sejarah kota dan menggunakannya sebagai keselarasan baru bersama *curtain wall* dan alumunium. Dengan demikian diharapkan ke-

hadiran Gedung OJK dapat menyumbang arsitektur yang baik kepada tata kota Surabaya.

Gedung OJK KR 4 Jawa Timur terletak di Jalan Gubernur Suryo No 28-30, berdekatan dengan bangunan-bangunan cagar budaya, yaitu Gedung Grahadi, SD Kaliasin, dan Balai Pemuda. Jalan Gubernur Suryo sendiri sedang dalam pengajuan untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Lokasi yang strategis dan berdampingan dengan bangunan-bangunan cagar budaya membawa konsekuensi kepada proses pembangunan gedung OJK KR 4 ini. Selain kehati-hatian pada pe-

Saya mengucapkan selamat dan bersyukur bahwa Jawa Timur mendapat kesempatan sebagai lokasi kantor OJK. Tentu ini akan menjadi penyemangat baru karena seluruh industri keuangan di Jawa Timur memang membutuhkan satu percepatan yang diikuti oleh SDM yang harus makin berkualitas. SDM harus makin profesional dengan diiringi digitalisasi sistem industri keuangan yang harus advance. Hadirnya Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur tentu akan menjadi bagian dari penguatan seluruh proses perjalanan industri keuangan yang ada di Jawa Timur.

Saya berharap kehadiran OJK dapat menumbuhkan industri keuangan di Jawa Timur, penguatan UMKM, dan literasi digital. Saya berharap pula ada program reguler dengan para anak muda Jawa Timur sebagai pelaku start up. Kehadiran OJK harus meaningful bagi masyarakat Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur



Gedung KR 4
Jawa Timur dilihat
dari Balai Pemuda.



laksanaan pekerjaan yang lebih dari biasanya, OJK juga mendukung Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keselamatan dan keamanan kegiatan di Gedung Grahadi.

Konsep arsitektur bangunan gedung KR 4 Jawa Timur mengambil inspirasi dari keberadaan bangunan-bangunan tua dan modern di Surabaya yang hidup berdampingan. Laggam bangunan tua diwujudkan dalam tiga hal pokok, yaitu komposisi “kepala-badan-kaki”, massa bangunan yang simetris dan sistem konstruksi portal kolom dan balok. Portal kolom dan balok menggunakan material yang memberikan kesan berat, serta diletakkan hanya di lantai-lantai bawah (*street level*) diharapkan dapat memberikan kesan visual yang berkesinambungan dengan bangunan-bangunan tua di Surabaya. Untuk

lantai-lantai atas, bangunan ini akan memperlihatkan citra modern dan kekinian dengan konstruksi *curtain wall* dan rangka aluminium. Sementara ciri utama pada sampul bangunan adalah *corporate identity* OJK, diwujudkan dengan Menara Integritas yang mengandung unsur jumlah sembilan, lima, serta *three red lines* di kepala bangunan.

Kantor adalah rumah kedua kita, apalagi dengan bangunan yang sangat representatif dan strategis. Harapan yang sangat tinggi kepada OJK selaku salah satu pilar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), khususnya dalam menjaga masyarakat dan mampu bersinergi dengan seluruh stakeholder di Jawa Timur.

OJK punya peran penting dalam edukasi dan perlindungan konsumen. Harapan saya, pengawasan, perlindungan, dan pengaturan bisa dilakukan secara detail agar bisa mendukung Indonesia untuk recover together, recover stronger.

Indah Kurnia
Anggota Komisi XI DPR RI



Dinding Identitas
Petirtaan Jolotundo.





Peresmian gedung KR 4 Jawa Timur yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, Selasa, 15 Maret 2022. Ia mengatakan, kemandirian lembaga OJK di Jatim harus direalisasikan dalam bentuk pelayanan bagi masyarakat.



Selain gedung KR 4 Jawa Timur di Surabaya, pada tahun 2022 juga untuk pertama kalinya OJK memiliki bangunan rumah dinas.



Kantor OJK Kediri merupakan salah satu kantor yang dibuka oleh OJK bersama 35 kantor yang lain di seluruh Indonesia pada tahun 2013. Setelah hampir dua tahun berbagi kantor dengan Bank Indonesia, untuk pertimbangan eksistensi dan manajemen pengaturan operasional, OJK menyewa gedung sendiri mulai tahun 2015. Bangunan gedung kantor dua lantai ini berada di area pusat kota Kediri dengan alamat Jl Brawijaya No 3 yang juga merupakan jalan utama di Kota Kediri, berseberangan dengan gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Selama penggunaan gedung kantor sewa sampai saat ini, yang dirasakan sebagai kendala adalah kebutuhan ruang besar untuk berbagai kegiatan, antara lain sosialisasi program kepada *stakeholders*. Kerap kali perlu menyewa ruang di luar kantor, atau bila memungkinkan menggunakan halaman parkir di belakang gedung. Hal ini merupakan tantangan yang akan dijawab dan dituntaskan pada masa depan, sebagai bagian dari kelengkapan ruang-ruang kerja yang dibutuhkan oleh OJK.

Kantor OJK Malang mulai beroperasi di Jl Kawi 17 di sebuah rumah dinas milik Bank Indonesia dengan halaman yang luas di samping gedung sebuah bank. Terasa kontras luasan dan sosok bangunan OJK dengan gedung bank tersebut. Hal ini tak menurunkan semangat insan OJK, Banyak cerita menarik tentang semangat para insan OJK mengiringi perjalanan sejarah KOJK Malang.

Gedung sementara disiapkan dengan waktu yang mendesak agar dapat segera pindah dari gedung Bank Indonesia, yang memang ukurannya tergolong kecil. Selain itu ada faktor usia



gedung mengingat KPW BI Malang adalah eks gedung Javasche Bank.

Pada tahun 2021 diperoleh tanah yang kemudian dilakukan renovasi dengan memanfaatkan potensi ruang yang ada. Pemanfaatan ruang dan potensi fasad ternyata dapat memberi solusi desain yang cukup baik pada gedung ini. Konsep Menara Integritas ditampilkan dengan menempatkannya di sisi kanan massa bangunan. Sementara *three red lines* simbol dari tugas OJK diletakkan pada bagian atas mengelilingi massa bangunan Renovasi fasad ini cukup dapat menampilkan karakter Gedung OJK.

Pelaksanaan renovasi ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan karena terkait dengan target penyerapan anggaran OJK 2021. Dengan sege-nap kreativitas dan semangat untuk dapat mewujudkan impian mempunyai gedung kantor yang layak, maka proyek renovasi dapat diselesaikan

tepat waktu. Gedung KOJK Malang diresmikan oleh Ketua Dewan Komisioner pada hari Senin, 14 Maret 2022.

Pada renovasi ini rancangan interior telah menerapkan konsep *flexible office space* dengan menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan OJK. Ruang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, seperti ruang SLIK, ruang mediasi, ruang serbaguna dapat diakses dengan mudah dari lobi di lantai dasar. Sementara ruang kerja, ruang pimpinan, ruang rapat, dan lain-lain terletak di lantai atas.

Pola pembangunan melalui pembelian gedung di lokasi strategis dengan renovasi yang baik ini dapat memberi solusi tepat atas masalah penyediaan gedung Kantor OJK Malang.



" Memang masih kelihatan *showroom*. Tapi lebih baik dari yang di Jalan Kawi, bocor sana-sini, ada videonya segala, *diemberin*. "

Sugiarto Kasmuri, Kepala KOJK Malang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia telah dialihkan kepada OJK. Untuk menjalankan amanat tersebut, maka terhitung mulai 31 Desember 2013 OJK telah membuka 35 kantor yang terdiri dari 6 Kantor Regional dan 29 kantor OJK di daerah. Salah satunya adalah kantor OJK di Jember, Jawa Timur.



Setelah mengawali operasional dengan berbagi kantor bersama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember, OJK menyewa gedung sendiri pada tahun 2015. Lokasinya di pusat kota dengan alamat Jl Hayam Wuruk No 41, Kaliwates, Jember. Gedung kantor OJK ini terdiri dari dua lantai dengan luas total sekitar 1.898 meter persegi. Pada masa mendatang, hal yang penting dilakukan adalah melakukan perkuatan struktur bangunan untuk menambah keandalan bangunan serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pengguna bangunan. Saat ini kebutuhan ruang kerja juga dinilai perlu diperluas karena kebutuhan kerja yang meningkat, tetapi hal ini tidak bisa leluasa dilakukan karena gedung berstatus sewa dan sistem struktur bangunan yang ada tidak memungkinkan menambah lantai ke atas.



" Para tamu yang hadir harus memarkir kendaraan di bahu jalan depan kantor karena keterbatasan lahan parkir.... "

Siti Alia, Pegawai



KR 5 Sumatera Bagian Utara

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara mencakup wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat. Dengan luas kira-kira setengah dari Pulau Sumatera, wilayah ini sangat kaya dengan hasil perkebunan, pertanian, pertambangan, minyak, dan gas. Kekuatan ekonomi di wilayah ini sudah tersohor sejak masa Kerajaan Sriwijaya (tahun 682-1377), terutama sebagai jalur perdagangan rempah-rempah di sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Nusantara.

Wilayah ini telah melahirkan banyak hal dengan reputasi internasional. Hasil perkebunan tembakau Deli sudah tersohor ke segala penjuru dunia. Demikian pula produksi kopinya, terutama jenis arabika, seperti kopi Sidikalang, kopi Sipirok, kopi Mandailing, kopi Tarutung, dan kopi Lintong. Kekayaan hasil bumi Sumatera bagian utara ini menjadi kian sempurna karena keindahan flora dan fauna yang istimewa serta keunikan rumah-rumah dan karya seni tradisional masyarakat adat yang masih bertahan di tengah zaman modern abad XXI, seperti di Pulau Nias, Tanah Karo, Gayo, dan Sijunjung. Kita pun ingat karya sastra Melayu Tinggi dari Pulau Penyengat dan sekitarnya yang menjadi salah satu pedoman pembentukan bahasa Indonesia.

Dengan semangat juang seperti Sisingamangaraja dan Laksamana Malahayati, kepandaian se-

perti pujangga Raja Ali Haji, jiwa nasionalis seperti Bung Hatta dan Sutan Sjahrir, atau keuletan Tjong A Fie, masyarakat Sumatera bagian utara tak berhenti membangun negeri di berbagai sektor kehidupan di alam kemerdekaan ini. Para tokoh di atas telah memberi suri teladan agar selalu mengambil peran aktif untuk memajukan bangsa.

Kota Medan memiliki tempat tersendiri dalam per-caturan ekonomi di Sumatera bagian utara. Sebagai kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, Medan tumbuh dan berkembang seiring merebaknya usaha perkebunan dan perdagangan pada akhir abad XIX. Keberadaan pelabuhan laut Belawan ikut menopang kesuksesan Kota Medan di bidang ekonomi dalam konteks jalur perdagangan di Selat Malaka.

Dengan semangat itulah OJK membentuk Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). KR 5 mula-mula mengambil lokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara di Kota Medan pada periode akhir 2013-2017. Dengan fasilitas yang minimal, OJK berusaha memberikan layanan sebaik-baiknya kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat industri jasa keuangan di Sumbagut.

Lambat laun, keberadaan OJK mulai diperhitungkan. Ketika volume pekerjaan bertambah, harapan masyarakat meningkat, maka Kantor Regional 5 harus mencari tempat yang lebih memadai. Mujur tak dapat ditolak, sebuah bangunan milik Bulog Sumatera Utara ternyata dapat disewa dan dimanfa-



atkan sebagai KR 5 Sumbagut sejak 2017. Lokasinya berada di Jalan Gatot Subroto Nomor 180, Kota Medan, kira-kira 5 kilometer dari Lapangan Merdeka.

Pada hari Senin, 26 Februari 2018, kantor diresmikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimbob Santoso. Dengan luas bangunan 1.344 meter persegi di atas tanah seluas 2.895 meter persegi, kegiatan OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan di Sumbagut kian nyata dan makin dipercaya masyarakat.

Tahun 2020, OJK berhasil membeli sebidang tanah seluas 5.000 meter persegi tepat di sebelah timur kantor saat ini. Tanah berbentuk empat persegi panjang, tetapi tidak utuh karena di bagian muka masih ada sebidang tanah milik orang lain yang belum dapat diambil alih. Di atas tanah itu

Gedung Bulog yang disewa sebagai KR 5 Sumbagut dan tanah kosong milik OJK untuk gedung kantor yang baru.

akan segera dibangun gedung Kantor Regional 5 Sumbagut yang baru dan dimiliki sendiri oleh OJK.

Rancangan kantor yang baru telah diselesaikan pada tahap *basic design*. Massa bangunan empat persegi panjang, dengan bagian *core* berada di sisi barat. Bangunan terdiri atas delapan lantai dengan luas lantai 11.910 meter persegi. Fasad menampilkan Menara Integritas sebagai elemen vertikal yang menjadi kekhasan kantor-kantor OJK yang baru dan *three red lines* yang mengelilingi bagian atas bangunan. Tampilan arsitekturnya memakai langgam modern dengan penutup bangunan berupa *glass curtain wall*.

Pada lantai satu terdapat lobi utama dan Tangga Mulia untuk mencapai lantai dua serta area pelayanan publik. Pada lantai yang sama di bagian belakang akan dibangun tempat parkir mobil dan masjid. Auditorium berada di lantai dua, dipakai untuk kegiatan penerangan, ceramah, dan kegiatan lain, khususnya dalam rangka literasi dan inklusi jasa keuangan bagi masyarakat. Di lantai tiga, di samping ruang pelayanan publik di bagian muka, terdapat ruang serbaguna (*ballroom*) dan area *pre-function*. Lantai empat hingga delapan akan dialokasikan untuk ruang kerja.

Sementara di lantai enam dan tujuh disiapkan teras semiterbuka yang menghadap ke selatan, ke jalan utama, untuk memberi kesempatan bagi insan OJK mendapatkan *fresh air* langsung dari udara terbuka—sangat baik untuk kesehatan, terutama setelah pandemi Covid-19. Melalui desain yang saksama, diupayakan agar Kantor Regional 5 ini meraih sertifikat Gold terbitan Green Building Council Indonesia (GBCI) sebagai bagian dari komitmen OJK mendukung konservasi energi dan air.

Pada bagian lobi utama terdapat elemen tradisional sebagai Dinding Identitas yang diintegrasikan ke dalam olahan ruang dalam. Untuk memberikan nuansa kekinian, tidak terlalu formal, dan ceria, penataan interior ruang kerja dan ruang-ruang publik mengarah pada kesan terbuka, warna cerah atau alami, dan memasukkan cahaya matahari seoptimal mungkin ke dalam ruangan.

Fasilitas untuk penyandang disabilitas dan ibu menyusui akan mendukung keandalan bangunan, di samping tangga dan lift kebakaran. Selain tempat parkir mobil, disediakan pula tempat untuk sepeda motor dan sepeda.

Halaman bagian depan yang luas akan digunakan sebagai lapangan upacara, lengkap dengan tiang bendera setinggi 8 meter, serta untuk sejumlah kegiatan tertentu. Penataan lanskap mengarah pada keseimbangan antara *hardscape* dan *softscape*. Perkerasan dibuat secukupnya, sementara penghijauan akan lebih diutamakan, baik berupa *ground cover* rumput, tanaman semak, pohon-pohon yang meneduhkan, maupun tanaman rambat pada dinding-dinding yang telah ditentukan.

Dengan bangunan baru di atas tanah milik sendiri, diharapkan insan OJK KR 5 Sumbagut dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menumbuhkan semangat untuk bekerja melayani kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan industri jasa keuangan, terutama mendorong percepatan pemulihan ekonomi setelah krisis Covid-19 berakhir. Dari Kota Medan, KR 5 Sumbagut mengambil peran aktif membangun negeri di bidang jasa keuangan. Sesuai peribahasa "seperti pahat dengan penukul", kehadiran OJK tak lain dan tak bukan adalah pendorong agar satu sama lain bantu-membantu, gotong royong di bidang literasi dan inklusi jasa keuangan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.



Rancangan gedung KR 5 Sumbagut.

Kerajaan Aceh telah tersohor kejayaannya. Perlawanannya atas hegemoni penguasa kolonial Hindia Belanda menjadi suri teladan bagi anak bangsa yang cinta kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Cut Nyak Dien, dan Cut Meutia telah menorehkan tinta emas bagi keharuman sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Bagaimanapun, riwayat Aceh adalah riwayat Indonesia. Ketika bencana tsunami melanda Aceh pada Desember 2004, lebih dari 200.000 orang tewas, hilang tak ditemukan jasadnya. Kesedihan menimpa Indonesia untuk jangka waktu yang cukup lama. Bangkit dari keterpurukan akibat bencana alam guncangan gempa 9,0 skala Richter ini memerlukan kesiapan waktu, tenaga dan pikiran, serta kekuatan jiwa dan raga yang teguh dan tangguh.



" Kami memperbanyak jendela, sehingga memberikan kesan bekerja di alam terbuka. "

Ryan Novrian, Pegawai

Melalui sektor pertanian, perikanan, dan agroindustri, Provinsi Aceh mulai membangun kembali kehidupannya yang terpuruk. Tak lama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk, Aceh menjadi salah satu lokasi kantor angkatan pertama. Lokasi sementara berada di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan diresmikan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Zaini Abdullah pada hari Senin, 6 Januari 2014. Hadir pula Kepala Kantor OJK Aceh Muhammad Lutfi.

Untuk memperkuat kemandiriannya, beberapa waktu kemudian KOJK Aceh memutuskan pindah dan menyewa sebuah gedung di Jalan Prof Ali Hasyimi, Pango Raya, Banda Aceh. Kantor yang berjarak 5 kilometer arah tenggara Masjid Baiturrahman itu diresmikan



Ketua Dewan Komisiner OJK 2012-2017 Muli-aman D Hadad, bersama Wakil Gubernur NAD Nova Iriansyah pada 17 Juli 2017. Muhammad Lutfi mendampingi para tamu undangan dalam acara peresmian itu.

Bangunan terdiri atas tiga lantai, memiliki tampak depan dengan penutup bidang kaca dan *aluminium composite panel* abu-abu, ditambah atribut logo OJK pada bagian atas bangunan. Ruang lobi dirancang agar memberikan kenyamanan bagi pemangku kepentingan dan konsumen. Tersedia pula pojok UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada para pengunjung KOJK Aceh. Untuk tamu khusus, disiapkan ruang duduk yang agak mewah, tetapi sering juga digunakan untuk kegiatan edukasi dan literasi industri jasa keuangan.

Masalah tempat parkir yang belum memadai masih memerlukan solusi dalam waktu dekat. Namun, dalam kondisi yang belum ideal itu pun, para insan OJK Aceh terus bergiat untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan yang sehat, khususnya dewasa ini, untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 di "Negeri Serambi Mekkah" dan sekitarnya.

Provinsi Riau dengan ciri khas kebudayaan Melayu adalah salah satu kawasan strategis dengan percepatan pembangunan yang tinggi.

Pengadaan gedung KOJK Riau di Pekanbaru diputuskan dengan membeli lahan yang sudah ada bangunannya. Lahan dan gedung dibeli untuk selanjutnya dilakukan renovasi. Drencanakan pada tahun 2022, gedung KOJK Riau mulai direnovasi. Tanah seluas 2.740 meter persegi dengan bangunan 1.300 meter persegi adalah bekas Restoran Apollo yang letaknya di Jalan A Yani, pusat bisnis dan pemerintahan.

Konsep desain arsitektur

Gedung KOJK Riau dikembangkan dengan pemanfaatan struktur bangunan yang ada. Kebutuhan operasional kegiatan perkantoran KOJK Riau dipenuhi dengan pengaturan *zoning* yang memanfaatkan tiga lantai bangunan dan satu *semibase ment* yang sudah ada.

Perencanaan renovasi gedung ini diarahkan tetap dapat menampilkan karakter Gedung OJK, yaitu bangunan yang modern, dinamis, dan elegan. Tentu saja juga dengan menampilkan ciri Gedung OJK, yaitu adanya Menara Integritas dan *three red lines* di bagian atas massa bangunan.



Gedung yang disewa KOJK Riau hingga 2022.

Untuk dapat menampilkan ciri Gedung OJK, dilakukan renovasi fasad dengan memasang kaca jenis *low emission* guna mereduksi transmisi sinar matahari sehingga penggunaan sistem pendingin ruangan (*air conditioner*) lebih efisien. Selain itu, dilakukan pemanfaatan lantai *semibase ment* terkait dengan *main entrance*.

Konsep interior

Potensi bangunan yang dibeli untuk direnovasi ini dapat dimanfaatkan sesuai kriteria perancangan interior dan struktur organisasi OJK. Dilakukan perubahan



Gedung eks restoran Apollo yang dipakai sebagai KOJK Riau.



Rancangan gedung baru.

layout dan *finishing* arsitektur dan interior serta perbaikan dan penggantian sistem ME (*mechanical and electrical*) penunjang bangunan. Lantai satu dialokasikan untuk lobi dan ruang pelayanan masyarakat yang membutuhkan kemudahan akses, ruang rapat, dan ruang servis.

Lantai mezanin untuk auditorium, sedangkan lantai dua dialokasikan sebagai ruang kerja staf dan pimpinan KOJK Riau. Lantai tiga dialokasikan untuk *ballroom* beserta ruang penunjang terkait, seperti *pre-function* dan ruang servis.

Dinding Identitas

Dinding Identitas KOJK Riau dirancang untuk menampilkan babak perjalanan sejarah lahirnya daerah Riau dan budaya daerah. Filosofi "cahaya bagai bulan mengambang, hilang ragu lenyaplah

bimbang, bagaikan bunga baharu kembang" diungkapkan dengan ditampilkannya motif pucuk rebung kuntum mambang pada Dinding Identitas KOJK Riau. Motif pucuk rebung adalah salah satu motif khas Melayu Riau dengan makna harapan baik.

Sebutan Riau sebagai "Negeri atau Bumi Lancang Kuning" menggambarkan kepiawaian pemimpin dalam memerintah daerah. "Berlayar malam, kalau nakhoda kuranglah paham, alamat kapal akan tenggelam". Sebuah filosofi tentang bagaimana pemimpin (nakhoda) mengarungi lautan agar kapalnya tak karam dalam mencapai tujuan.

" *Stakeholders* senang OJK pindah ke pusat kota karena jadi lebih gampang koordinasi. Layanan akan lebih mudah dijangkau. "

M Lutfi, Kepala KOJK Riau

KOJK Kepulauan Riau (Batam)

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lain yang terbentang di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun (BBK).

Batam yang dibangun pada tahun 1970-an merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini juga memiliki jarak sekitar 13 kilometer saja dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota yang terencana sejak kelahirannya, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia.

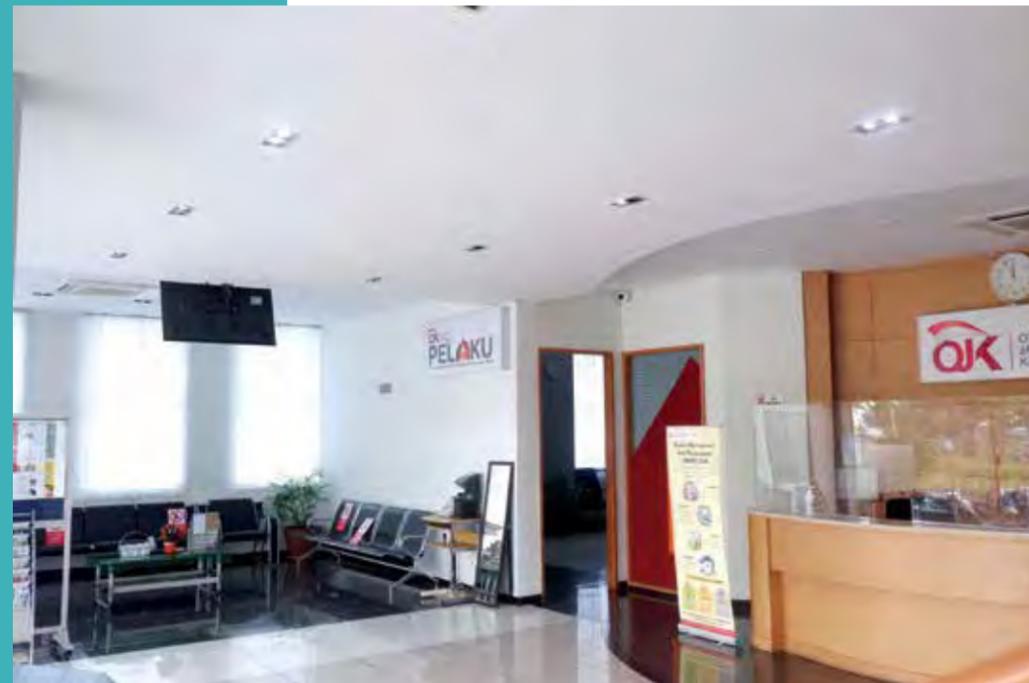
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi, meliputi sektor komunikasi; sektor listrik, air, dan gas; sektor perbankan; sektor industri dan alih kapal; serta sektor perdagangan dan



jasa, merupakan nadi perekonomian Kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia, tetapi juga komoditas ekspor. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun, kini telah berstatus sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam, yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah tiga tahun lebih menumpang di gedung Bank Indonesia Batam, pada hari Jumat, 7 Juli 2017, gedung sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Ahmad Yani, kom-



pleks Ruko Kara Junction Blok C 1-2, Kota Batam, diresmikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad. Kantor sementara ini diharapkan dapat memperkuat dan mendukung program dan kebijakan OJK, terutama dalam mengembangkan perekonomian daerah dan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan berbagai program strategis OJK.

Melalui kantor-kantor di daerah, selain bertugas mengawasi perkembangan industri jasa keuangan, OJK juga harus meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu, antara lain, diupayakan dengan mengembangkan sektor UMKM dan sektor-sektor potensial daerah lainnya,

seperti perikanan dan kelautan, pariwisata, pertanian, serta ekonomi kreatif.

Dengan kehadiran di daerah, diharapkan OJK dapat memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai katalis pertumbuhan dengan tetap memberikan perhatian pada upaya penjagaan stabilitas sistem keuangan dan penguatan inklusi keuangan.

Lima tahun berlalu, kehadiran KOJK Batam telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat pengguna jasa keuangan, sekalipun gedung KOJK Batam masih menyewa di kompleks Ruko Kara Junction, Jalan Ahmad Yani, Batam.

Ke depan, kiranya perlu segera dibangun gedung KOJK Batam yang lebih representatif dan memenuhi kebutuhannya secara lengkap. Selain bisa meningkatkan kehadiran lembaga OJK di masyarakat, hal ini juga meningkatkan kebanggaan insan OJK dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Karena gedung lembaga yang dirancang dengan baik, di lokasi yang utama dalam tata ruang kota, adalah sebuah *dignity* dan merupakan simbol kehadiran lembaga itu di masyarakat.



Berbicara tentang perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia tidak lepas dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sejak dahulu perekonomian di provinsi ini kaya dengan potensi untuk terus dikembangkan sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Sektor unggulan Sumbar adalah pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Di samping itu, Sumbar memiliki potensi di sektor pariwisata mengingat melimpahnya pemandangan alam yang indah dan kekayaan budaya yang sangat menarik.

Saat ini, terdapat sejumlah perbankan umum, termasuk bank lokal Sumbar. Di daerah itu terdapat satu kantor utama bank umum, yaitu Bank Nagari, dan 29 kantor cabang bank umum. Kemudian, di daerah itu juga terdapat 89 bank perkreditan rakyat (BPR) konvensional dan tujuh BPR syariah.

Sejak lembaga OJK berdiri dan beroperasi di Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi, lembaga ini belum mempunyai kantor sendiri. Kantor OJK masih berbagi tempat di gedung Bank Indonesia. Kemudian pada 13 Desember 2018, KOJK Sumbar menyewa gedung di Jalan Khatib Sulaiman 68, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Dengan menempati gedung kantor sendiri yang cukup representatif, meski masih

menyewa, pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan industri keuangan di daerah ini akan lebih optimal. Pemindahan ke kantor OJK ini juga meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme serta memaksimalkan peran OJK mengawasi sektor keuangan di Sumbar sekaligus meningkatkan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun masih berupa gedung sewa, keberadaan KOJK Sumbar di Padang memastikan bahwa lembaga ini akan melakukan pengawasan yang baik terhadap perbankan yang beroperasi di daerah itu sehingga juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ke depan diharapkan dapat segera dibangun gedung KOJK Sumbar di Padang sebagaimana telah dirintis pembangunannya oleh OJK dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2019.

OJK selalu berupaya agar gedung kantor sendiri dapat berdiri di Kota Padang, berlokasi di daerah perkantoran sejajar dengan kantor-kantor perwakilan lembaga tingkat provinsi di Padang. Dengan berdirinya gedung yang dapat memenuhi kebutuhan operasional dan menampilkan karakter Gedung OJK yang baik, kiranya kehadirannya dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan akan semakin terasa oleh masyarakat.

KR 7 Sumatera Bagian Selatan

Sejak awal operasional di Palembang pada 2014, KR 7 Sumatera Bagian Selatan menempati gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Pada pertengahan 2016 OJK berpindah dengan menyewa gedung kantor di Jl Residen Abdul Rozak No 99, Palembang.

Gedung kantor ini terdiri atas tiga lantai dengan luas total sekitar 2.100 meter persegi di atas lahan seluas sekitar 5.651 meter persegi, dinilai cukup representatif untuk kegiatan OJK di KR 7. Namun, telah dibangun gedung kantor milik sendiri yang terdiri atas delapan lantai dengan luas lantai total sekitar 12.700 meter persegi di atas lahan seluas sekitar 4.200 meter persegi. Memiliki gedung sendiri akan memberikan dampak positif bagi OJK dalam hal eksistensi tempat bekerja, antara lain untuk kepastian penyimpanan dokumen dan pengembangan sistem teknologi informasi (IT). Demikian pula halnya sehubungan kerja sama dengan seluruh *stakeholders*, serta peran OJK dalam mengedukasi dan meningkatkan literasi keuangan khususnya di Sumatera bagian selatan, fasilitas ruang kerja, ruang komunal, auditorium, aula serba guna serta berbagai fasilitas pendukung dapat disediakan lengkap sesuai kebutuhan.

Dari sisi perancangan gedung kantor yang baru, beberapa hal menarik dapat disampaikan sebagai berikut: gedung baru memperhatikan dan mengaplikasikan budaya lokal yang direpresentasikan dengan tanjak. Bentuk dan komposisi tanjak dapat ditemui



Semoga dengan gedung baru, OJK Palembang semakin optimal dalam mengatur dan mengawasi konsumen sektor jasa keuangan. Harapan kami juga, OJK bisa meningkatkan perekonomian daerah dengan sumber perekonomian baru, termasuk pembiayaan sektor UKM.

Harnojoyo
Wali Kota Palembang



pada fasad bangunan dan Dinding Identitas. Perhatian terhadap keunikan lokal ini diharapkan juga dapat dilihat pada waktu malam karena fasad bangunan diberi penerangan khusus terhadap komposisi tanjak.

Konsep arsitektural bangunan juga ingin merepresentasikan vernakular Sumatera Selatan, khususnya area Palembang, yang akrab dengan rumah terapung. Pada perancangan gedung KR 7 ini diwujudkan dengan kolam air dan sistem struktur dengan kolom-kolom bangunan di lantai dasar, yang dapat dibaca sebagai komposisi rumah terapung. Perpaduan antara tanjak dan konsep rumah terapung diharapkan akan memperkuat kehadiran identitas Sumatera Selatan sebagai sumbangan OJK kepada masyarakat dan tata kota Palembang.

Sejalan dengan sikap OJK yang sangat peduli pada konsep keberlanjutan, gedung KR 7 yang baru dirancang untuk memenuhi sertifikasi bangunan hijau dengan level Gold dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Pada pendekatan *passive design*, dapat dilihat perletakan dinding *core* di sisi barat, taman terbuka di lantai atas (*outdoor garden*), dan selimut hijau (*green wall*) pada bangunan parkir untuk menyerap karbon.

Ekspresi yang mengemuka dari berbagai kalangan di Palembang terhadap kehadiran gedung kantor baru ini umumnya baik dan menyambut dengan gembira. Bagi KR 7 sendiri hal ini dinilai akan memberi citra tentang OJK yang tampil independen dalam tugas pengawasan bank secara mandiri dan berintegritas, serta fungsi pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.





Gedung KR 7 Sumbagsel menggunakan elemen Sungai Musi beserta Jembatan Ampera yang terkenal dengan warna merahnya sebagai Dinding Identitas.



" OJK kan bidangnya pengawasan, ya harus independen, bebas dari kepentingan. Salah satu implementasinya, ya gedungnya mandiri seperti gedung yang sekarang baru. Kalau sewa, bisa dipertanyakan, sewa dari siapa, harga berapa. "

Untung Nugroho, Kepala KR 7 Sumbagsel



Empat SHM dan 17 Ahli Waris

Awalnya, Kantor OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (KR 7 Sumbagsel) menempati suatu gedung kantor sewa empat lantai di Jl Residen H Abdul Rozak No 99, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan. Gedung milik perseroan ini disewa sejak awal Juni 2016 sampai akhir November 2022.

Mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dimana nilai sewa dan perawatan gedung kantor yang cukup tinggi, maka baik dari DLOG maupun KR 7 Sumbagsel bahu membahu dan bersinergi menjajaki beberapa usulan lokasi pembelian berupa tanah dan/atau bangunan dari bulan Juli sampai November 2019.

Pilihan jatuh kepada tanah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No 1025, Kota Palembang. Tanah tersebut terdiri dari 4 SHM dengan 17 ahli waris yang pada saat itu belum dilakukan proses turun waris.

Untuk memastikan semua berjalan secara *govern*, OJK melibatkan konsultan KJPP untuk melakukan *appraisal* harga yang wajar terhadap pembelian tanah tersebut. Sedangkan untuk memastikan legalitasnya, OJK juga telah melakukan proses legal audit.

Namanya jodoh, setelah dilakukan negosiasi pada akhir November 2019 dengan pemilik sekaligus kuasa ahli waris lainnya, semua sepatkat dengan harga yang ditawarkan OJK sesuai hasil *appraisal*. Kesepakatan ditandai dengan ditandatanganinya surat perjanjian jual beli tanggal 19 Desember 2019 dan telah dilakukan pelepasan hak di hadapan notaris.

Proses dilalui dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti, untuk kemudian dilanjutkan dengan pembangunan gedung KR 7 Sumbagsel dan selesai dibangun pada akhir bulan April 2022.

Sungai Batanghari jadi saksi riwayat Jambi dari abad VII. Kunjungan Pendeta I-tsing dari China pada abad VII membuktikan posisi penting Jambi di masa lalu. Jambi pun disebut oleh pedagang asal Venesia, Italia, Marco Polo, tahun 1292.

Jambi berkembang pesat sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Salah satu komoditas terpenting saat itu adalah lada. Dari Kerajaan Melayu, Jambi beralih menjadi Kesultanan Jambi pada awal abad XVII.

Pada masa penjajahan, kepahlawanan Sultan Thaha Syaifuddin (1816-1904) sangat dihormati sebagai pahlawan yang berjuang melawan hegemoni kolonial Hindia Belanda. Pasca-kemerdekaan, tahun 1957, Jambi menjadi provinsi otonom.

KOJK Jambi lahir pada awal 2014 bersama kantor-kantor lain yang mengawali kehadiran OJK di seluruh Indonesia. Setelah berada di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, pada tahun

KOJK Jambi saat ini yang masih menyewa gedung sampai tahun 2023.



2016 KOJK Jambi menyewa bangunan dua lantai di Jalan Prof Dr Soemantri Brojonegoro Nomor 12 A, Kota Jambi. Lokasinya berada sekitar tiga kilometer dari Kantor Gubernur Jambi. Pada 18 April 2017, kantor itu diresmikan oleh Gubernur Jambi. Hadir pula pada acara peresmian itu Kepala KOJK Jambi Darwisman dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto.

Sementara masih menyewa hingga tahun 2023, KOJK Jambi telah mendapatkan tanah kosong di Jalan Prof Dr Sri Soedewi, Kota Jambi, seluas 1.915 meter persegi. Lokasi ini dekat dengan rumah dinas Wali Kota Jambi. Rancangan *basic design* gedung KOJK Jambi yang baru telah diselesaikan dengan memperhatikan kebutuhan ruang dan filosofi bentuk arsitektur Gedung OJK.

Gedung OJK Jambi baru dirancang setinggi lima lantai dengan luas lantai keseluruhan 3.335 meter persegi, termasuk ruang terbuka. Fasad menam-

pilkan Menara Integritas dengan *three red lines* yang mengelilingi bagian atas bangunan. Arsitektur KOJK Jambi menggunakan langgam modern kontemporer yang memakai *glass curtain wall*, dipadukan dengan bahan penutup batu bata (dipasang kering/*dry construction*) pada sebagian Menara Integritas dan bidang luar dinding *core*—serupa dengan tampilan pada permukaan candi-candi di Muaro Jambi. Bagian *core* diposisikan di sisi samping bangunan yang menghadap barat laut. Dalam rangka mendukung konservasi energi dan air, gedung KOJK Jambi dirancang untuk memenuhi sertifikat Silver dari Green Building Council Indonesia (GBCI).

Kanopi kaca menaungi pengunjung saat masuk ke lobi di lantai satu. Di lantai ini disiapkan ruang layanan publik di bagian muka dan bagian servis di belakang, termasuk beberapa tempat parkir mobil di bawah gedung. Di lantai dua—dapat dicapai dengan Tangga Mulia di lobi—dipastikan ruang auditorium untuk kegiatan edukasi dan literasi. Lantai tiga dan empat akan dipakai untuk ruang kerja, ruang pimpinan, mushala, perpustakaan digital, ruang arsip, ruang rekreasi, dan lain-lain.

Penataan ruang dalam tidak dibuat terlalu formal agar suasana kerja cocok dengan nuansa kekinian, tanpa kehilangan fokus dan

tetap dapat menjaga semangat kerja. Kebutuhan penyandang disabilitas dan ibu menyusui juga diakomodasi. Di lantai teratas terletak ruang serbaguna yang luas.

Halaman depan dapat dimanfaatkan untuk lapangan upacara. Tempat parkir disediakan untuk mobil, motor, dan sepeda. Gedung KOJK Jambi tampil ramah, terbuka, dan tetap menjaga kewibawaannya tanpa harus terkesan kaku.

KOJK Jambi senantiasa bekerja keras menjalankan tugas dan wewenang OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi pemangku kepentingan serta masyarakat industri jasa keuangan. Jika gedung yang baru terlaksana dibangun, kehadiran OJK di Jambi akan menguat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada integritas dan keseriusan OJK.



Bengkulu merupakan tempat pengasingan Soekarno atau Bung Karno (1938-1942), yang kemudian menjadi Presiden pertama RI. Saat pengasingan oleh penguasa kolonial Hindia Belanda itu, Bung Karno bertemu dan menikahi Ibu Fatmawati yang memang kelahiran Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu ini juga, orang Inggris pertama kali menemukan bunga yang sangat indah, dinamai *Rafflesia arnoldii*.

Kekuatan ekonomi Bengkulu di masa lalu bertumpu pada perdagangan lada, lalu hasil tambang emas dan perak di Rejang Lebong. Dewasa ini, Bengkulu sangat mengandalkan bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai basis ekonominya.

Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai beroperasi di Bengkulu, melayani kebutuhan masyarakat di bidang industri jasa keuangan. Saat itu, OJK menggunakan lantai dua Gedung Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu hingga akhir Desember 2015. Untuk lebih mandiri, OJK memutuskan pindah ke gedung yang disewa dari PT Danmar Explorindo di Jalan Citandui Nomor 8 sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Peresmian berlangsung pada 4 April 2016, dilakukan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK 2012-2017 Muliawan D Hadad.

Pucuk dicinta ulam tiba, atas izin Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, pada 3 Februari 2020 OJK me-

nerima pinjaman gedung dan tanah di Jalan Pembangunan Nomor 4, Kota Bengkulu. Gedung yang semula dipakai Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Provinsi Bengkulu ini akan dijadikan Kantor OJK Bengkulu sampai tahun 2025.

Bangunan tersebut terletak di kawasan perkantoran, hanya berjarak 1 kilometer dari Kantor Gubernur Bengkulu. Benteng Marlborough yang terkenal berada sekitar 5 kilometer arah barat laut. Bangunan lama itu didirikan tahun 1991, terdiri atas dua lantai, beratap genteng dengan bentuk atap serupa dengan rumah adat Bengkulu. Karena profil tanahnya menurun di sisi belakang, fasad bangunan hanya terlihat satu setengah lantai saja dari sisi jalan.

Saat kegiatan penataan, perubahan ruang luar sangat dibatasi sehingga *hardscape* berupa *paving block* tetap mendominasi halaman. Beberapa lokasi diupayakan dapat diberi *softscape* (penghijauan) agar mengurangi kesan kering dan panas. Aksen warna merah sesuai warna korporasi OJK diterapkan secara terbatas agar muncul identitas OJK tanpa mengusik keutuhan bangunan lama.

Dengan fasilitas ruang layanan publik yang memadai, ruang kerja yang modern, ruang serbaguna yang luas, dan fasilitas parkir yang cukup, OJK Bengkulu siap memberikan layanan terbaik untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan dalam rangka membangun industri keuangan yang sehat, khususnya di "Bumi Rafflesia".



Lampung memiliki posisi penting dalam perdagangan rempah-rempah yang memakai jalur pelayaran di Selat Sunda. Perlawanan heroik Radin Inten II (1834-1856) pada kekuasaan penjajah di pertengahan abad XIX membuktikan ketangguhan orang-orang Lampung mempertahankan kedaulatannya. Sejak awal abad XX, bermula di Gedong Tataan, daerah Lampung menjadi lokasi tujuan transmigrasi untuk orang-orang dari Pulau Jawa.

Sejak awal tahun 2014, KOJK Lampung yang bekerja di bawah Kantor Regional 1 Jakarta telah beroperasi. Mula-mula insan OJK Lampung menempati bagian dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung. Tak lama kemudian, pada 26 Oktober 2015, KOJK Lampung pindah ke Jalan Way Sekampung Nomor 9, Bandar Lampung. Peresmian dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Rahmat Waluyanto dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Gedung sewa yang berjarak kira-kira 3,5 kilometer dari kantor gubernur itu semula berfungsi sebagai gedung olahraga dan pusat kebugaran.

Saat ini Kantor OJK Lampung memiliki ruang kerja pegawai di lantai satu dan dua dengan luasan yang kurang memadai dibanding perkembangan struktur organisasi, jumlah pegawai serta volume kegiatan yang terus meningkat. Tersedia pula tiga ruang rapat dengan kapasitas berbeda-beda untuk keperluan yang beragam. Fasilitas yang belum me-

Gedung sewa KOJK Lampung yang semula digunakan sebagai gedung olahraga dan pusat kebugaran.

madai tidak menghalangi kegiatan insan OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan di Lampung. Pada saat waktu sewa habis di pertengahan 2023, diharapkan pembangunan gedung baru di Jalan Diponegoro dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Rancangan *basic design* untuk gedung Kantor OJK Lampung yang baru telah disiapkan. Massa bangunan disesuaikan dengan bentuk tanah yang melebar di bagian belakang. Bagian *core* berada di sisi samping yang akan lebih sering terpapar cahaya matahari menjelang terbenam. Di atas tanah seluas 3.350 meter persegi, bangunan akan tampil sesuai ciri khas dan atribut Gedung OJK, yaitu memiliki Menara Integritas dan *three red lines* yang mengelilingi bagian atas bangunan. Fasad bangunan akan memiliki *catwalk* keliling yang berfungsi ganda: sebagai jalur perawatan *glass curtain wall* ketimbang memakai gondola dan dapat mengurangi paparan cahaya matahari ke permukaan bangunan.

Sesuai rencana kebutuhan ruang, bangunan terdiri atas lima lantai. Luas total 3.812 meter persegi, termasuk untuk ruang mekanikal, elektrik, dan *plumbing* serta ruang terbuka. Lantai satu berisi lobi, ruang duduk (*lounge*), ruang SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), ruang mediasi, dan klinik. Untuk mencapai lantai dua dapat menggunakan



Tangga Mulia di lobi utama. Di lantai dua terdapat auditorium, perpustakaan digital, ruang rapat, ruang *fit & proper test*, dan mushala.

Lantai tiga diperuntukkan sebagai ruang kerja yang dilengkapi ruang olahraga, ruang rekreasi, ruang kerja komunal, dan lain-lain. Lantai empat sepenuhnya didedikasikan untuk ruang kerja, termasuk ruang kerja pimpinan. Sementara ruang serbaguna (*ballroom*) dan ruang duduk VIP berada di lantai teratas.

Nuansa modern kontemporer dengan sentuhan motif kain tapis Lampung merupakan tema yang diusung ke bagian-bagian penting ruang dalam, salah satunya Dinding Identitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa *ramp* dan toilet akses akan menyempurnakan keandalan bangunan.

Halaman depan disiapkan untuk lapangan upacara dengan tiang bendera setinggi 8 meter. Penataan lanskapnya akan mengedepankan suasana terbuka, asri, sejuk, dan teduh. Di samping tempat parkir untuk mobil dan sepeda motor, disediakan pula tempat parkir sepeda secukupnya.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, kehadiran KOJK Lampung yang lebih permanen tentu akan menguatkan kepercayaan masyarakat kepada OJK. Hal itu juga akan meningkatkan kualitas kinerja insan OJK dalam upaya membangun industri jasa keuangan yang sehat di Lampung.

Dengan moto khas Lampung, *wat sakai, wat munih sambayan* (ada tolong-menolong, ada gotong royong), harapan dan cita-cita pemulihan ekonomi di Lampung tentu akan segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.



1



2



3

**Main entrance (1),
catwalk untuk
maintenance dan
cleaning (2),
konsep Dinding
Identitas dengan
motif kain tapis
Lampung (3),
rancangan gedung
KOJK Lampung (4).**



4

Saat Kopi Mulai Disajikan

Negosiasi dengan pemilik tanah memiliki aneka pengalaman, baik yang akhirnya berhasil maupun berujung tidak ada kesepakatan.

Ketika mencari tanah di Kota Solo, Jawa Tengah, dari berbagai alternatif tanah yang ada, akhirnya pilihan jatuh pada tanah di depan Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Laksono Dwionggo, yang saat itu menjabat Kepala KOJK Solo dengan gigih mendekati pemilik dua bidang tanah dalam satu area itu. Bidang tanah pertama dimiliki sembilan ahli waris dengan usia termuda 65 tahun. Sementara bidang tanah yang satunya juga dimiliki ahli waris dari kedua orangtua yang sudah meninggal.

Negosiasi, setelah penelusuran dan keabsahan hukum sebagai ahli waris pemilik yang dilakukan Dian Andriani, Direktur DLOG. Anto Prabowo, sebagai PPK yang ikut memantau, sempat waswas karena negosiasi alot, berjalan seharian sehingga muncul kekhawatiran. Ia mewanti-wanti, jangan sampai membuat bapak dan ibu yang sepuh terganggu kesehatannya. Melegakan, akhirnya ada kesepakatan. Tim OJK juga belajar, para bersaudara sangat kompak dan uang

hasil penjualan akan mereka gunakan untuk ibadah haji. Semoga terlaksana dan menjadi haji yang mabrur.

Negosiasi tanah juga ada yang harus melibatkan insan OJK yang juga putra daerah. Ini terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketika harga dari pihak *appraisal* (penilai) di bawah harga penawaran pemilik, negosiasi sempat *deadlock*. Langsung Ketua Dewan Komisiner OJK meminta bantuan Sarwono dan Sukro Tratmojo, keduanya Deputy Komisiner OJK, sebagai putra daerah yang terpanggil ikut negosiasi. Kantor OJK harus pindah karena lokasi kantor lama berdekatan dengan tempat hiburan malam dan sering didatangi ular.

Sarwono pun bertemu dengan pemilik, Ali Basalamah. Awalnya ditanggapi dingin. Akan tetapi, setelah bicara dan menjelaskan apa itu OJK dan kaitan dengan peran membangun ekonomi bangsa, Ali mulai luluh. Hidangan makanan ringan dan kopi mulai disajikan. ia kemudian mengatakan semua terserah OJK dan bersedia tanahnya dibeli sesuai *appraisal*.

Proses negosiasi pembelian tanah untuk KOJK Solo bersama Kepala KOJK Solo Laksono Dwionggo (kedua dari kanan).



Saat kesepakatan ditandatangani, Ali memberikan komentar yang membesarkan hati insan OJK. Sebagai pengusaha properti, ia sebagai pemilik tanah mengatakan sangat bangga dan hormat kepada OJK karena tidak dikutip uang sepeser pun. Ia juga mengakui bahwa pegawai OJK sangat menjaga integritas dalam setiap tahapan sampai dengan pembayaran. Semuanya dibayar utuh dan berlangsung cepat.

Namun, tidak semua negosiasi pembelian tanah berujung sukses. Sebabnya, selain ketidakcocokan harga, ternyata ada pilihan tempat yang lebih strategis atau juga kepemilikan terkendala masalah hukum. Kadang kala, meskipun sudah ada kesepakatan, akhirnya batal karena Anggota Dewan Komisiner (ADK) sebagai penentu akhir tidak menyetujuinya.





Indonesia Financial Center (IdFC) di Jakarta

IdFC

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan pembangunan gedung Kantor Pusat di Jakarta. Selama ini, Kantor Pusat OJK masih menempati Menara Radius Prawiro di Kompleks Bank Indonesia dan Gedung Soemitro Djojohadikusumo milik Kemenkeu. Selain itu, beberapa satuan kerja masih menyewa gedung milik swasta. Dipikirkan untuk membuat Kantor Pusat OJK.

Untuk membangun tanpa mengganggu APBN, telah dibuat nota kesepahaman antara OJK dan Kemenkeu untuk membangun Kantor Pusat OJK yang terintegrasi dengan kegiatan Kantor Kemenkeu. Tanah yang digunakan adalah tanah milik Kemenkeu di Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 1, yang disebut dengan Indonesia Financial Centre (IdFC). Di lokasi tersebut akan dibangun dua menara masing-masing berlantai 60 untuk OJK dan Kementerian Keuangan. Pencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilakukan pada tanggal 2 April 2019 oleh Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur DKI Jakarta dengan target selesai Juni 2022.

Maket rancangan IdFC dari para konsultan yang diundang oleh OJK.



Suasana FGD pembangunan IdFC.



Tantangan

Dari sisi Departemen Logistik (DLOG) OJK, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena DLOG belum cukup pengalaman membangun *high-rise building*. Oleh karena itu, berkali-kali diadakan *focus group discussion* (FGD) dengan mengundang para pakar, praktisi konstruksi, dan pejabat Pemprov DKI. Selain itu, DLOG juga melakukan studi banding ke proyek pembangunan *high-rise building* dan ke instansi yang telah menerapkan konsep *flexible office* dan *green building*. Agar bisa menerapkan tata kelola yang baik, DLOG juga meminta masukan lewat FGD dengan instansi pemerintah seperti Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kejaksaan Agung, serta auditor internal OJK dan auditor eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berbagai kajian teknis dan konsep perencanaan itu telah dimulai 2019, termasuk cara pendanaannya yaitu dengan *turn key system*. Bukan hal yang mudah memang membangun dua menara yang termasuk bangunan *supertall building* pertama di Indonesia. Harapannya, seluruh proses dilaksanakan oleh arsitek dan ahli teknik putra bangsa Indonesia.

OJK memilih konsep pembangunan *design and build*. Dengan konsep ini, tahap perancangan dan tahap konstruksi berada di satu pihak, yaitu kontraktor. Hal ini berbeda dengan cara konvensional di mana kedua tahap tersebut berada di dua pihak yang berbeda, yaitu konsultan perancang

dan kontraktor. Walaupun demikian, karena harus mendapatkan gedung kantor dan ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhannya, maka OJK menyiapkan *basic design criteria* berupa kisi-kisi pedoman pengembangan rancangan multidisiplin dan dilengkapi dengan gambar-gambar skematik.

Penetapan cara konstruksi *design and build* dilakukan oleh OJK dengan pertimbangan matang karena dapat mempercepat waktu pelaksanaan keseluruhan. Selain itu, kemudahan pengendalian kontrak pekerjaan, dan dapat dinilai sesuai dengan sistem penganggaran OJK.

Pokok-pokok dalam *basic design criteria* diatur lengkap dan komprehensif dalam rangka mendapatkan karya bangunan yang memenuhi kebutuhan kerja OJK saat ini dan masa mendatang. Konsep meliputi aspek arsitektur, sistem struktur bangunan, sistem mekanikal/elektrikal, tata ruang dalam, prinsip bangunan berkelanjutan (*green and sustainable building*), sistem teknologi informasi, serta keandalan bangunan.

Untuk dapat menyusun rancangan skematik dengan kriteria lengkap tersebut, OJK menyelenggarakan seleksi dengan mengundang lima konsultan terkemuka di Indonesia. Konsultan yang kemudian terpilih berdasarkan penilaian proposal desain yang ketat dan obyektif adalah PT Airmas Asri. Pihak Airmas Asri mendapat kepercayaan untuk menyusun rancangan skematik sebagai bagian dari *basic design*.

Kegiatan tahap perencanaan dapat diselesaikan pada awal tahun 2020 disusul dengan kegiatan persiapan tender. Sampai dengan awal Maret 2020 dokumen pengadaan telah diselesaikan dan siap dilaksanakan tender. Sayangnya, waktu ini bersamaan dengan maraknya pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga pembangunan terpaksa ditunda terutama untuk kajian yang terkait dengan aspek pendanaan proyek sehubungan dengan anggaran OJK.

**IDFC DIHARAPKAN
BISA MENJADI SIMBOL
KEGIATAN PEREKONOMIAN
INDONESIA YANG
STABIL DAN
BERKELANJUTAN.**

Konsep Gedung IdFC

Walau belum bisa diwujudkan, ada beberapa aspek dari IdFC ini yang sekiranya bisa menjadi gambaran.

Pertama, sebagai salah satu bangunan yang tertinggi di Jakarta IdFC diharapkan dapat menjadi ikon baru di kawasan Jalan Sudirman. Tidak itu

saja, IdFC diharapkan bisa menjadi simbol kegiatan perekonomian Indonesia yang stabil dan berkelanjutan.

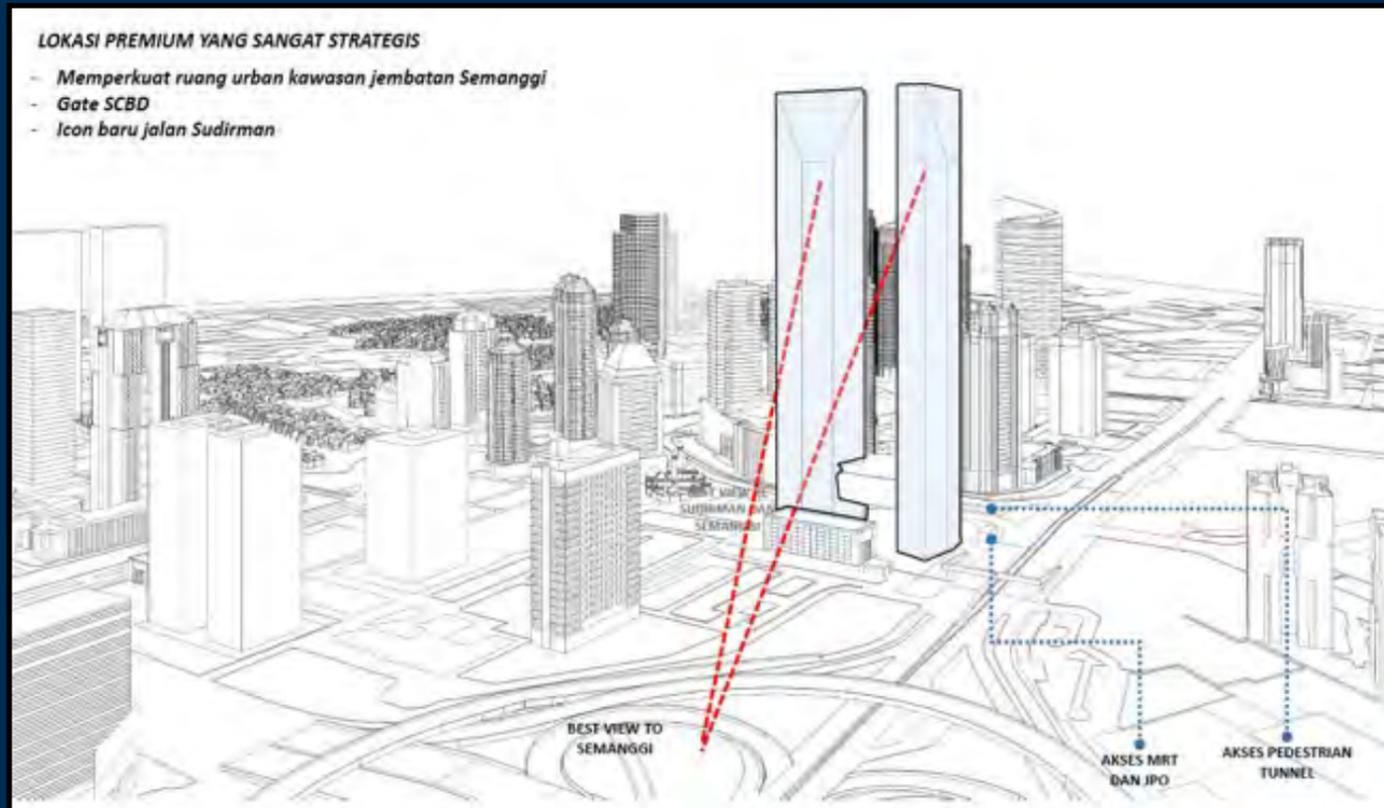
Menara kembar IdFC berada di pintu masuk distrik bisnis SCBD berdampingan dengan beberapa ikon Jakarta, yaitu Simpang Susun Semanggi dan Gelora Bung Karno. Dengan posisi tersebut dan ketinggian 305 meter, IdFC menjadi simbol ekonomi Indonesia di sektor jasa keuangan yang modern dan dinamis. Selain itu, IdFC juga memperkuat ruang urban kawasan Jembatan Semanggi.

Kedua, dua Menara IdFC yaitu OJK dan Kemenkeu dihubungkan dengan podium yang berfungsi sebagai *ballroom*. Setiap menara mengakomodasikan fungsi publik dan semipublik pada bagian bawah, ruang kantor, dan *observation deck* pada lantai teratas. Konsep massa bangunan Menara IdFC merupakan komposisi dua massa yang identik yang dikomposisikan secara dinamis dan seimbang. Kedua menara menampilkan preseden arsitektur vernakular Indonesia: kepala, badan, dan kaki.

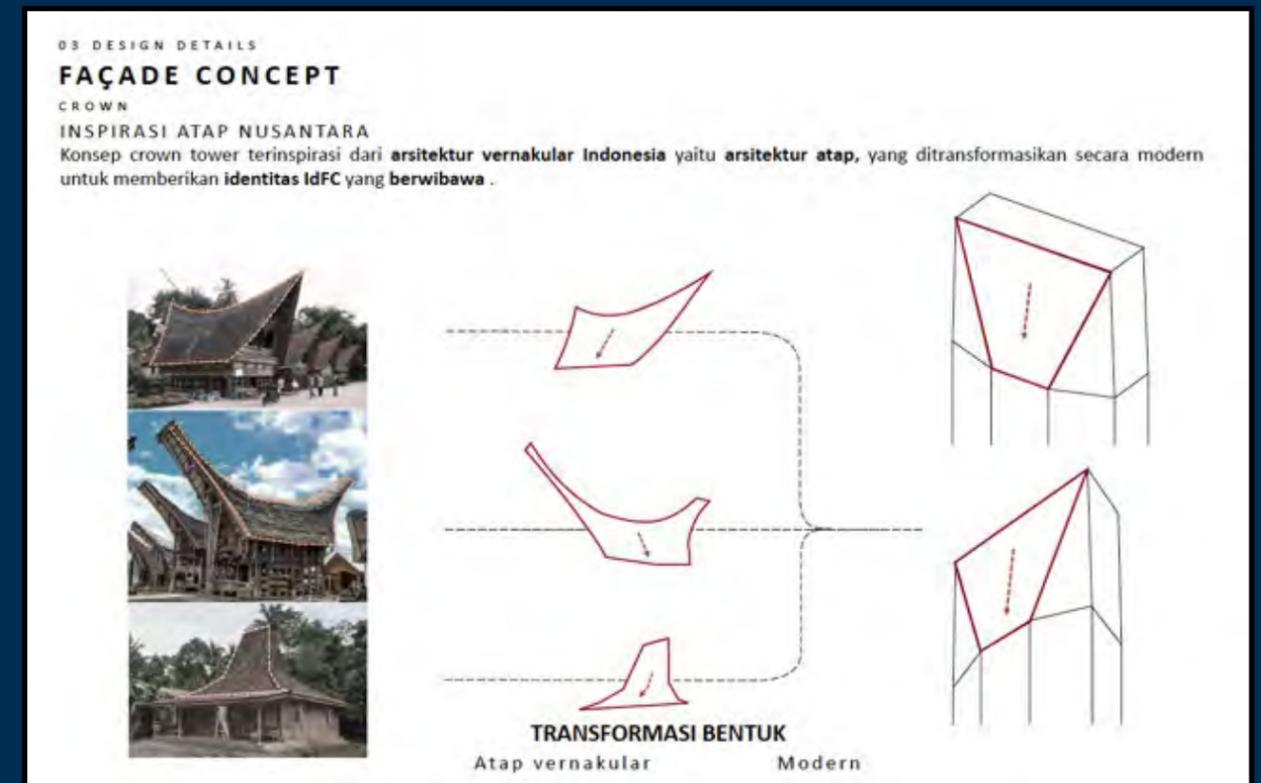
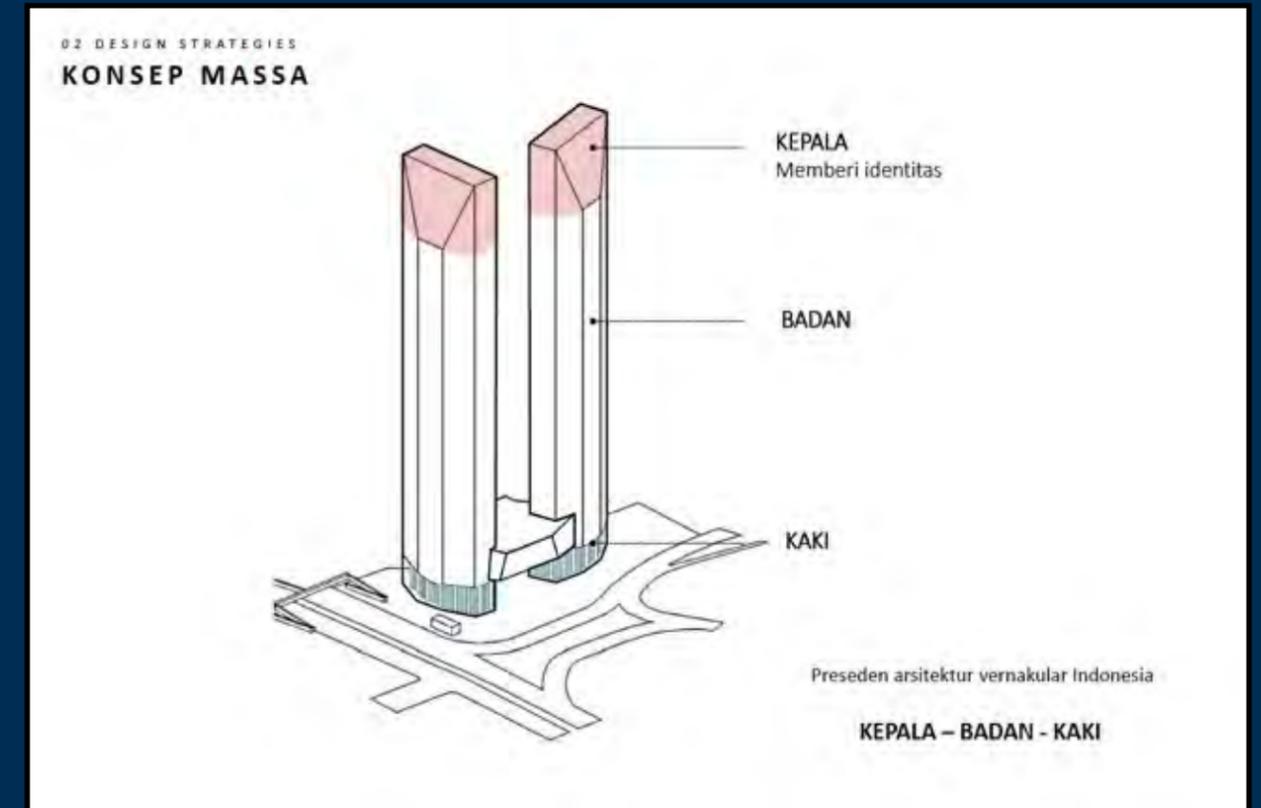
Ketiga, mempertimbangkan lokasi IdFC yang sangat strategis dan premium, maka kompleks IdFC dirancang dengan mengedepankan konsep *The Living Room of Jakarta*. Masyarakat Jakarta dapat menikmati ruang urban pada area publik seperti plaza utama dan *podium roof garden*, sementara tamu dan karyawan dapat menikmati *view* dan suasana kota Jakarta dari lobi, *sky space*, *sky lounge*, dan *observation deck*.







Keempat, fasad menara dirancang dengan menampilkan sosok bangunan modern di mana pengakhiran menara membentuk “crown” yang diilhami oleh arsitektur vernakular Indonesia yang memberi penekanan pada bentuk atap. Transformasi bentuk atap vernakular menjadi bentuk yang lebih modern. Hal ini merepresentasikan transformasi lembaga OJK untuk dapat memajukan perkembangan industri jasa keuangan. Di bawahnya terdapat *three red lines* melingkari badan menara sebagai simbol tugas yang diemban OJK. Untuk mempertegas karakter modern pada fasad bangunan ini dipasang lampu eksterior yang memberi aksentuasi kuat sosok menara. Pada area *crown* diberi pencahayaan agar dapat memberi efek perubahan warna bila dilihat dari beberapa sudut agar dapat menghadirkan menara yang ikonik di langit Jakarta di malam hari.





1



2

Entrance dari arah Sudirman (1), amphitheatre (2), masjid (3), lobi (4).



3

Kelima, konsep desain interiornya menggunakan konsep *smart office* dengan tujuan menciptakan sistem dan suasana kerja yang dapat meningkatkan kenyamanan kerja dan produktivitas karyawan. Selain itu, diterapkan konsep *flexible office* yaitu ruang kerja kantor yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan akan variasi atau perbedaan kebutuhan pelaksanaan jenis pekerjaan yang berbeda.



4



Keenam, konsep IdFC menggunakan konsep *green building* yang merencanakan suatu bangunan yang ramah terhadap lingkungan. Sebagai suatu lingkungan buatan, arsitektur menara IdFC dirancang dengan melalui tahapan amdal. Dengan demikian, *output* perencanaan tersebut dapat memberi pengaruh secara positif pada lingkungan sekitar.

Tujuan utama perencanaan bangunan yang memiliki konsep *green building* adalah meminimalkan dampak yang disebabkan oleh bangunan tersebut. Upaya minimalisasi dampak negatif itu dimulai sejak tahap perencanaan dan selama pelaksanaan sampai dengan penggunaannya. Konsep *green building* juga mencakup langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, mudahnya angin dan sinar matahari masuk ke dalam bangunan.

Selain segi operasional, segi pelaksanaan juga harus diperhatikan. Seluruh aspek perencanaan baik arsitektur, struktur dan mekanikal elektrik dirancang sesuai dengan kriteria *green building* dengan target Platinum.

Sky lobby (5), drop off area (6), observation deck (7), potongan observation deck (8).





Gedung OJK di Ibu Kota Nusantara

Rancangan Gedung OJK di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Rencana Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun ibu kota negara yang baru semakin mendekati kenyataan. Ibu kota akan berpindah ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Persiapan pemindahan ini terus dimatangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Persiapan tersebut telah dimulai dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara serta membuat rencana induk dan desain kawasan.

Sebagai bagian dari lembaga negara dan dalam rangka melengkapi fasilitas regulator sektor keuangan di ibu kota baru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan rancangan Gedung OJK. Gedung di Penajam Paser Utara ini dirancang untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan OJK dan dapat mendukung kegiatan pelayanan publik.

Di sisi lain, secara konsisten OJK tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan dengan menargetkan gedung kantor ini memenuhi sertifikat GreenShip peringkat Gold dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Ketua Dewan Komisiner OJK dan Menteri Keuangan telah menyampaikan rancangan gedung kantor tersebut kepada Presiden Republik Indonesia.

Kehadiran Gedung OJK di lokasi baru ibu kota negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menampilkan citra kewibawaan lembaga sekaligus keterbukaan dalam melayani publik, *open to public, close to the people*. Rancangan keberadaan Gedung OJK ini selaras dengan gagasan lingkungan ibu kota negara yang mengedepankan identitas bangsa serta keberlanjutan dan kesiapan terhadap perkembangan teknologi.

Rancangan Gedung OJK disiapkan sebagai sebuah sistem bangunan yang mempunyai fleksibilitas menghadapi perubahan cara bekerja dan layanan publik pada masa mendatang, yang diyakini akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.





Desain interior ruang SLIK (1), perpustakaan digital (2), lobi (3), dan auditorium(4).

Kehadiran OJK di lokasi ibu kota baru diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan baik secara nasional maupun lokal setempat. Rancangan Gedung OJK juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada lingkungan melalui keseimbangan antara lingkungan buatan dan alam, keterhubungan ruang dalam dan ruang luar, serta kehadiran elemen-elemen alam di antara ruang-ruang fungsional.

Intervensi terhadap lingkungan alam diupayakan seminimal mungkin dan bangunan hadir sebagai harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Gedung OJK di Penajam Paser Utara akan menjadi bagian utuh dengan bentang alam yang ada melalui perhatian terhadap sejarah, budaya, dan kondisi lingkungan setempat.

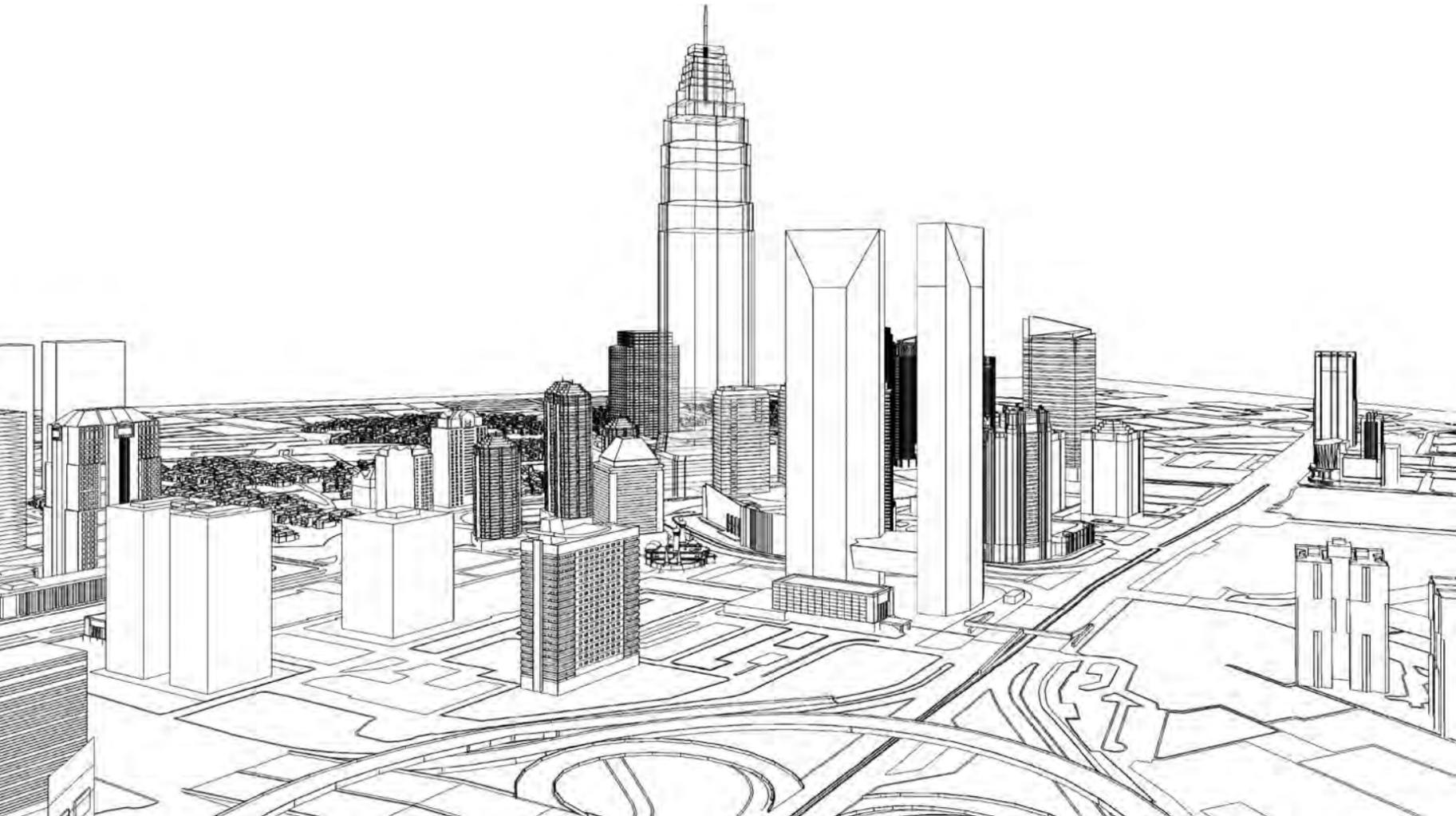
KEHADIRAN OJK DI LOKASI IBU KOTA BARU DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN BAIK SECARA NASIONAL, MAUPUN LOKAL, SETEMPAT.



**Menuju
Indonesia
2045**

**Sesarengan Gumregah,
Sesarengan Jumangkah**

CEKON



Melangkah Maju Mengarungi Tantangan

Masa depan adalah sebuah tantangan karena ketidakpastian yang menyertainya, diwarnai kesempatan dan perubahan. Teknologi tentunya menjadi *game changer*. Digitalisasi menuntut transformasi di berbagai lini, termasuk dalam diri Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak tahun 2017, OJK telah mencanangkan percepatan transformasi bisnis sektor jasa keuangan nasional ke arah digital yang mencakup industri keuangan *unicorn* hingga UMKM di pelosok Indonesia.

Di sisi lain, perubahan iklim juga menuntut sektor keuangan berperan penting dalam memfasilitasi dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan melalui pembangunan rendah karbon. Untuk itu, OJK menyiapkan *road map* keuangan berkelanjutan 2021-2025 guna menghadapi perubahan iklim.

Di samping berbagai tantangan eksternal itu, OJK juga menghadapi tantangan internal. Harus diakui, eksistensi kelembagaan OJK di antaranya juga terkait dengan ketersediaan sarana fisik dalam melaksanakan tugasnya. Diperlukan simbol kehadiran lembaga ini berupa *tetenger* yang secara fisik mudah dikenali masyarakat berupa bangunan Gedung OJK.

Namun, gedung itu juga harus memenuhi berbagai dinamika yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, bahkan juga dampak pandemi Covid-19

yang mengguncang gaya hidup dan aktivitas bekerja. Hal lain yang digarisbawahi adalah kebutuhan untuk menjaga kualitas lingkungan. Bab yang menjadi penutup buku ini mencatat beberapa tantangan bagi OJK di masa depan.

Gedung Kantor Pusat OJK

Sebuah lembaga membutuhkan tempat untuk melaksanakan tugasnya. Lebih dari itu, Gedung OJK adalah simbol kehadiran lembaga tersebut di masyarakat. Bangunan merupakan eksistensi kelembagaan dan mencitrakan OJK sebagai lembaga yang mengabdikan kepada masyarakat. Gedung Kantor Pusat Jakarta (ataupun di IKN Nusantara) perlu segera dipastikan kembali perencanaan dan tahap pelaksanaannya yang tertunda karena merebaknya pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

Sebagai sebuah bangunan wadah bekerja lembaga, gedung Kantor Pusat OJK harus tercipta dengan baik, modern, dan terkini untuk menghasilkan produktivitas dalam pengabdian kepada masyarakat. Beberapa fasilitas terkait dengan pengelolaan sistem informasi meliputi *data centre* dan *business resumption site* sebagai pendukungnya perlu dipenuhi secara optimal. Kiranya Dewan Komisiner OJK selalu berusaha untuk dapat segera melengkapi sarana kerja sesuai dengan kemampuan keuangan dan alokasi anggaran yang tersedia.

**BEBERAPA FASILITAS TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MELIPUTI
DATA CENTRE DAN BUSINESS RESUMPTION SITE
SEBAGAI PENDUKUNGNYA PERLU
DIPENUHI SECARA OPTIMAL.**

Menyikapi era normal baru

Setelah dua tahun lebih harus bekerja dengan cara WFH (*work from home*) atau hibrida WFH-WFO (*work from office*) karena pandemi Covid-19, saat ini hampir dicapai *herd immunity*. Pembatasan kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan oleh pemerintah dan kegiatan dengan banyak orang di ruang terbuka, seperti *car free day*, diadakan kembali.

Namun, kebiasaan baru bekerja dengan WFH atau hibrida mungkin akan berlanjut menjadi mekanisme baru. Moda ini menghasilkan fleksibilitas kerja yang lebih banyak dan hasilnya dinilai tetap produktif. Kalau hal ini dapat diterima oleh masyarakat dan hasilnya tetap dapat memberi manfaat banyak, WFH akan menjadi budaya kerja baru.

Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa WFO seperti semula akan kembali menjadi cara kerja normal. Cara kerja sebelum pandemi ini juga berpotensi menjadi penggerak geliat ekonomi yang dibutuhkan masyarakat setelah era pandemi. Dengan bekerja di kantor seperti biasa, akan ada kebutuhan transportasi; makan dan minum serta

para pedagangnya; dan jasa-jasa pendukung lain, seperti *cleaning service*, toko, dan tempat hiburan. Kedua cara kerja yang akan menjadi kebiasaan normal baru itu tetap menuntut perhatian pada aspek kebersihan dan kesehatan (*hygiene factors*), yang akan tetap kuat dan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyediaan ruang kerja dan gedung kantor.

OJK dengan program pengadaan gedung-gedung kantor sepatutnya memperhatikan tantangan tersebut. Baik pada perancangan gedung baru maupun penataan ulang ruang kerja, OJK sudah memperkenalkan pendekatan *flexible office space* melalui ruang kerja komunal berbasis *open plan*. Hal ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam penyediaan ruang kerja dan gedung kantor mendatang.

Tantangan berikutnya adalah konsisten menyiapkan dengan komprehensif *flexible office space*, yaitu memberikan fleksibilitas pada fungsi dan ukuran ruang serta melengkapi dengan ruang senyap (*quiet room to support communal working space*). Sebab, tetap diperlukan konsentrasi individual untuk menuntaskan banyak hal yang dibahas bersama secara terbuka.

Green building

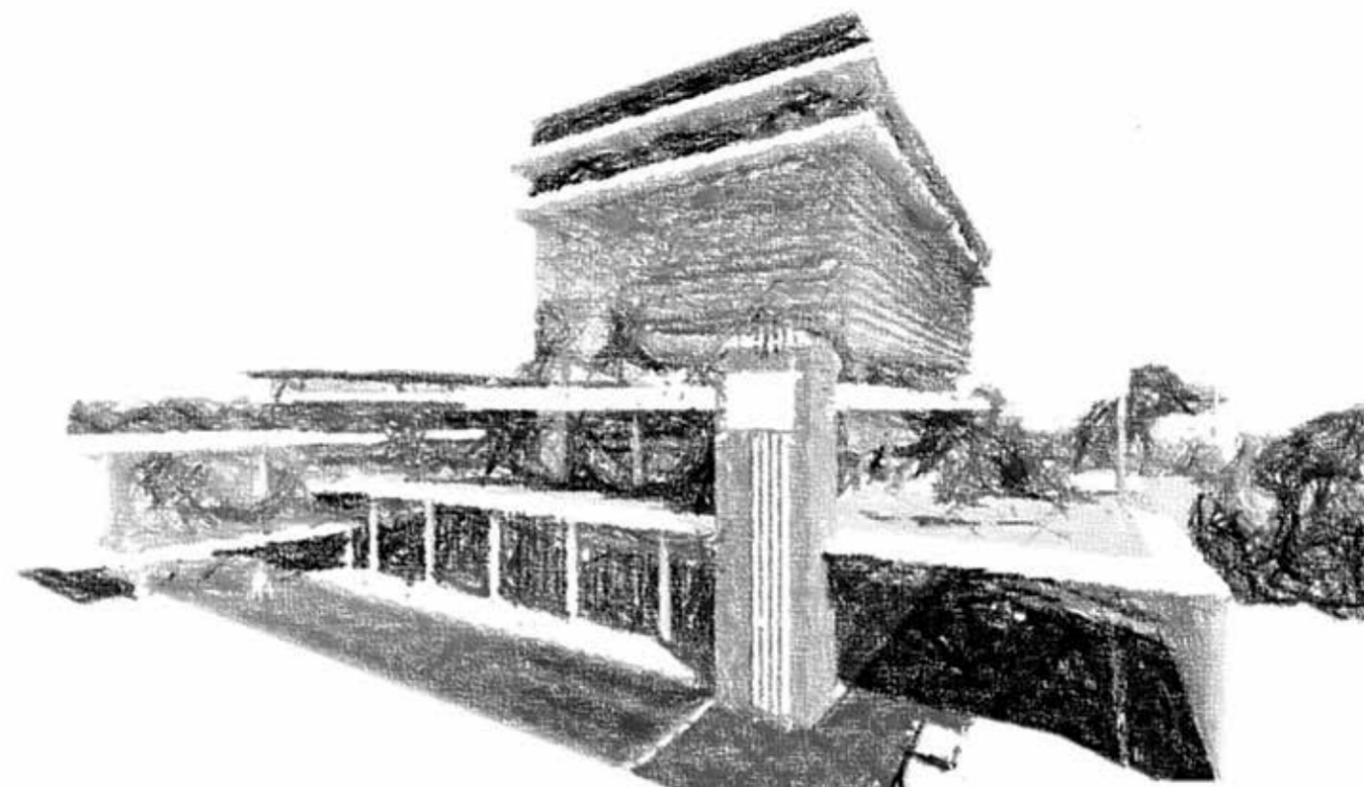
Tantangan lain terkait dengan kiprah lembaga OJK pada penyiapan ekonomi hijau. OJK berperan dalam penyusunan konsep Taksonomi Hijau, yaitu mewujudkan bangunan gedung kantor OJK yang hemat energi dan ramah lingkungan. Tantangan ini tidak sekadar dijawab dengan sertifikasi bangunan hijau, tetapi harus diwujudkan dalam *road map* infrastruktur OJK.

Ada empat hal pokok yang perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hasil akhirnya dapat menjadi bangunan berkelanjutan. Empat hal itu adalah gedung yang dapat menerapkan pemanfaatan cahaya matahari ke dalam gedung tanpa silau dan panas berlebihan, pemanfaatan air hujan, pendekatan aktif perancangan bangunan ramah

lingkungan, serta optimalisasi pencahayaan dan pendinginan gedung.

Persepsi ini perlu dimiliki dalam setiap perancangan Gedung OJK di kemudian hari. *Smart building* terutama tidak saja terkait dengan kenyamanan pengguna, tetapi juga sistem yang ada di baliknya, seperti sinkronisasi *water treatment plant* dan penggunaan *solar energy* untuk penghematan energi dalam bangunan.

Hal ini harus dimulai dari desain awal arsitektur yang menambahkan teknologi ke sistem bangunan. Yang perlu dicatat juga, penggunaan teknologi baru bukanlah solusi segalanya. Yang lebih penting adalah menggunakan pendekatan perancangan yang mendalam dalam mengurangi konsumsi energi.



Apa & Siapa



Anto Prabowo

Anto Prabowo adalah sosok yang menjadi jembatan antara keputusan strategis Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan departemen yang mengeksekusinya. Sebagai Deputy Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik, ia menerjemahkan idealisme Dewan Komisiner menjadi keputusan yang bisa dieksekusi dalam konteks tata kelola yang baik. Anto yang berlatar pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII) sebelumnya bekerja di Bank Indonesia. Seiring dengan dibentuknya OJK, Anto melanjutkan karirnya sebagai Direktur Pengaturan dan Kebijakan Perlindungan Konsumen (2013-2015), lalu Kepala Departemen Perlindungan Konsumen (2015-2017). Lalu menjadi pelaksana tugas (plt) deputy komisiner, dan mendapat kepercayaan menjadi deputy komisiner sejak 15 April 2018 – sekarang. Sejak 2021, Anto melanjutkan studi doktoral di Universitas Sebelas Maret Solo. Kandidat doktor ekonomi ini rupanya semakin melengkapi ilmunya sebagai *master of business administration* (MBA) di Aston Business School Birmingham, Inggris.



Didik Supriyadi

Sebagai Kepala Departemen Logistik, Didik Supriyadi menjadi sosok yang menjadi eksekutor dari semua kebutuhan logistik OJK, mulai dari gedung hingga berbagai fasilitas yang menyertainya. Hal ini tentu merupakan tantangan yang kompleks, tetapi juga menjadi elemen penting dalam OJK melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai undang-undang. Tidak saja cakupan wilayah yang luas, Didik juga bertemu dengan lebarnya rentang variasi dari Sabang sampai Merauke. Mempergunakan berbagai konsep dengan realitas dengan keterbatasan dan mencari kesempatan yang ada menjadi tugas pria yang tahun 2017 telah ditunjuk menjadi Kepala Departemen Logistik ini. Pria yang menempuh pendidikan sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Pancasila dan meraih gelar master di bidang manajemen keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta ini telah meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun pada tahun 2009.



Dian Andriani

Dian Andriani adalah sosok Direktur Perencanaan dan Pengembangan Logistik OJK. Dian yang menempuh pendidikan sarjana manajemen di Universitas Islam Indonesia dan master hukum bisnis di Universitas Padjadjaran tercatat memiliki nilai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas Dian tentunya tidak mudah. Dalam berbagai pengadaan logistik, terutama Gedung OJK dan fasilitasnya, Dian berupaya mendorong OJK terus mengikuti perkembangan. Sementara, banyak perkembangan yang terjadi belakangan ini. Tidak saja perkembangan kesadaran akan lingkungan dan teknologi yang selalu menjadi *game changer*. Akan tetapi, wabah Covid-19 juga telah mengubah cara bekerja dan pada akhirnya tentu juga mengubah fasilitas, tata ruang, dan tentunya gedungnya. Dian yang telah melalui pelatihan Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang Level Lanjutan Virtual tentunya banyak membuat inovasi terkait perencanaan dan pengembangan gedung-gedung OJK.



Taufik Andriawan

Taufik Andriawan selaku Direktur Pengadaan dan Manajemen Aset berada di garis depan pengadaan gedung-gedung OJK. Tugasnya mencakup proses pengadaan gedung baru, hingga pemeliharaan gedung-gedung yang sedang digunakan. Taufik bertanggung jawab atas segala aspek mulai dari aspek teknis hingga pelaksanaan tata kelola yang baik. Lulusan Master Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini juga pernah meraih penghargaan sebagai Insan OJK Terbaik tahun 2015. Taufik tidak saja berurusan dengan tumpukan dokumen di atas meja kerjanya. Ia juga sering turun ke lapangan untuk memastikan bahwa perencanaan dieksekusi dengan tepat di lapangan. Lulus sebagai sarjana ekonomi bidang manajemen dari Universitas Airlangga, Taufik masuk OJK di awal lembaga ini berdiri. Dari masa dinas selama kurang lebih sembilan setengah tahun, Taufik kini telah empat tahun sembilan bulan berkiprah di Departemen Logistik. Seluruh rentang waktu tersebut ia isi dengan kiprahnya sebagai direktur.

Tim Penulis



Bambang Eryudhawan

Lahir di Tokyo, 25 Desember 1962. Setelah lulus S-1 Arsitektur ITB (1988), ikut mendirikan Arsitek Muda Indonesia (1989) dan menerima Fulbright Scholarship (1993-1995) untuk sekolah di Washington University in St Louis (tidak selesai). Aktif di Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta (2001-2020), Tim Penasehat Arsitektur Kota DKI Jakarta (2004-2014), Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (2013-2018), dan Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta (2020-2023) serta ikut mendirikan Pusat Dokumentasi Arsitektur (2002). Di asosiasi profesi, pernah menjadi Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta (2000-2006) dan Wakil Ketua II Ikatan Arsitek Indonesia Nasional (2008-2011). Beberapa buku yang pernah ditulis: *100 Tahun Kebangkitan Nasional* (2008), *100 Tahun SD Kartini Semarang* (2013), *100 Tahun Sekolah Kartini Cirebon* (2016), dan *Sudut Pandang* (2017). Kini aktif di Dewan Arsitek Indonesia (2020-2025) sebagai *chairperson*.



Endy Subijono

Menyelesaikan sekolah di Departemen Arsitektur ITB dan sejak itu melakukan praktik arsitektur. Pada tahun 1992 bersama tiga rekan alumninya mendirikan biro arsitek Wastu Adi Olahrupa. Tahun 1999 mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah di Amerika Serikat, dan setelah kembali, bersama beberapa rekannya, mendirikan Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA). Mulai aktif membantu Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sejak awal tahun 90-an, kemudian terpilih menjadi Ketua IAI Jakarta tahun 1994 dan Ketua Umum IAI pada tahun 2008. Pengalaman ini membawanya menjadi Chairman IMC ASEAN MRA bidang arsitektur (2014) dan Vice President Architects Regional Council Asia (Arcasia) pada tahun 2015. Selain terlibat aktif pada penyusunan Undang-Undang Arsitek, juga menulis berbagai artikel dan buku tentang hal arsitektur dan dokumentasi arsitektur. Pada tahun 2020, dua bukunya yang ditulis bersama beberapa rekan kerja, *Sudut Pandang* dan *GBK Gelora Merawat Warisan Bangsa*, mendapat Penghargaan IAI Jakarta.



Pramudyarto Hadisubroto

Lahir di Solo, 10 Januari 1956. Lulus sarjana Teknik Arsitektur UGM bulan Mei 1983 dan melanjutkan ke Magister Ekonomi FEUI tahun 2004. Berkarir di Bank Indonesia sejak tahun 1985 di Departemen Logistik Bank Indonesia, ikut menangani pembangunan kompleks perkantoran BI Jakarta. Juga ikut menangani berbagai proyek Bank Indonesia seperti Museum Bank Indonesia dan Heritage BI serta gedung kantor perwakilan BI 2002-2012. Setelah pensiun dari Bank Indonesia tahun 2014, bekerja di bidang *project management* Bidakara Group. Sejak 2019 sampai 2022 menjadi Ketua Tim Advisor OJK untuk pembangunan gedung kantor OJK.

Tim Penasehat dan Tenaga Ahli



Arya Abieta

Lulus S-1 Arsitektur ITB (1981), karier sebagai arsitek profesional dimulai sebagai arsitek muda hingga menjadi Direktur Utama PT Wastu Adi Olahrupa yang bergelut di bidang arsitektur, perencanaan, teknik rekayasa dan konsultasi. Memegang sertifikasi profesional berupa Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan bidang Arsitektur Golongan A, dan memegang sertifikasi sebagai Arsitek Utama. Meminati bidang *heritage* dan konservasi, sempat menjadi penasihat Gubernur DKI untuk lingkungan dan konservasi gedung-gedung *heritage*. Saat ini menjadi Ketua Majelis Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, anggota Tim Ahli Bangunan Gedung - Arsitektur dan Perkotaan (TABG-AP) DKI Jakarta, dan Dewan Pimpinan dan Anggota Dewan Pakar Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI).



Bayu Setyo Utomo

Lulus S-1 Arsitektur ITB (1988), pria kelahiran Bandung 20 Juni 1962 ini melanjutkan ke University of Denver, Colorado, AS dalam studi Master of Real Estate and Construction Management (1991). Karier awalnya di berbagai perusahaan konsultasi properti seperti PT Redecon (1987-1989), Jones Lang Wootton (1991-199) dan Jones Lang Lasalle (2003-2008). Kariernya dilanjutkan di berbagai perusahaan pembangunan properti, seperti PT Peruri Property (2013-2016), PT Telkom Landmark Tower (2012-2017), dan kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Taspen Properti Indonesia sejak 2018. Berbagai pengalaman ini memupuk keahlian dan kemampuan dalam bidang investasi properti, pembangunan, manajemen dan optimalisasi aset.



Brahmastyo Puji

Berlatar sarjana arsitektur dari Universitas Parahyangan (2005-2010), Brahmastyo Puji melanjutkan pendidikannya di University of Melbourne mengambil Master Desain Urban. Tertarik pada desain urban sekaligus juga arsitektur *heritage*, banyak beraktivitas sebagai arsitek untuk kampung-kampung di Jakarta seperti Kampung Kali Apuran (2018), rumah contoh Kampung Tongkol (2015), dan taman bermain anak di Jakarta Timur (2017). Sebagai peminat arsitek *heritage*, menangani rehabilitasi rumah Raden Saleh (2016), bekas gedung Tjiptaniaga, Kota Tua Jakarta (2015), dan Museum Saijah Adinda di Lebak, Banten (2015). Beberapa penelitiannya mencakup "Mobilitas Urban dan Plastik di Jakarta dan Bandung" bersama Greenpeace (2017) dan studi tentang Superblok Nagoya, Jepang (2013).



Karnaya

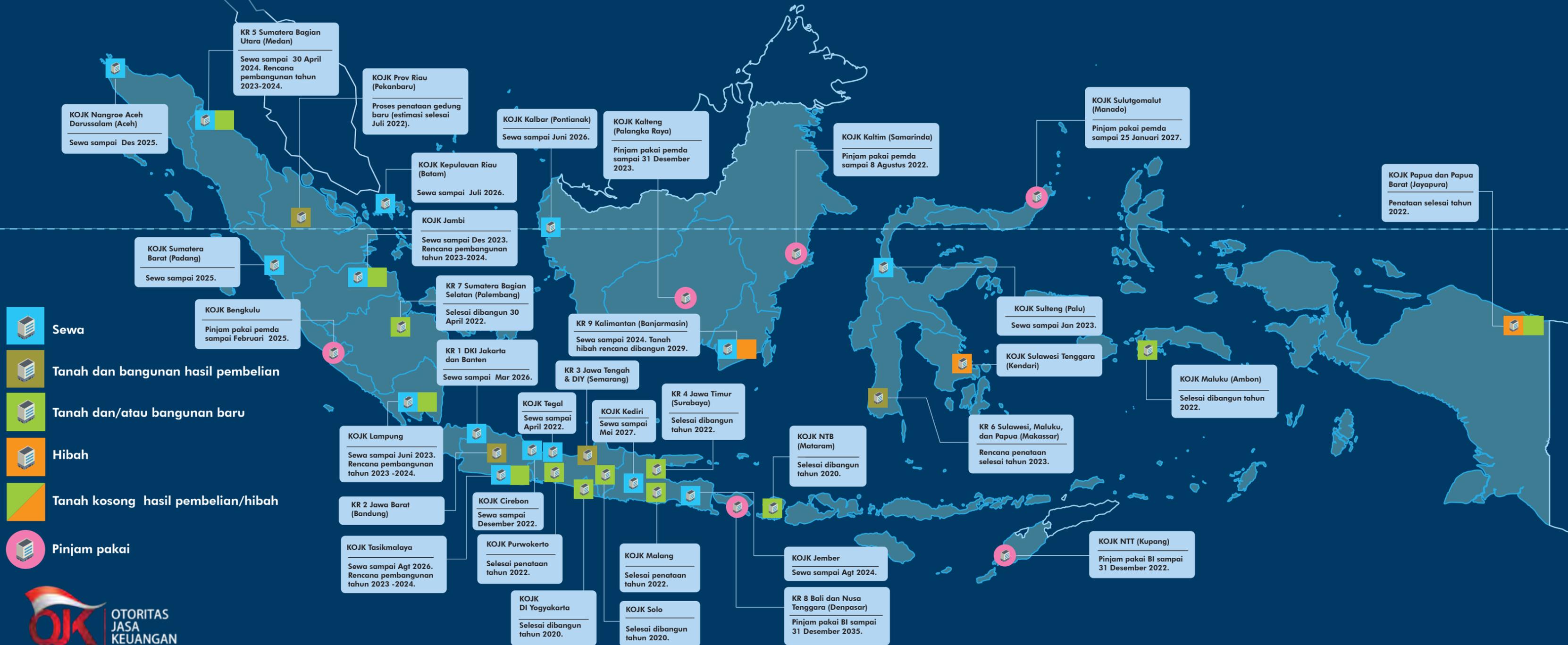
Alumnus Teknik Arsitektur ITB (1971), melanjutkan studi Master of Architecture di Urban Design, Harvard University, Cambridge, AS (1985). Arsitek senior ini telah merancang berbagai gedung seperti *master plan* kompleks Bank Indonesia Thamrin dan Gedung Twin Tower BI (1988-1999), Pasar Tanah Abang Blok A (2003), dan auditorium Universitas Jember (2016). Menjadi juri dalam berbagai sayembara di bidang arsitektur seperti tahun 2009 sebagai juri sayembara gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, dan tahun 2015 menjadi juri sayembara gedung ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta. Saat ini aktif sebagai direktur di Arservo Design Consultant dan Anggota Dewan Arsitek Indonesia.



Sindhu Rudianto

Lahir di Jember, 31 Oktober 1956, menamatkan S-1 Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Bandung (1981), melanjutkan pendidikan master bidang geoteknik di Universitas California, Berkeley, AS (1986). Memiliki spesialisasi di bidang geoteknik, memiliki kualifikasi Ahli Geoteknik Utama (G2) HATTI (sejak 2004). Membina karier di berbagai perusahaan konsultan di AS (1986-1993 dan 1999-2004) seperti Fugro West, Harding Lawson Associates. Pengalaman profesional di bidang geoteknik (pondasi dan *shoring*) serta teknik gempa di sejumlah negara seperti Indonesia, AS, Kamboja, dan Laos. Mendesain beberapa gedung tinggi seperti Mulia Signature Tower di Kuala Lumpur, serta Menara Millennium dan Menara Sequis di Jalan Sudirman, Jakarta. Sejak 2004 menjadi pemilik PT Geo Prima, perusahaan konsultan untuk konstruksi.

DAFTAR GEDUNG KANTOR OJK





DLOG OJK



DLOG OJK

OJK Membangun Negeri

Pengarah

Wimboh Santoso

Penanggung Jawab

Anto Prabowo

Koordinator

Didik Supriyadi

Anggota

Dian Andriani

Taufik Andriawan

Rialita Dwi Lestari

Dian Kartika Utomo

Gati Wibawati

Dinitya Laksitha Putri

Umi Subadriyah

Tia Dwi Anugrah

Penulis dan Penyunting

Pramudyarto Hadisubroto

Endy Subijono

Bambang Eryudhawan

Narasumber

Yandi Andri Yatmo

Paramita Atmodiwirjo

Arya Abieta

Karnaya

Konsultan Penerbitan

Edna Caroline

Editor

Pieter P Gero

Penyelaras Bahasa

Lina Nursanty

Nanik Dwiastuti

Pengarah Fotografi

M Yuniadhi Agung

Pengarah Artistik

Tommy Thomdean

Desain Grafis

Yossy Sihol Putra

Akreditasi Foto

Adi Pranata
(h 98)

Embong Salampessy
(h16, 34, 43, 57, 75-79)

Immanuel Antonius
(h2, 206-209)

M Yuniadhi Agung
(hii, iv, 5,14, 24, 32, 40,42, 44,
45, 51,52, 56, 57, 122, 124-128, 131-133,
192, 212)

Mamuk Ismuntoro
(h5, 41, 57, 134,136-138)

Nova Wahyudi
(h36, 57,156-160)

P Raditya Mahendra Yasa
(h20, 28, 113)

Dok pribadi Khoffah Indar Parawansa
(h135)

Dok pribadi Indah Kurnia
(h137)

Dokumentasi OJK

Foto Cover:
Endy Subijono
M Yuniadhi Agung
Dokumentasi OJK

Diterbitkan oleh:

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 12,
Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. © Otoritas Jasa Keuangan-2022





Membangun Negeri

Deputi Komisioner
Hubungan Masyarakat dan Logistik
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Menara Radius Prawiro
Lt.12, Komplek Perkantoran
Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta
10350

